



KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT PULAU-PULAU KECIL TERLUAR: Studi Kepulauan Marore dan Pulau Sebatik

EDITOR:
SANDY NUR IKFAL RAHARJO

**KETAHANAN
SOSIAL
MASYARAKAT
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR:
Studi Kepulauan Marore
dan Pulau Sebatik**



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT PULAU-PULAU KECIL TERLUAR: Studi Kepulauan Marore dan Pulau Sebatik

EDITOR:
SANDY NUR IKFAL RAHARJO



LIPi Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2018 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Pusat Penelitian Politik

Katalog dalam terbitan

Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar: Studi Kepulauan Marore dan Pulau Sebatik/Sandy Nur Ikfal Raharjo (ed.).– Jakarta: LIPI Press, 2018.

xiv + 198 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-979-799-951-3 (cetak)
978-979-799-952-0 (e-book)

1. Ketahanan
3. Sebatik

2. Masyarakat

060.598 3

Copy editor : Tantrina
Proofreader : Sonny Heru Kusuma dan Fadly Suhendra
Penata Isi : Siti Qomariyah dan Rahma Hilma Taslima
Desainer sampul : Rusli Fazi

Cetakan pertama : Maret 2018



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. R.P. Soeroso 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp: (021) 314 0228, 314 6942. Faks.: (021) 314 4591
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id
 LIPI Press
 @lipi_press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	vii
KATA PENGANTAR	ix
PRAKATA	xiii
BAB I KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT PULAU-PULAU KECIL TERLUAR: CATATAN PENDAHULUAN Sandy Nur Ikfal Raharjo	 1
BAB II KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT KEPULAUAN MARORE Esty Ekawati	 29
BAB III KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT PULAU SEBATIK M. Fakhry Ghafur	 69
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA LINTAS BATAS DI KEPULAUAN MARORE Bayu Setiawan	 99
BAB V EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA LINTAS BATAS DI SEBATIK Esty Ekawati dan A. Wildan Masyhari	 133

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB VI DAMPAK KERJA SAMA LINTAS BATAS TERHADAP KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT MARORE DAN SEBATIK	
Sandy Nur Ikfal Raharjo	157
BAB VII KETAHANAN SOSIAL DAN KERJA SAMA LINTAS BATAS: CATATAN PENUTUP DAN LANGKAH KE DEPAN	
Sandy Nur Ikfal Raharjo	181
GLOSARIUM	187
DAFTAR SINGKATAN	189
INDEKS	193
BIOGRAFI PENULIS	197

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Bunga rampai ini mengulas pelaksanaan kerja sama lintas batas di Kepulauan Marore yang berbatasan dengan Filipina dan Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia serta bagaimana dampaknya terhadap ketahanan sosial masyarakat. Selain itu, dibahas pula mengenai kekerabatan yang terjalin antara masyarakat perbatasan di sisi Indonesia dan masyarakat perbatasan di sisi negara tetangga. Kondisi tersebut menggambarkan modal sosial dan modal budaya yang cukup kuat terdapat pada masyarakat pulau-pulau kecil terluar.

Bunga rampai ini juga memperlihatkan aktivitas yang terjadi di daerah pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Berbagai kebijakan terkait infrastruktur ataupun kerja sama dengan negara tetangga terus dijalin agar masyarakat merasa nyaman dan dimudahkan, salah satunya ketika melewati pos lintas batas antarnegara.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan bunga rampai ini.

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR

Dinamika yang terjadi pada masyarakat Indonesia, sebagai akibat dari relasi global-regional-nasional-lokal, menyebabkan kerawanan, kerentanan, eksklusi sosial, kemiskinan, kesenjangan, dan konflik sosial pada kelompok masyarakat tertentu. Di satu sisi, globalisasi memberikan dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi, kemajuan iptek untuk sektor kesehatan, dan akses pendidikan global. Di sisi lain, dampak negatif berupa ketimpangan ekonomi (sebagai akibat dari akses yang dimiliki oleh tiap-tiap wilayah dan kelompok sosial) juga muncul di mana-mana. Selain itu, terjadi pula kerusakan ekologi sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan korporasi global.

Dalam konteks regional, pemberlakuan pasar bebas atas nama “masyarakat ekonomi” yang bersifat regional, tidak hanya mempunyai dampak ekonomi, tetapi juga dampak sosial. Dampak tersebut berupa tidak siapnya sumber daya manusia Indonesia bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengangguran dengan segala implikasi sosialnya.

Pada tataran nasional, terdapat tiga masalah pokok yang menjadi persoalan bangsa seperti dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yaitu (1) merosot-

nya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Kewibawaan negara adalah tentang kehadiran negara dalam berbagai persoalan keseharian masyarakat, termasuk masalah perlindungan tenaga kerja, konflik, dan jaminan rasa aman untuk masyarakat. Melemahnya sendi perekonomian bangsa adalah tentang tingkat kesejahteraan yang menurun, kesenjangan yang melebar, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal untuk kepentingan rakyat. Persoalan kepribadian bangsa dan intoleransi berkaitan dengan melunturnya nilai-nilai solidaritas bangsa seperti karakter gotong royong dan menguatnya intoleransi berbasis perbedaan etnisitas, agama, dan golongan. Permasalahan tadi semakin kompleks di perbatasan negara yang jauh dari pemerintah pusat, namun lebih dekat dengan negara tetangga.

Guna menjawab berbagai permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang bersifat komprehensif. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui mekanisme kegiatan penelitian unggulan terlibat dalam upaya memecahkan permasalahan bangsa dengan memperkuat ketahanan sosial. Hal ini dilatarbelakangi oleh tiga hal, yaitu (1) pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidisiplin, termasuk intra ilmu-sosial humaniora dengan rumpun ilmu pengetahuan kebumian, ilmu pengetahuan hayati, dan ilmu pengetahuan teknik; (2) kegiatan penelitian unggulan mempunyai rekam jejak yang baik untuk diteruskan sebagai penelitian terapan; dan (3) kegiatan sebelumnya (kegiatan kompetitif) telah memberikan masukan kebijakan yang strategis terkait masalah konflik sosial dan permasalahan pengurangan kemiskinan.

Buku ini merupakan hasil penelitian salah satu kelompok peneliti dalam skema Kegiatan Penelitian Unggulan LIPI, Subketahanan Sosial tahun 2016–2017. Buku ini merangkum signifikansi kegiatan penelitian unggulan tersebut dengan berpijak pada konsep ilmu sosial dan pengalaman empiris yang mendalam.

Belajar dari kondisi wilayah perbatasan di Kepulauan Marore, Sulawesi Utara; dan Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, buku ini berhasil menunjukkan bagaimana berbagai modal (modal alam, fisik, sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan, modal sosial, dan modal politik) dikapitalisasi untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Modal sosial (dan budaya) diberikan perhatian khusus karena selama ini model pembangunan yang dijalankan hanya berfokus pada modal alam, fisik, sumber daya manusia, dan modal ekonomi keuangan. Modal sosial-budaya berfokus pada jaringan (*network*), kepercayaan (*trust*), dan peran nilai-nilai dan norma jarang dibahas sebagai modal penting. Kalaupun dibahas, tetap “jauh panggung dari api” dalam implementasinya.

Buku ini juga memberikan dua kontribusi untuk pengembangan wacana perbatasan, *Pertama*, melihat perbatasan dalam konteks permasalahan pulau-pulau kecil. Hal ini penting karena pulau-pulau kecil selama ini sering dianggap sebagai ekosistem yang mempunyai kerentanan geografis, geologis, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. *Kedua*, perbatasan dalam konteks ketahanan sosial-budaya dan politik. Hal ini penting mengingat walaupun telah banyak penelitian di kawasan perbatasan, penelitian yang menggunakan perspektif ketahanan sosial-budaya masih jarang dilakukan.

Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bagi para pemangku kepentingan untuk pembangunan wilayah perbatasan pada satu sisi dan wacana pengembangan konsep ketahanan sosial pada sisi lainnya.

Jakarta, 31 Juli 2017

Herry Yogaswara

Koordinator Subkegiatan Ketahanan Sosial

Kegiatan Unggulan LIPI

PRAKATA

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menetapkan agenda prioritas “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” sebagai Nawa Cita ketiga yang ingin direalisasikan selama kepemimpinannya. Agenda tersebut mempertegas pentingnya kawasan perbatasan sebagai bagian dari “daerah pinggiran” dalam pembangunan nasional dan besarnya perhatian pemerintah terhadapnya.

Kawasan perbatasan hingga saat ini masih menghadapi berbagai masalah sehingga relatif tertinggal dibanding dengan daerah Indonesia lainnya. Ketertinggalan tersebut semakin terasa di pulau-pulau kecil terluar yang akses transportasinya masih terbatas dan bergantung pada kondisi alam. Berbagai infrastruktur dasar lainnya pun masih belum sepenuhnya tersedia. Hal ini merefleksikan potensi kerawanan masyarakat pulau-pulau kecil terluar. Kondisi tersebut semakin kompleks karena sebagian pulau-pulau kecil terluar tersebut justru secara geografis lebih dekat ke pusat ekonomi negara tetangga. Kegiatan lintas batas pun menjadi satu hal yang secara alami terjadi dan tidak dapat dihindari. Aktivitas lintas batas ini justru berpotensi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dimanfaatkan sebagai solusi pendukung terhadap kerawanan tersebut.

Bunga rampai yang disusun berdasarkan hasil penelitian di bawah skema Kegiatan Unggulan LIPI Tahun 2016 ini menghadirkan potret pelaksanaan kerja sama lintas batas di Kepulauan Marore yang berbatasan dengan Filipina dan Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia, serta bagaimana dampaknya terhadap ketahanan sosial masyarakat. Jika selama ini kajian perbatasan masih banyak yang memandang elemen eksternal sebagai ancaman, bab-bab dalam buku ini justru mengajak kita melihat elemen eksternal sebagai peluang—tentu dengan tetap menerapkan kewaspadaan yang proporsional. Semoga buku ini dapat memperkuat semangat perubahan paradigma pembangunan perbatasan dari *inward looking* menuju *outward looking*. Salam Perbatasan Aman dan Sejahtera.

Jakarta, Mei 2017

Editor

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB I

Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar: Catatan Pendahuluan

Sandy Nur Ikfal Raharjo

A. PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN PERSOALANNYA

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak wilayah yang berbatasan dengan negara lain, baik di darat maupun di laut. Di laut, wilayah Indonesia bersinggungan dengan wilayah India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Kawasan perbatasan laut tersebut mencakup 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi.¹

Dari 111 pulau kecil terdepan tersebut, sebagian di antaranya dihuni oleh masyarakat. Sayangnya, ketahanan sosial masyarakat pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Dari aspek sumber daya manusia, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya cenderung rendah. Interaksi dengan masyarakat di daratan utama pun jarang dilakukan. Dari aspek sumber daya alam, ketersediaan air dan keanekaragaman sumber daya lainnya terbatas. Dari aspek ekonomi, anggaran pembangunan perbatasan masih terpisah-pisah secara sektoral, sementara

¹ “Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.”

perekonomian masyarakatnya masih rendah. Dari aspek modal fisik, pembangunan infrastruktur dan fasilitas transportasi masih minim.

Selain hambatan-hambatan tersebut, masyarakat pulau-pulau kecil terluar juga harus menghadapi tantangan dari luar, baik dalam konteks ekonomi, maupun politik-keamanan. Dalam konteks ekonomi, nelayan kecil harus bersaing dengan kapal-kapal penangkap ikan besar dari dalam negeri dan negeri tetangga. Masalahnya, kapasitas dan peralatan yang dipakai nelayan pulau-pulau kecil umumnya bertonase kecil, sementara kapal nelayan asing berkapasitas besar dan berteknologi canggih. Nelayan asing juga sering menangkap ikan hingga dekat perairan teritorial menggunakan pukat harimau. Hal ini membuat nelayan pulau kecil perbatasan kalah bersaing dan hanya mendapatkan ikan-ikan kecil di sekitar pulau.²

Contoh lainnya, masyarakat perbatasan juga harus menghadapi tantangan sehubungan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 31 Desember 2015. Dengan diberlakukannya MEA, keluar-masuknya barang dan manusia (termasuk tenaga kerja) dari sembilan negara anggota ASEAN yang lain menjadi semakin mudah. Di satu sisi, hal ini memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal karena suplai barang-barang kebutuhan harian didapat dengan lebih mudah. Di sisi lain, hal ini juga dapat merugikan mereka karena persaingan produk lokal dengan produk sejenis dari luar sudah benar-benar bebas, tanpa ada proteksi tarif maupun nontarif. Sebelumnya, produk-produk yang dapat masuk ke kawasan perbatasan biasanya dibatasi jumlah dan wilayah peredarannya serta ditentukan pelabuhannya.

Dalam konteks politik-keamanan, masyarakat pulau-pulau kecil terluar juga menghadapi berbagai tantangan. Sengketa batas, seperti di Laut China Selatan dan Ambalat, sewaktu-waktu dapat pecah menjadi konflik dan menjadi ancaman bagi masyarakat pulau-pulau

² Athiqah Nur Alami dkk, *Gender-Based Natural Resource Management in Indonesian Marine Borders* (Yogyakarta: Pital, 2015), 66–69.

kecil terluar. Insiden intervensi kapal *coastguard* China dalam proses penangkapan kapal ikan berbendera China oleh kapal patroli Indonesia pada Maret 2016 menjadi bukti bahwa posisi Indonesia kurang dihormati padahal penangkapan tersebut terjadi di wilayah perairan Indonesia.³ Jika ketegangan meningkat dan konflik pecah, masyarakat pulau-pulau kecil terluar di sekitar perairan itulah yang pertama menerima dampaknya.

Kondisi tersebut menggambarkan kerentanan (*vulnerability*) masyarakat pulau-pulau kecil terluar dalam membangun dan mempertahankan ketahanan sosialnya. Sebagaimana didefinisikan Adger, ketahanan (sosial) adalah kemampuan masyarakat menahan gangguan dari luar atau perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang dapat mengubah tatanan masyarakat dan struktur sosial.⁴ Masalahnya, bagaimana masyarakat lokal dapat menahan gangguan dari luar tersebut jika modal internal yang mereka miliki sangat terbatas, baik modal manusia, sumber daya alam, keuangan, maupun fisik. Padahal modal-modal inilah yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.⁵

Pemerintah Indonesia mengalami berbagai kendala dalam mengatasi hal tersebut. *Pertama*, pemerintah tidak dapat menutup kawasan perbatasan dari dunia luar karena fenomena globalisasi memang sudah menjangkau kawasan perbatasan Indonesia. Indonesia juga sudah terikat dengan berbagai rezim kerja sama internasional, misalnya MEA. *Kedua*, Pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan kemampuan mengatasi semua persoalan itu secara mandiri. Kondisi

³ Erik Snow, "Begini Cerita Kapal TNI AL Dicueki Coast Guard China di Laut Natuna," diakses pada 3 November 2016 dari <http://batamnews.co.id/berita-11906-begini-cerita-kapal-tni-al-dicueki-coast-guard-china-di-laut-natuna.html>.

⁴ Neil W. Adger, "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24 No.3 (2000): 347–364.

⁵ Food and Agriculture Organization, "Socio-Economic & Livelihood Analysis in Investment Planning," dalam *FAO Policy Learning Programme: Module 3 Investment and Resource Management* (Januari 2008).

inilah yang menjadi dasar perlunya solusi alternatif sebagai strategi membangun dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pulau-pulau kecil terluar.

Di tengah berbagai persoalan tadi, salah satu fakta yang menarik dari daerah perbatasan adalah adanya pertalian keluarga, suku, dan budaya yang relatif kuat antara masyarakat perbatasan di sisi Indonesia dan masyarakat perbatasan di sisi negara tetangga. Kondisi tersebut menggambarkan modal sosial dan modal budaya yang cukup kuat pada masyarakat pulau-pulau kecil terluar. Modal sosial dan modal budaya ini membuat mereka terbiasa saling berkunjung dan berdagang berbagai komoditas lintas batas. Intensitas kunjungan dan perdagangan ini semakin menguat manakala suplai kebutuhan sehari-hari dari pusat pemerintahan tidak berjalan optimal karena jarak yang jauh dan akses transportasi yang sulit.

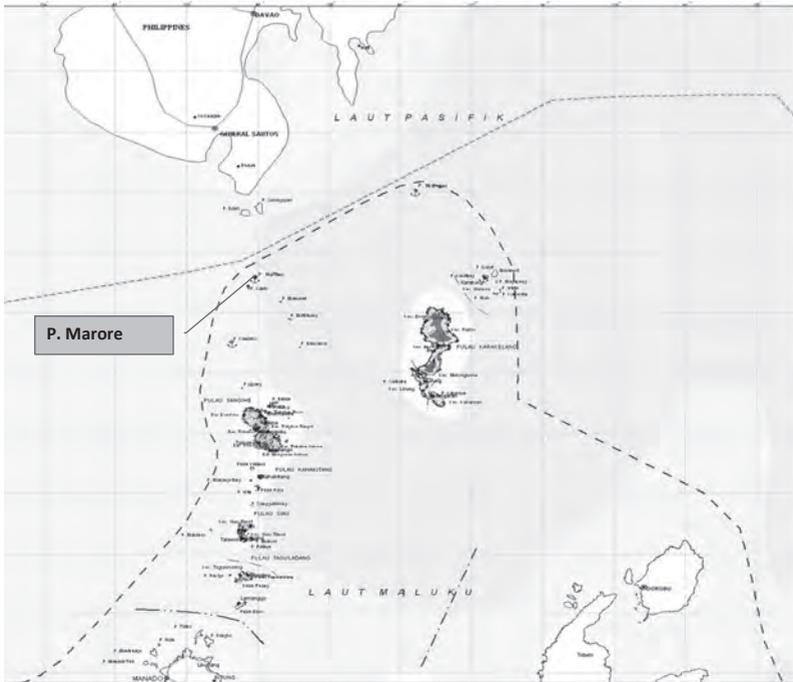
Salah satu kawasan perbatasan yang mengalami kondisi seperti itu adalah Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Masyarakat Sangir (sebutan untuk penduduk di Sangihe), dan Orang Sulu maupun Mindanao (sebutan untuk penduduk Filipina Selatan) sejak dahulu sudah terbiasa saling berkunjung, berdagang, dan bekerja di kawasan ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang Sangir yang tinggal di pantai selatan Mindanao dan Davao selama berabad-abad.⁶ Tidak mengherankan jika pada zaman kerajaan Kendahe di Sangihe, juga Kerajaan Sulu dan Kesultanan Buayan di Mindanao, kawasan Pulau Marore merupakan area perdagangan yang cukup ramai.⁷ Walaupun kini telah menjadi kawasan perbatasan, perdagangan antarwarga di kawasan tersebut tetap berjalan.

⁶ Alex J. Ulaen, *Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan* (Jakarta: Sinar Harapan, 2003), 48.

⁷ Djorina Velasco, "Navigating the Indonesian-Philippines Border: The Challenges of Life in the Border zone," *Kasarinlan: Philippines Journal of Third World Studies* 25 (2010): 101.

Untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas di kawasan tersebut, Pemerintah Indonesia dan Filipina menyepakati kerja sama lintas batas *Border Crossing Agreement* (BCA) melalui *Agreement Between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia on Immigration* pada 4 Juli 1956.⁸ Perjanjian tersebut menetapkan beberapa wilayah kedua negara sebagai kawasan perbatasan. Selain itu, warga dari kedua negara yang memiliki kartu lintas batas dapat secara bebas masuk dan melakukan perjalanan di dalamnya untuk tujuan bisnis, kunjungan keluarga, ziarah keagamaan, dan atau rekreasi. Untuk mengakomodasi perdagangan lintas batas secara khusus, kedua negara kemudian menandatangani *Agreement on Border Trade Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines* pada 8 Agustus 1974 di Jakarta yang diratifikasi Indonesia pada Maret 1975. Barang-barang bawaan para pelintas batas yang berupa barang dagangan tertentu dibebaskan dari pajak jika tidak melebihi nilai US\$150 per perahu (*vessel*) atau US\$1.500 per kumpit (*boat*) untuk satu kali perjalanan.

⁸ Ada perbedaan nama dokumen perjanjian ini. Dalam catatan Kementerian Luar Negeri RI (treaty.kemlu.go.id), dokumen tersebut dinamai *Agreement Providing for the Treatment according the Nationals who are Legally within the Territory of the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines*. Kemudian di dalam lampiran (*protocol of exchange*), dokumen tersebut dinamakan *Agreement between the Republic of The Philippines and The Republic of Indonesia, on Immigration*. Ketika dirujuk dalam perjanjian Perdagangan Lintas Batas (*Border Trade Agreement*) 1974, dokumen ini disebut *Immigration Agreement on Repatriation and Border Crossing Arrangement between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines*.



Gambar 1.1 Pulau Marore⁹

Kawasan pulau perbatasan lain yang juga memiliki kerja sama serupa adalah Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian selatan menjadi wilayah Indonesia, sementara bagian utara menjadi wilayah negara bagian Sabah, Malaysia. Untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas tradisional, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati Pengaturan Dasar mengenai Lintas Batas tertanggal 26 Mei 1967 dan Persetujuan mengenai Lintas Batas yang ditandatangani di Medan tanggal 12 Mei 1984. Kedua perjanjian ini sempat direncanakan untuk direvisi melalui *Agreement between the Government of the Republic of*

⁹ Presentasi Bappeda Kepulauan Talaud dalam FGD “Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Melalui Pengelolaan SDA Berbasis Gender” di Melonguane, 3 April 2012.

Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing tanggal 12 Januari 2006 di Bukit Tinggi, tetapi hingga akhir 2016 dokumen tersebut belum diratifikasi.



Gambar 1.2 Peta Pulau Sebatik¹⁰

Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Kecamatan Sebatik merupakan salah satu kawasan perbatasan yang masuk dalam wilayah jangkauan kerja sama lintas batas selain kecamatan-kecamatan lain

¹⁰ <http://gislokpri.bnpp.go.id/gislokpri/index.php/printmap>, diakses pada 18 April 2017

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.¹¹ Dalam perjanjian tersebut, kedua negara menerapkan kebijakan kemudahan penggunaan pas lintas batas (*border pass*) bagi warga kawasan perbatasan untuk tujuan kunjungan keluarga, sosial/budaya, perdagangan lintas batas, tugas pemerintahan, dan tujuan-tujuan lain yang disepakati oleh kedua pihak. Untuk Kabupaten Nunukan, ada dua *exit/entry points*, yaitu Nunukan dan Sungai Pancang. Melalui dua pintu tersebut, warga Sebatik pemilik pas lintas batas dapat pergi ke Malaysia melalui *exit/entry point* Tawau, demikian juga sebaliknya.¹²

Mengenai perdagangan lintas batas, kedua negara secara khusus menandatangani *Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Malaysia* di Jakarta pada 24 Agustus 1970. Menurut persetujuan ini, perdagangan lintas batas laut dapat memakai perahu dengan kapasitas maksimal 20 m³, dan nilai barang dagangannya maksimal 600 ringgit Malaysia per perahu per perjalanan.

Selain kerja sama lintas batas dalam perdagangan, Indonesia dan Malaysia juga menandatangani kerja sama lintas batas dalam pengamanan daerah perbatasan melalui *Security Arrangement in the Border Regions between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia* tertanggal 3 Desember 1984 di Yogyakarta. Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk operasi gabungan dan pengejaran terhadap ancaman keamanan di perbatasan kedua negara.

Kerja sama lintas batas tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan modal-modal ketahanan sosial. Modal yang dikembangkan tidak hanya modal sosial dan modal budaya, tetapi juga modal keuangan (melalui perdagangan lintas batas) dan modal-modal

¹¹ Pada waktu perjanjian dibuat, Kecamatan Sebatik masih masuk wilayah Kalimantan Timur. Seiring berdirinya Provinsi Kalimantan Utara pada 2 Oktober 2012, Kecamatan Sebatik kemudian menjadi bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

¹² Sayangnya, perjanjian 2006 ini sampai November 2016 belum diratifikasi.

lainnya, tergantung bidang kerja sama lintas batas yang disepakati. Kerja sama lintas batas ini memiliki kelebihan karena modal/sumber daya yang digunakan untuk mencapai ketahanan sosial masyarakat pulau-pulau kecil terluar berasal dari dua negara sekaligus. Kelebihan lainnya, beberapa hal yang dulu dianggap sebagai ancaman dari luar dapat beralih fungsi menjadi modal ketahanan sosial. Hal inilah yang mendasari pentingnya buku tentang kerja sama lintas batas dalam meningkatkan ketahanan sosial di masyarakat pulau-pulau kecil terluar Indonesia.

Ada beberapa hal penting yang ditelaah dalam buku ini. *Pertama*, identifikasi dan analisis kondisi ketahanan sosial di pulau-pulau kecil terluar. Dengan menggunakan kasus Pulau Marore dan Pulau Sebatik, dilakukan identifikasi untuk membuktikan asumsi adanya kerentanan dalam ketahanan sosial di dua pulau tersebut. Identifikasi juga diperlukan untuk melihat aspek-aspek/modal ketahanan sosial mana saja yang lemah dan mana yang kuat sehingga dapat ditentukan kerja sama lintas batas yang diperlukan.

Kedua, evaluasi pelaksanaan kerja sama lintas batas yang selama ini sudah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kerja sama lintas batas yang sudah disepakati di atas kertas benar-benar dijalankan di lapangan. Belajar dari pengalaman kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya, banyak kebijakan yang sudah ditetapkan tetapi tidak pernah diimplementasikan. Misalnya, berdasarkan temuan Kadin Kabupaten Nunukan saat kunjungan ke supermarket dan pasar tradisional di Filipina Selatan, banyak produk asal Indonesia yang beredar di Filipina, tetapi labelnya telah diganti menjadi label Malaysia. Menurut pengakuan salah seorang pengusaha Filipina, banyak produk Indonesia yang dibutuhkan di Filipina, tetapi dia tidak tahu cara mendapatkannya langsung dari Indonesia sehingga pengusaha Malaysia-lah yang memanfaatkan peluang ini.¹³ Hal ini

¹³ M. Rusman, "Produk Indonesia banyak Beredar di Filipina," *Antara Kaltim*, 27 Juni 2012, <http://kaltim.antaranews.com/berita/7777/produk-indonesia-banyak-beredar->

menunjukkan indikasi belum optimalnya kerja sama lintas batas Indonesia dengan Filipina.

Ketiga, analisis dampak pelaksanaan kerja sama lintas batas terhadap ketahanan sosial masyarakat pulau-pulau kecil terluar, termasuk faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Dampak tersebut, baik positif maupun negatif, dapat diukur melalui indikator modal-modal ketahanan sosial berdasarkan *Sustainable Livelihoods* (LS), yaitu modal manusia (*human capital*), modal sumber daya alam (*natural capital*), modal keuangan (*financial capital*), modal fisik (*Physical capital*), dan modal sosial (*social capital*)¹⁴.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, buku ini berupaya menyajikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi ketahanan sosial di pulau-pulau kecil terluar Marore dan Sebatik serta pelaksanaan kerja sama lintas di kedua wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. *Pertama*, wawancara (tatap muka langsung) untuk mengumpulkan data primer dari para narasumber. *Kedua*, observasi untuk mengamati objek penelitian yang ada di lapangan. Hasil observasi didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan catatan lapangan. *Ketiga*, studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder, baik berupa dokumen pemerintah, buku, disertasi, tesis, laporan penelitian, jurnal, maupun artikel internet.

B. HUBUNGAN KETAHANAN SOSIAL DAN KERJA SAMA LINTAS BATAS

Dalam menguraikan kondisi ketahanan sosial masyarakat di pulau-pulau kecil terluar, buku ini tidak lepas dari dua konsep besar yang menjadi bagian pembahasan, yakni ketahanan sosial dan kerja

di-filipina.

¹⁴ Food and Agriculture Organization, "Socio-Economic & Livelihood Analysis in Investment Planning," dalam *FAO Policy Learning Program: Module 3 Investment and Resource Management*, Januari 2008.

sama lintas batas. Bagian ini disajikan untuk lebih memahami definisi masing-masing konsep dan bagaimana hubungan antara ketahanan sosial dan kerja sama lintas batas di kawasan perbatasan.

1. Ketahanan Sosial

Untuk menghadapi pengaruh dari negara tetangga, tentu diperlukan antisipasi dari masyarakat wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan permasalahan tersebut. Diperlukan ketahanan sosial masyarakat yang dapat menahan laju arus pengaruh yang membawa perubahan, terutama perubahan yang merugikan masyarakat wilayah perbatasan. Ketahanan sosial perlu diperkuat sebagai bagian dari benteng pengamanan untuk menangkis pengaruh dan sekaligus sebagai senjata untuk melawan pengaruh sosial yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan merugikan masyarakat wilayah perbatasan.

Ketahanan sosial dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mengatasi berbagai risiko sebagai dampak dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Konsep ketahanan (*resilience*) berasal dari ekologi, namun dapat digunakan pula dalam ranah sosial. Pada dasarnya, ketahanan adalah kemampuan suatu sistem untuk dapat bertahan dari gangguan. Ketahanan sosial adalah kemampuan kelompok atau masyarakat untuk menahan gangguan dari luar atau perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang dapat mengubah tatanan masyarakat atau struktur sosial.¹⁵ Masyarakat memiliki kemampuan mengantisipasi risiko, membatasi dampak, bangkit kembali dengan cepat untuk menghadapi perubahan—dengan berbagai cara—agar tetap dapat bertahan hidup (*survival*), beradaptasi, berevolusi, dan mengalami pertumbuhan.¹⁶ Dengan demikian,

¹⁵ Neil W. Adger, “Social and Ecological Resilience: Are They Related?” *Progress in Human Geography* 24, No. 3 (2000): 349.

¹⁶ Community & Regional Resilience Institute, *Definitions of Community Resilience: An Analysis, A CARRI Report* (CARRI dan Meridian Institute, 2013).

ketahanan mencakup kemampuan untuk menangani faktor eksternal dan mengurangi kerentanan. Pada intinya, ketahanan bertujuan meminimalkan kerugian dan agar dapat segera memulihkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat.¹⁷

Ketahanan membuat masyarakat tidak hanya mampu menghadapi gangguan, tetapi juga mampu menghadapi tantangan yang dapat memperburuk kehidupan dan memfasilitasi lebih banyak tindakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini berarti masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk menghadapi gangguan atau tekanan dengan melakukan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi.

Ketahanan memiliki empat komponen penting, yaitu respons, pengorganisasian diri, pembelajaran yang dapat diambil, dan adaptasi.¹⁸ Selanjutnya, terdapat tiga dimensi penting dari ketahanan sosial, yaitu kapasitas masyarakat sebagai pelaku untuk mengatasi segala permasalahan (*coping capacities*), kemampuan masyarakat untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menyesuaikan diri untuk dapat menerima segala tantangan pada masa mendatang (*adaptive capacities*), serta kemampuan masyarakat untuk menciptakan kelembagaan yang dapat mendorong kesejahteraan dan ketahanan masyarakat berkelanjutan pada masa sekarang dan masa mendatang (*transformative capacities*).¹⁹

Ketahanan sosial masyarakat sering dikaitkan dengan kemampuan mengantisipasi, menahan, menyerap, menanggapi, beradaptasi,

¹⁷ Sergey Lisnyak dan Ilkom Sharipov, "Exploring the Formal and Informal Institutions as a Key Tool for Enhancing Economic Resilience," *CES Working Papers* 7, No.4 (2015): 891–900.

¹⁸ Guy Sapirstein, n.d, *Social Resilience: The Forgotten Element in Disaster Reduction*, Boston: Organizational Resilience International 5, http://www.oriconsulting.com/social_resilience.pdf.

¹⁹ Markus Keck dan Patrick Sakdapolrak, "What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward," *Erdkunde* 67, No. 1 (2013): 5–19.

mengatasi, dan pulih dari berbagai gangguan.²⁰ Masyarakat dengan kemampuannya dapat mengatasi risiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang selalu menjadi ancaman. Kemampuan bertahan ini digunakan juga untuk mengatasi arus globalisasi yang berlangsung sampai saat ini. Dengan kemampuannya, masyarakat dapat menghindari dan mengelola konflik serta mengubah berbagai ancaman yang ada menjadi peluang yang menguntungkan. Ketahanan sosial bukan hanya kemampuan untuk bertahan, melainkan juga kemampuan untuk secepatnya kembali pada keadaan semula, bahkan mungkin mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ketahanan sosial bukanlah hasil akhir dari masyarakat, tetapi proses dan dinamika masyarakat membuat masyarakat memiliki daya tahan sosial dan dapat mengatasi berbagai dampak ancaman dan perubahan.

Ada beberapa metode pengukuran ketahanan sosial yang dikenal. FAO, misalnya, memperkenalkan konsep *resilience score* untuk mengukur tingkat ketahanan suatu masyarakat yang berbasis pada unit keluarga. Ada beberapa indikator kuantitatif yang digunakan, yaitu 1) pendapatan dan akses terhadap makanan; 2) kepemilikan aset, seperti tanah dan ternak; 3) jaring pengamanan sosial (*social safety nets*), seperti bantuan makanan dan keamanan sosial; 4) akses terhadap layanan dasar, seperti air, perawatan kesehatan, dan listrik; 5) kemampuan adaptif rumah tangga yang dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan keanekaragaman sumber pendapatan; serta 6) stabilitas faktor-faktor tersebut dari waktu ke waktu. Namun, ketahanan yang dimaksud FAO di sini lebih merujuk pada ketahanan pangan.²¹

²⁰ L. Carlson, dkk, *Resilience: Theory and applications* (Argonne: Argonne National Laboratory, 2012).

²¹ Food and Agriculture Organization, "Measuring Resilience: A Concept Note on the Resilience Tool," diakses pada 26 Maret 2016 dari <http://www.fao.org/docrep/013/al920e/al920e00.pdf>.

Metode lain yang banyak digunakan adalah *Sustainable Livelihood Approach* atau *Sustainable Livelihood Theory*. Metode ini mengukur ketahanan sosial berdasarkan aset yang dimilikinya. Aset yang dimaksud ada lima jenis, yaitu 1) modal alam (lingkungan), seperti tanah, air, kehidupan liar, biodiversitas, dan sumber daya lingkungan; 2) modal fisik yang meliputi infrastruktur dasar (air, sanitasi, energi, transportasi, dan komunikasi), perumahan, dan alat-alat produksi; 3) modal manusia yang meliputi kesehatan, pengetahuan, keahlian, informasi, dan kemampuan untuk bekerja; 4) modal sosial berupa hubungan saling percaya, keanggotaan dalam sebuah kelompok, jaringan, akses terhadap lembaga yang lebih luas, dan lain-lain; 5) modal keuangan yang meliputi pendapatan rutin/dana pensiun, tabungan, dan suplai kredit.²² Selain lima aset utama tadi, ada beberapa versi tambahan aset. McLeod, misalnya, menambahkan dua aset lagi, yaitu pengetahuan kelembagaan dan modal politik.²³

Pengembangan lain yang lebih kompleks dan komprehensif adalah metode *Sustainable Livelihood Frameworks*. Metode ini tidak hanya melihat kepemilikan dan akses terhadap lima aset/modal tersebut, tetapi juga menyandingkannya dengan pelayanan dan kesempatan yang diciptakan oleh faktor ekologi, struktur sosial, dan proses kelembagaan.

Dari metode-metode pengukuran tersebut, SLF dapat dikatakan sebagai metode pengukuran yang paling komprehensif, tetapi cukup sulit dilakukan. Menyadari keterbatasan kemampuan tim peneliti, metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah

²² Lihat Mike Majale, "Towards Pro-Poor Regulatory Guidelines for Urban Upgrading," dalam *International Workshop on Regulatory Guidelines for Urban Upgrading*, Bourton-On-Dunsmore, 17–18 Mei 2001.

²³ R. McLeod, "The Impact of Regulations and Procedures on the Livelihoods and Asset Base of the Urban Poor: A Financial Perspective," dalam *International Workshop on Regulatory Guidelines for Urban Upgrading*, Bourton-on-Dunsmore, 17–18 Mei 2001.

metode *Sustainable Livelihood Theory* ditambah satu aset tambahan dari McLeod, yaitu modal politik/kelembagaan pemerintahan.

2. Kerja Sama Lintas Batas²⁴

Kerja sama lintas batas/perbatasan (*cross-border co-operation*) didefinisikan oleh Gerfert sebagai salah satu bentuk kerja sama internasional yang dilakukan secara bilateral ataupun multilateral antarnegara atau antarkawasan, baik yang berbatasan langsung maupun yang tidak, dalam rangka mencapai keuntungan atau tujuan bersama.²⁵ Sousa mendefinisikan kerja sama perbatasan sebagai setiap jenis aksi bersama antara lembaga publik ataupun privat dari dua atau lebih negara yang digerakkan oleh faktor-faktor geografis, ekonomi, budaya/identitas, dan politik/kepemimpinan. Tujuannya memperkuat hubungan bertetangga (yang baik), mengatasi masalah bersama, dan mengelola sumber daya bersama melalui berbagai mekanisme yang tersedia.²⁶

Kerja sama lintas batas mulai berkembang seiring adanya perubahan perspektif negara dan masyarakat terhadap perbatasan. Perspektif yang berkembang selama ini lebih melihat perbatasan sebagai penghalang atau pemisah antara satu negara dan masyarakat dengan negara dan masyarakat lain.²⁷ Dalam konteks perbatasan Indonesia, pendekatan yang selama ini menjadi arus utama adalah pendekatan keamanan (*security approach*), yang berorientasi bahwa

²⁴ Sebagian besar penjelasan konsep kerja sama lintas batas diambil dari tulisan penulis sebelumnya, yaitu Sandy Nur Ikfal Raharjo, *Kerja Sama Perbatasan Indonesia-Timor Leste dalam Pengelolaan Konflik di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Tesis Universitas Pertahanan Indonesia, 2015).

²⁵ Sonya Gerfert, "Cross-Border Cooperation: Transforming Borders," 2009, diakses pada 4 Maret 2015 dari http://essay.utwente.nl/60149/1/BSc_S_Getfert.pdf.

²⁶ Luis De Sousa, "Understanding European Cross-Border Cooperation: A Framework for Analysis," *Journal of European Integration* (2012): 1–19.

²⁷ Pekka Järviö, *Cross-Border Cooperation-Benefiting From Borders*, (Helsinki: Ministry for Foreign Affairs Finland, 2011).

perbatasan harus dijaga dari berbagai ancaman dari luar.²⁸ Namun, perbatasan juga dapat dipandang dengan perspektif yang lain. Menurut Järviö, perbatasan dapat dilihat sebagai peluang bagi pembangunan kawasan. Perbatasan tidak lagi dianggap sebagai wilayah yang harus tertutup atau terlindungi, tetapi dibuka sehingga peluang ekonomi bagi masyarakat lokal pun terbuka.²⁹ Menurut Alami dkk., perspektif yang melihat perbatasan semacam ini biasanya menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).³⁰

Lee dan Forss mengatakan bahwa kerja sama lintas batas berperan menghilangkan hambatan fisik dan psikologis sehingga memperkuat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal menuju integrasi wilayah.³¹ Dari penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa potensi peran kerja sama perbatasan. Pertama, menghilangkan hambatan fisik dan psikologis antarwarga perbatasan. Maksudnya, memfasilitasi hubungan antarwarga perbatasan untuk saling bertemu dan bekerja sama. Dengan demikian, diharapkan hubungan sosial akan terbangun dan terpelihara. Kedua, memperkuat kesejahteraan sosial-ekonomi warga perbatasan. Kerja sama perbatasan ini memfasilitasi berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian warga perbatasan sehingga semakin memperkuat posisi warga perbatasan agar tidak mudah dimobilisasi dalam konflik.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan kerja sama perbatasan. Pertama, faktor politik. Menurut Thao, diperlukan kehendak politik yang kuat dari masing-masing pihak untuk bekerja sama. Sayangnya, isu konflik perbatasan ini kerap dipolitisasi dan dipelihara demi mencapai kepentingan politik, misalnya untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Kedua, Thao mengemukakan faktor tingkat kecanggihan kelembagaan dari kerja

²⁸ Athiqah Nur Alami, dkk, *Gender-Based*

²⁹ Pekka Järviö, *Cross-Border Cooperation*

³⁰ Athiqah Nur Alami, dkk, *Gender-Based*

³¹ Sangsoo Lee dan Alec Forss, *Dispute Resolution*

sama perbatasan tersebut.³² Dengan kata lain, semakin baik kelembagaannya, semakin berhasil pula kerja sama perbatasannya. Faktor ketiga adalah tingkat kestrategisan perbatasan tersebut. Jika perbatasan itu sangat penting karena terjadi interdependensi/integrasi antarnegara, kemungkinan kerja sama perbatasannya juga besar. Jika perbatasan itu tidak terlalu penting, perhatian pemerintah kedua negara juga kurang. Jika terjadi kerja sama, kedua negara tidak akan terlalu konfrontatif dalam mengompromikan kepentingannya sehingga peluang keberhasilan kerja samanya lebih besar.³³

Selain tiga faktor tersebut, ada pula faktor penghambat kerja sama pengelolaan perbatasan. Menurut Guo, penghambat tersebut adalah perbedaan sistem politik dan kelembagaan antarnegara yang bekerja sama, ketidaksetaraan tingkat ekonomi, ketidakpastian dan ketidakstabilan sosial, serta tidak adanya mekanisme timbal balik (*cross-border irreversibility*) yang menyebabkan ketidakmerataan insentif/disinsentif, terutama disebabkan oleh faktor alam.³⁴

Dari pemaparan kerangka konseptual tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan sosial adalah kemampuan masyarakat mengatasi segala permasalahan (*coping capacities*), belajar dari pengalaman masa lalu, menyesuaikan diri untuk menerima segala tantangan pada masa mendatang (*adaptive capacities*), serta menciptakan kelembagaan yang dapat mendorong kesejahteraan dan ketahanan masyarakat yang berkelanjutan untuk masa sekarang dan mendatang (*transformative capacities*). Kemampuan ini dapat diukur melalui kepemilikan modal alam, modal fisik, modal manusia, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/kelembagaan. Semakin kuat modal-modal tersebut,

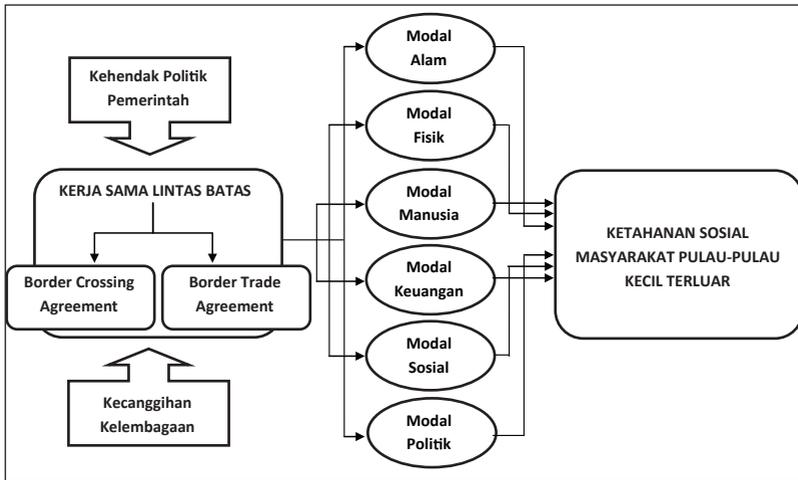
³² Nguyen Hong Thao, "Joint Development in the Gulf of Thailand," *IBRU Boundary and Security Bulletin* (Autumn 1999): 79–88.

³³ Harvey Starr dan G. Dale Thomas, "The Nature of Borders and International Conflict: Revisiting Hypotheses on Territory," *International Studies Quarterly* 49 (2005): 123–139.

³⁴ Rongxing Guo, *Cross-Border Resource Management: Theory and Practice* (Amsterdam: Elsevier, 2005).

semakin kuat pula ketahanan sosialnya. Demikian juga sebaliknya, semakin lemah modal-modal tersebut, semakin rentan pula masyarakatnya. Dalam konteks perbatasan, potensi kerentanan tersebut semakin besar karena besarnya tantangan/ancaman yang datang dari luar mengingat kedekatan geografis dengan negara tetangga.

Kerja sama lintas batas terkait erat dengan ketahanan sosial. Maksudnya, kerja sama lintas batas menghilangkan hambatan fisik dan psikologis antarwarga perbatasan sehingga membantu membangun dan memelihara hubungan sosial. Dengan kata lain, kerja sama perbatasan dapat meningkatkan/mempertahankan modal sosial masyarakat pulau-pulau kecil terluar. Kerja sama lintas batas juga memperkuat kesejahteraan/tingkat ekonomi warga perbatasan. Dengan meningkatnya perekonomian, modal keuangan masyarakat pulau-pulau kecil terluar juga dapat meningkat. Penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar 1.3 Hubungan Kerja Sama Lintas Batas dan Ketahanan Sosial di Pulau Kecil Terluar

C. KETAHANAN SOSIAL DALAM DISKURSUS KAJIAN PERBATASAN

Isu ketahanan sosial pada masyarakat pulau-pulau kecil terluar melalui optimalisasi kerja sama lintas batas belum banyak dieksplorasi di Indonesia. Kajian terdahulu lebih fokus pada kerja sama lintas batas, konflik di perbatasan, dan persoalan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu kajian tentang konflik dan kerja sama lintas batas adalah tesis Raharjo,³⁵ yang menganalisis konflik perbatasan antara warga Kabupaten Timor Tengah Utara (Indonesia) dan Distrik Oecussi (Timor Leste) serta menganalisis kerja sama perbatasan dalam pengelolaan konflik tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik terjadi karena faktor struktural berupa sengketa wilayah batas dan perebutan sumber daya lahan yang terbatas akibat rendahnya tingkat perekonomian masyarakat.

Dalam pengelolaan konflik di wilayah perbatasan tersebut, ternyata kerja sama antarmasyarakat di kedua wilayah dapat mengurangi aksi kekerasan, membangun dan memelihara hubungan sosial, serta meningkatkan perekonomian warga perbatasan. Dalam hal mengurangi aksi kekerasan, koordinasi dan patroli bersama aparat keamanan kedua wilayah yang bersengketa dapat mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi. Terkait hubungan sosial, acara-acara adat yang difasilitasi melalui kerja sama lintas batas tradisional antarmasyarakat di wilayah perbatasan juga dapat meredam ketegangan. Selain itu, kerja sama perbatasan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya pasar perbatasan yang saling menguntungkan bagi kedua wilayah, baik dalam hal penyediaan barang kebutuhan maupun keuntungan dari hasil penjualan.³⁶

Penelitian tentang kerja sama perbatasan juga dilakukan oleh Setiawan (2010) yang membahas kerja sama pengelolaan wilayah

³⁵ Raharjo, Sandy Nur Ikfal. "Kerja Sama Perbatasan Indonesia-Timor Leste dalam Pengelolaan Konflik di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur," (Tesis Universitas Pertahanan Indonesia, 2015).

³⁶ Raharjo, "Kerja Sama," 102-108.

perbatasan Selat Malaka Indonesia-Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pengelolaan wilayah Selat Malaka antara Indonesia-Malaysia merupakan salah satu upaya mengamankan potensi sumber daya di Selat Malaka serta mengamankan Selat Malaka dari berbagai isu dan permasalahan yang dapat merugikan Indonesia-Malaysia. Kerja sama juga bermanfaat untuk menjaga hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia sempat memanas akibat isu pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia, perebutan Pulau Sipadan-Ligitan, konflik Blok Ambalat, dan lainnya.³⁷

Kajian lain yang membahas pulau-pulau kecil terluar, seperti Pulau Miangas dan Sebatik, dilakukan oleh LIPI (2014). Topik yang dibahas mengenai pengelolaan sumber daya alam berbasis gender di kawasan perbatasan laut Indonesia, salah satunya Pulau Miangas (Kepulauan Talaud). Kajian ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih banyak difokuskan pada aspek keamanan dibandingkan aspek kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pulau Miangas memiliki potensi sumber daya alam berupa hasil laut terutama ikan yang besar. Namun, adanya persoalan pengelolaan hasil perikanan justru berdampak pada marginalisasi atau subordinasi kelompok perempuan akibat relasi gender yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.³⁸

Penelitian LIPI (2011) yang dilakukan di wilayah Sebatik lebih membahas pembangunan dan strategi pemberdayaan keluarga di Sebatik yang notebene merupakan wilayah perbatasan. Meski Sebatik memiliki sumber daya alam yang potensial, angka kemiskinan penduduk masih terbilang tinggi. Hal ini karena pemanfaatannya belum optimal. Tumpang tindih kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan menjadi salah satu kendala pemberdayaan masyarakat. Lemahnya koordinasi dan ego sektoral antarinstansi, kurangnya

³⁷ Arif Budi Setiawan, "Kerja Sama Pengelolaan Wilayah Perbatasan Selat Malaka Indonesia-Malaysia," (Tesis UI, 2010), 105.

³⁸ Athiqah Nur Alami dkk, *Pengelolaan*, 131–133.

tenaga ahli, dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pemberdayaan masyarakat juga menambah sulitnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.³⁹

Penelitian Siregar (2008) menyoroti potensi dan persoalan yang dihadapi pulau-pulau terpencil, seperti Pulau Sebatik. Permasalahan kurangnya koordinasi menyebabkan banyak terjadi *illegal logging* dan *illegal fishing* di wilayah Sebatik (Indonesia). Kemiskinan akibat keterisolasian daerah menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia dengan alasan untuk memperbaiki kehidupan—mengingat perekonomian di Malaysia lebih baik daripada di Indonesia. Selain itu, kesenjangan infrastruktur daerah di Sebatik (Indonesia) dan Malaysia yang mencolok membuat masyarakat Pulau Sebatik lebih memilih ke Tawau (Malaysia) daripada ke Pulau Nunukan (Indonesia). Hal itu karena jaraknya lebih dekat, biaya transportasinya lebih murah, dan barang-barangnya lebih berkualitas.⁴⁰

Penelitian Helman (2008) menguraikan interaksi masyarakat wilayah perbatasan di Pulau Sebatik dalam bentuk interaksi penduduk, perdagangan, dan pergerakan informasi. Pergerakan penduduk Pulau Sebatik ke Tawau, dan sebaliknya, terjadi karena menghadiri acara pernikahan atau acara lainnya yang sifatnya sosial. Penduduk Sebatik bisa keluar masuk Tawau menggunakan pas lintas batas yang murah dan mudah didapat. Pergerakan komoditas barang dagang di Sebatik juga banyak berasal dari Tawau. Hal ini dikarenakan akses ke Tawau lebih mudah daripada ke Nunukan.

Daya tarik Tawau lebih kuat dibanding daya tarik Nunukan atau Tarakan sehingga kehidupan masyarakat Sebatik relatif lebih banyak

³⁹ Setiawan, Bayu, Suko Bandiyono, Sudiyono, M. Soekarni, *Kompleksitas Pembangunan dan Strategi Pemberdayaan Keluarga di Perbatasan Sebatik* (Jakarta: New Elmatara, 2011).

⁴⁰ Siregar, Chairil N., "Analisis Potensi Daerah Pulau-Pulau Terpencil dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan, Keamanan Nasional, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan-Kalimantan Timur," *Jurnal Siosioteknologi* 13 No. 7 (2008): 345–368.

dipengaruhi pusat kegiatan di Tawau. Dalam hal pergerakan informasi, masyarakat Sebatik lebih banyak mendapat saluran televisi dari Malaysia sehingga lebih paham kondisi sosial, ekonomi, dan politik Malaysia daripada negara sendiri. Hal ini dikarenakan saluran televisi Indonesia sulit ditangkap di Pulau Sebatik. Jika ingin jelas, harus menggunakan parabola yang harganya mahal. Tentunya persoalan pergerakan informasi ini menjadi persoalan bagi masyarakat Sebatik.⁴¹

Hasil penelitian dan kajian tersebut lebih fokus pada persoalan konflik perbatasan, kerja sama perbatasan, dan pengelolaan sumber daya di wilayah perbatasan. Kajian mengenai ketahanan sosial di wilayah pulau-pulau kecil terluar belum ada sehingga menjadikan penelitian ini penting.

D. URAIAN BUKU

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari beberapa kontributor yang memiliki perhatian serius terhadap ketahanan sosial di pulau-pulau kecil terluar Indonesia, terutama Marore dan Sebatik. Buku ini terdiri atas tujuh bab.

Bab I merupakan catatan pendahuluan dari editor. Pada bab ini, pembaca diajak memahami konteks pulau-pulau kecil terluar yang masyarakatnya menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Akibatnya, kondisi ketahanan sosial mereka dipertanyakan. Di tengah kondisi tersebut, ada modal yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan sosial mereka, yaitu hubungan sosial yang terjalin dengan masyarakat negara tetangga. Hubungan sosial ini kemudian difasilitasi melalui kerja sama lintas batas *Border Crossing Agreement* dan *Border Trade Agreement*. Pada bab ini, penulis juga menjelaskan hubungan teoretis antara kerja sama lintas batas dengan ketahanan sosial. Bab ini juga menjelaskan posisi dan uniknya isu yang diangkat buku ini dalam khazanah studi

⁴¹ Helman, "Perkembangan dan Interaksi Spasial Wilayah Perbatasan: Studi Kasus di Pulau Sebatik," (Tesis UI, 2008), 101–105.

perbatasan yang sudah dilakukan sebelumnya. Bab ini ditutup dengan penjabaran sistematika bab-bab dalam buku ini.

Bab II yang ditulis Esty Ekawati membahas kondisi ketahanan sosial masyarakat Kepulauan Marore. Penulis bab ini menjelaskan secara rinci kondisi ketahanan tersebut melalui enam indikator, yaitu modal alam, modal fisik, modal sumber daya manusia, modal keuangan, modal sosial, dan modal politik. Selain itu, penulis juga menganalisis tantangan bagi kondisi ketahanan sosial masyarakat Kepulauan Marore, baik dari dalam maupun dari luar.

Muhammad Fakhry Ghafur menulis Bab III tentang kondisi ketahanan sosial masyarakat Pulau Sebatik. Penulis bab ini mengantarkan pembaca memahami gambaran umum Pulau Sebatik terlebih dahulu. Setelah itu, pembaca diajak menyelami analisis penulis mengenai kondisi ketahanan sosial masyarakat Pulau Sebatik dari sisi modal alam, fisik, sumber daya manusia, keuangan, sosial, dan politik. Hampir sama dengan penulis bab kedua, Ghafur juga melemparkan tantangan ketahanan sosial di Sebatik untuk dapat menjadi perhatian bersama, dan diharapkan dapat dicarikan solusinya.

Bab IV berbicara mengenai evaluasi pelaksanaan kerja sama lintas batas di Kepulauan Marore. Pada bagian awal, Bayu Setiawan selaku penulis menjabarkan hubungan penduduk Sangihe dengan penduduk Filipina Selatan. Hal ini penting untuk memahami mengapa kerja sama lintas batas dapat dan perlu dilakukan. Selanjutnya, penulis menganalisis kerja sama lintas batas Indonesia-Filipina yang bersifat formal (mempunyai dasar hukum dokumen perjanjian bilateral) dan yang bersifat nonformal berupa praktik-praktik yang dilakukan masyarakat/pemerintah lokal. Pada bagian penutup, Bayu Setiawan menyampaikan pesan perlunya pengkajian ulang dokumen perjanjian lintas batas Indonesia-Filipina yang sudah lama agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Bab V merupakan gabungan karya dari beberapa penulis, yaitu Esty Ekawati dan Ahmad Wildan Masyhari. Mereka membahas

evaluasi pelaksanaan kerja sama lintas batas di Sebatik. Bab ini menyoroti penutupan pos lintas batas di Sebatik untuk penumpang (orang) yang kemudian menyusahkan warga. Hal ini memicu semakin maraknya praktik lintas batas ilegal, terutama penyelundupan barang-barang subsidi Malaysia-Indonesia.

Bab VI kembali ditulis oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo, berisi analisis dampak kerja sama lintas batas terhadap ketahanan sosial masyarakat Kepulauan Marore dan Sebatik. Menurut penulis, kerja sama lintas batas memberi dampak positif pada sebagian modal ketahanan sosial. Dampak tersebut sebenarnya dapat diperbesar jika praktik kerja sama lintas batas lebih dioptimalkan. Untuk melakukan optimalisasi tersebut, penulis mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kerja sama lintas batas selama ini. Sebagai penutup, penulis mengangkat isu perlunya kajian serius tentang wacana kenaikan kuota perdagangan lintas batas (*threshold value*) Indonesia-Filipina dan Indonesia-Malaysia sebagai salah satu cara mengoptimalkan dampak kerja sama lintas batas bagi peningkatan ketahanan sosial masyarakat pulau-pulau kecil terluar.

Bab VII merupakan catatan penutup dari editor yang kembali merangkum tiga masalah besar yang perlu dan sudah dikaji dalam bab-bab sebelumnya. Ketiga hal tersebut adalah identifikasi kondisi ketahanan sosial di Marore dan Sebatik, evaluasi pelaksanaan kerja sama lintas batas di dua kawasan perbatasan tersebut, dan dampak kerja sama lintas batas bagi ketahanan sosial masyarakat perbatasan.

Ketujuh bab di atas memiliki satu benang merah, yaitu kesepakatan pada perlunya revisi/pengkajian ulang terhadap dokumen kerja sama lintas batas Indonesia-Filipina dan Indonesia-Malaysia, baik itu *Border Crossing Agreement* maupun *Border Trade Agreement*. Beberapa masukan revisi sudah dikemukakan oleh para penulis pada bab mereka masing-masing, walaupun menasar pada aspek yang berbedabeda. Harapannya tentu saja buku ini dibaca dan dipertimbangkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

oleh para pemangku kepentingan demi menciptakan masyarakat pulau-pulau kecil terluar yang memiliki ketahanan sosial yang kuat.

DAFTAR ACUAN

- Adger, Neil W. "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24, No.3 (2000): 347–364.
- Alami, Athiqah Nur, dkk. *Gender-Based Natural Resource Management in Indonesian Marine Borders*, Yogyakarta: Pital, 2015.
- Alami, Athiqah Nur, dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Gender di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia*. Yogyakarta: Pital, 2014.
- Carlson, L., dkk. *Resilience: Theory and Applications*. Argonne: Argonne National Laboratory, 2012.
- Community & Regional Resilience Institute. *Definitions of Community Resilience: An Analysis (a CARRI Report)*. CARRI dan Meridian Institute, 2013.
- Food and Agriculture Organization. "Measuring Resilience: A Concept Note on the Resilience Tool." Diakses pada 26 Maret 2016 dari <http://www.fao.org/docrep/013/al920e/al920e00.pdf>.
- Food and Agriculture Organization. "Socio-Economic & Livelihood Analysis in Investment Planning." Dalam *FAO Policy Learning Programme: Module 3 Investment and Resource Management*, Januari 2008.
- Gerfert, Sonya. "Cross-border Cooperation: Transforming Borders." 2009. Diakses pada 4 Maret 2015 dari http://essay.utwente.nl/60149/1/BSc_S_Getfert.pdf.
- Guo, Rongxing. *Cross-border Resource Management: Theory and Practice*. Amsterdam: Elsevier, 2005.
- Helman. "Perkembangan dan Interaksi Spasial Wilayah Perbatasan: Studi Kasus di Pulau Sebatik." Tesis UI, 2008.
- Järviö, Pekka. *Cross-border Cooperation-benefiting from Borders*. Helsinki: Ministry for Foreign Affairs Finland, 2011.
- Keck, Markus, dan Patrick Saktapolrak. "What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward." *Erdkunde* 67, No. 1 (2013): 5–19.
- Lee, Sangsoo, dan Alec Forss. *Dispute Resolution and Cross-border Cooperation in Northeast Asia: Reflections on the Nordic Experience (Asia Paper)*. Stockholm: Institute for Security and Development Policy, Juni 2011.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

- Lisnyak, Sergey, dan Ilkom Sharipov. "Exploring the Formal and Informal Institutions as a Key Tool for Enhancing Economic Resilience." *CES Working Papers* 7, No. 4 (2015): 891–900.
- Majale, Mike. "Towards Pro-Poor Regulatory Guidelines for Urban Upgrading." Dalam *International Workshop on Regulatory Guidelines for Urban Upgrading*. Bourton-On-Dunsmore, 17–18 Mei 2001.
- McLeod, R. "The Impact of Regulations and Procedures on the Livelihoods and Asset Base of the Urban Poor: A Financial Perspective." Dalam *International Workshop on Regulatory Guidelines for Urban Upgrading*. Bourton-on-Dunsmore, 17–18 Mei 2001.
- Pansus Perbatasan Negara dan Tim Kerja Perbatasan Negara Komite I. *Perbatasan Negara: Problema dan Solusi*. Jakarta: DPD RI, 2011.
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. "Kerja Sama Perbatasan Indonesia-Timor Leste dalam Pengelolaan Konflik di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Tesis Universitas Pertahanan Indonesia*, 2015.
- Rahman, Agus R., dkk. *Dinamika Perbatasan di Asia Tenggara: Kerja Sama Thailand-Malaysia dalam Mengatasi Lintas Batas Ilegal*. Jakarta: Mahara Publishing, 2016.
- Rusman, M. "Produk Indonesia banyak Beredar di Filipina." *Antara Kaltim*, 27 Juni 2012, diakses pada 26 Maret 2016 dari <http://kaltim.antaranews.com/berita/7777/produk-indonesia-banyak-beredar-di-filipina>.
- Sapirstein, Guy. n.d. *Social Resilience: The Forgotten Element in Disaster Reduction*, Boston: Organizational Resilience International. Diakses pada 21 Maret 2016 dari http://www.oriconsulting.com/social_resilience.pdf.
- Setiawan, Arif Budi. "Kerja Sama Pengelolaan Wilayah Perbatasan Selat Malaka Indonesia-Malaysia." *Tesis UI*, 2010.
- Setiawan, Bayu, Suko Bandiyono, Sudiyono, dan M. Soekarni. *Kompleksitas Pembangunan dan Strategi Pemberdayaan Keluarga di Perbatasan Sebatik*. Jakarta: New Elmaterra, 2011.
- Siregar, Chairil N. "Analisis Potensi Daerah Pulau-Pulau Terpencil dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan, Keamanan Nasional, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan-Kalimantan Timur." *Jurnal Sositoteknologi* 13, No. 7(2008): 345–368.
- Sousa, Luis De. "Understanding European Cross-Border Cooperation: A Framework for Analysis." *Journal of European Integration* (2012): 1–19.

- Starr, Harvey, dan G. Dale Thomas. "The Nature of Borders and International Conflict: Revisiting Hypotheses on Territory." *International Studies Quarterly* 49 (2005): 123–139.
- Thao, Nguyen Hong. "Joint Development in the Gulf of Thailand." *IBRU Boundary and Security Bulletin* (1999): 79–88.
- Ulaen, Alex J. *Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan*. Jakarta: Sinar Harapan, 2003.
- Velasco, Djorina. "Navigating the Indonesian-Philippines Border: The Challenges of Life in the Borderzone." *Kasarinlan: Philippines Journal of Third World Studies* 25 (2010): 95–118.

BAB II

Ketahanan Sosial Masyarakat Kepulauan Marore

Esty Ekawati

A. GAMBARAN UMUM KEPULAUAN MARORE

Kawasan perbatasan di Indonesia memiliki nilai strategis dalam hal penegakan kedaulatan wilayah negara. Berbicara mengenai perbatasan, yang muncul di benak masyarakat awam adalah ancaman, konflik, pelanggaran hukum, dan sengketa kawasan perbatasan. Cara pandang seperti ini menitikberatkan persoalan perbatasan hanya dilihat dari sisi keamanan (*security*). Persoalan di kawasan perbatasan tidak dapat hanya dilihat dari aspek keamanan yang kerap dikaitkan dengan kedaulatan negara, tetapi juga harus dilihat dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kesenjangan yang terjadi antara kawasan perbatasan dan wilayah lain di Indonesia selama ini menjadikan kawasan perbatasan menghadapi kendala pembangunan kesejahteraan masyarakatnya. Keterbatasan infrastruktur dan akses ke perkotaan merupakan tantangan tersendiri yang berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat perbatasan.

Bab ini membahas ketahanan sosial masyarakat perbatasan di Kecamatan Kepulauan Marore. Bagian pertama adalah pengantar. Bagian kedua menguraikan mengenai kondisi geografis dan kepen-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dudukan Kepulauan Marore. Selanjutnya dibahas mengenai ketahanan sosial masyarakat Kepulauan Marore. Adapun ketahanan sosial masyarakat perbatasan dapat dilihat dari modal/aset yang dimiliki. Sebagai penutup, penulis juga menguraikan mengenai tantangan masyarakat perbatasan di Kecamatan Kepulauan Marore.

Kecamatan Kepulauan Marore merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kecamatan Kepulauan Marore terletak antara 04° 44'14" LU–125° 28'42" BT. Adapun wilayah pemerintahan Kecamatan Kepulauan Marore terdiri atas tiga desa/kampung, yaitu Desa Marore, Desa Kawio, dan Desa Matutuang (selanjutnya disebut Pulau Marore, Pulau Kawio, dan Pulau Matutuang).¹ Pulau Marore luasnya 2,6 km², Pulau Kawio luasnya 1,54 km², dan Pulau Matutuang luasnya 0,31 km². Kecamatan Kepulauan Marore berada pada ketinggian 0–8 meter dengan rata-rata kedalaman air tanah 3–7 meter. Secara topografi, tingkat kemiringan tanah kepulauan Marore tergolong sedang, yakni 45° atau luas 1.760 km².² Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai Pulau Marore dari daratan Kabupaten Kepulauan Sangihe sekitar 15 jam menggunakan kapal perintis. Waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai satu pulau ke pulau lainnya di kecamatan itu beragam, misalnya dari Pulau Marore ke Kawio membutuhkan waktu sekitar 20–30 menit menggunakan *pumpboat*.

Walaupun Kecamatan Kepulauan Marore terdiri dari berbagai pulau, secara administrasi hanya terdiri dari tiga desa/kampung. Ketiga desa/kampung tersebut tersebar di 10 pulau yang dibagi dua berdasarkan penghuni/penduduk, yaitu a) Pulau berpenghuni yang terdiri atas Pulau Marore, Kawio, Kamboleng, dan Matutuang; b)

¹ Ketiga desa tersebut terpisah-pisah letaknya karena merupakan pulau-pulau kecil yang dikenal dengan Pulau Marore, Pulau Kawio, dan Pulau Matutuang.

² Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Marore dalam Angka 2015* (Tahun: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015), 3. Lihat juga Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Sangihe dalam Angka 2015* (Tahun: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015), 14.

Pulau tidak berpenghuni yang terdiri atas Pulau Mamanuk, Ehise, Dumarehe, Banuwahu, Batupebaekang, dan Dokole.³



Gambar 2.1 Pulau-Pulau di Kecamatan Kepulauan Marore⁴

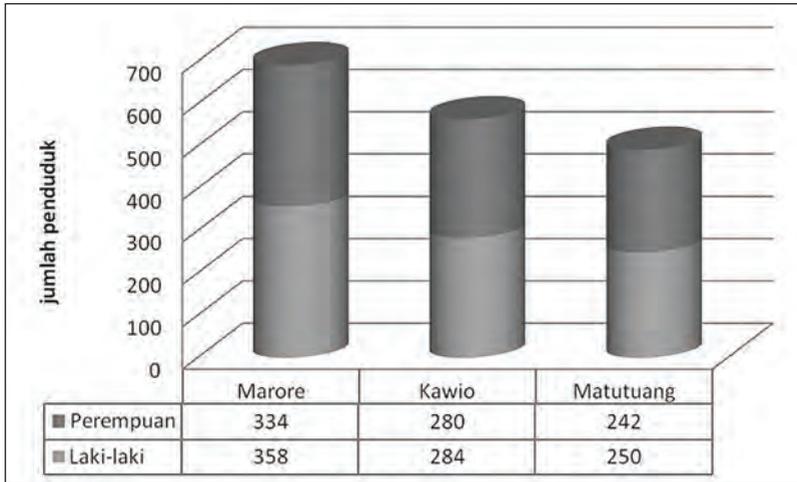
Pulau Marore merupakan salah satu pulau kecil terluar di wilayah perairan Indonesia. Pulau ini terletak di ujung utara Indonesia yang berhadapan langsung dengan Pulau Balut dan Pulau Sarangani (Republik Filipina). Sebelah utara pulau ini berbatasan dengan Laut Sarangani, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kendahe, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Talaud, dan sebelah barat berbatasan dengan laut Sulawesi.⁵ Adapun jumlah penduduk Pulau Marore adalah 692 jiwa, Pulau Kawio 564 jiwa, dan

³ Puskesmas Marore, *Profil Puskesmas Kecamatan Kepulauan Marore 2015* (Marore: Puskesmas Marore, 2016), 9.

⁴ Pemerintah Kecamatan Kepulauan Marore, 2016

⁵ Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Marore*, 3.

Pulau Matutuang 492 jiwa, dengan komposisi laki-laki dan perempuan seperti tersaji dalam gambar 2.2 berikut.⁶



Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kepulauan Marore 2014⁷

B. ANALISIS KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT KEPULAUAN MARORE

Konsep ketahanan mengacu pada keteguhan masyarakat beradaptasi dengan lingkungan alamiah dan melakukan transformasi akibat perubahan global yang terjadi.⁸ Dari konsep tersebut, keteguhan, kemampuan beradaptasi, dan melakukan transformasi merupakan kunci ketahanan suatu masyarakat. Adapun konsep ketahanan sosial mengacu pada kemampuan individu, organisasi, dan komunitas, dalam menerima, menyesuaikan, dan menanggulangi ancaman lingkungan dan sosial yang beragam. Ancaman tersebut bisa dari

⁶ Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Marore*, 14.

⁷ Gambar diolah kembali dari Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Marore*, 19.

⁸ Markus Keck dan Patrick Sakdapolrak, "What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward," *Erdkunde* 67, No. 1 (2013): 6, doi:10.3112/erdkunde.2013.01.02.

eksternal yang mengacu pada unit sosial, dinamika internal, atau interaksi antara keduanya.⁹ Ancaman/gangguan eksternal terhadap infrastruktur sosial masyarakat perbatasan diungkapkan oleh Adger,¹⁰ berupa perubahan kebijakan pemerintah, perselisihan sipil, bencana, tekanan terhadap struktur sosial, kebutuhan hidup, dan sumber daya.¹¹ Kerentanan sosial dan kebutuhan hidup menjadi poin penting dalam jenis-jenis aset/modal yang memengaruhi ketahanan sosial. Aset tersebut terdiri dari modal ekonomi, modal fisik, modal alam, dan modal sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan modal sosial juga menjadi penentu dalam membangun dan menjaga ketahanan sosial masyarakat.¹²

Berdasarkan konsep *Sustainable Livelihood Approach*, ketahanan sosial masyarakat perbatasan dapat diukur menggunakan indikator jenis aset/modal yang dimilikinya. Tim menggunakan enam modal yang bersumber dari kondisi internal masyarakat perbatasan itu sendiri. Untuk mengukur ketahanan sosial masyarakat Kepulauan Marore, tim menggunakan modal alam (tanah, air, dan biodiversitas), fisik (infrastruktur dan perlengkapan), sumber daya manusia (pekerjaan, kesehatan, pendidikan), keuangan (pendapatan dan belanja), sosial (interaksi, jaringan, hubungan saling percaya, dan pertukaran),¹³ dan modal politik. Semua modal itu diuraikan sebagai berikut.

⁹ Keck dan Sakdapolrak, "What is Social Resilience?", 8.

¹⁰ W. N. Adger, "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24, No. 3 (2000): 361, doi:10.1191/030913200701540465. Lihat juga Keck dan Sakdapolrak, "What Is Social Resilience?", 9.

¹¹ W. N. Adger, dkk., "Migration, Remittances, Livelihood Trajectories, and Social Resilience," *Ambio* 19, No. 3 (2009): 358.

¹² Keck dan Sakdapolrak, "What is Social Resilience?", 11.

¹³ Lihat: Stuart W Bunting, *Principles of Sustainable Aquaculture Promoting Social, Economic and Environmental Resilience* (London dan New York: Routledge, 2013), 20.

1. Modal Alam

Merujuk pada konsep *Sustainable Livelihood Approach*, modal alam merupakan salah satu aspek untuk mengukur ketahanan sosial yang dapat dilihat dari sumber daya alam, ketersediaan air, dan biodiversitas. Kecamatan Kepulauan Marore termasuk salah satu kepulauan terluar di Indonesia. Meskipun secara geografis berada di wilayah terluar Indonesia, pulau ini memiliki potensi alam yang besar, terutama perikanan. Kepulauan Marore memiliki iklim basah dengan dua pola angin, yaitu angin utara dan angin barat. Keadaan cuaca di wilayah Marore tidak menentu dan sering berubah-ubah. Saat musim angin utara pada November–Februari, kecepatan angin bisa mencapai 40 mil/jam. Hal ini membuat laut bergelombang sehingga kapal berkapasitas 1.000 gross ton (GT) pun tidak mampu melewati perairan tersebut. Angin barat terjadi pada Desember dengan ketinggian ombak mencapai 4 meter.¹⁴ Pada April sampai Juni, wilayah Kepulauan Marore cenderung tidak berangin atau biasa disebut laut teduh. Pada Juli–Agustus adalah masanya angin selatan yang ditandai dengan angin kencang.¹⁵ Dengan demikian, kondisi laut teduh biasanya hanya dialami masyarakat Marore selama tiga bulan, sisanya kondisi laut lebih berangin.

Kondisi cuaca di wilayah Kepulauan Marore berpengaruh terhadap pola aktivitas melaut nelayan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kepulauan Marore adalah nelayan dan petani. Ketika musim laut teduh, nelayan melaut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Budaya melaut nelayan Marore adalah *one-day fishing*¹⁶ atau mencari ikan di laut seharian untuk memenuhi kebutuhan harian.

¹⁴ Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, “Marore,” diakses pada 22 Juli 2016 dari http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/305.

¹⁵ Puskesmas Marore, *Profil Puskesmas*, 8.

¹⁶ Narasumber menyebutnya “mengail sehari untuk sehari.” Keterangan JFS, pedagang, Marore, 30 Mei 2016.

Selain mencari ikan karang, nelayan di Marore juga mencari ikan hiu yang dalam bahasa masyarakat Marore disebut *ikan gurango*. Sirip ikan hiu (*gurango*) menjadi komoditas yang bernilai tinggi di pasaran Manado, Tahuna, dan sekitarnya sehingga beberapa nelayan berani menantang maut untuk menangkap ikan *gurango*.

Potensi perikanan yang besar menjadi modal alam yang bernilai bagi masyarakat Kepulauan Marore. Sebagai wilayah kepulauan, potensi produksi perikanan laut di kecamatan Kepulauan Marore cukup tinggi, namun belum optimal karena masih mengandalkan sistem perikanan tangkap dan belum beranjak ke budi daya hasil perikanan. Produksi perikanan tangkap di Kecamatan Kepulauan Marore pada 2012 mencapai 126,6 ton.¹⁷ Adapun potensi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716¹⁸ mencapai 255.430 ton pada 2012.¹⁹ Jika melihat perbandingan antara produksi perikanan di Kepulauan Marore terhadap WPP 716 maka pengelolaan potensi perikanan di wilayah tersebut masih belum optimal.

Pada 2014, produksi perikanan laut mengalami peningkatan sebanyak 234,6 ton yang terdiri dari ikan laying (3,2 ton), ikan tongkol 92 ton), ikan cucut (98 ton), ikan bobara (4,7 ton), ikan onthoni (6,5 ton), dan ikan kembung (12 ton). Dari jenis-jenis ikan tersebut, hanya ikan bobara yang memiliki nilai jual mencapai Rp35.000/kg, sementara jenis lainnya nilai jualnya hanya Rp20.000/kg.²⁰

Lahan di Marore berupa perbukitan *sisal/ mesa* yang memiliki komposisi lahan hutan basah, hutan lahan kering, semak belukar, dan lahan terbuka. Sebagian besar daerah perbukitan dipergunakan se-

¹⁷ Puskesmas Marore, *Profil Puskesmas*, 81.

¹⁸ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716 meliputi: Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. Kepulauan Marore merupakan bagian dari Laut Sulawesi. Lihat: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Statistik Perikanan Tangkap di Laut menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 2005–2013* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2014), xvi.

¹⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Statistik Perikanan Tangkap*, 75.

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Marore*, 80.

bagai lahan perkebunan dan selebihnya ditumbuhi tanaman liar.²¹ Kontur tanah yang berbukit dan bercampur batu/kerikil memungkinkan jenis tanaman tertentu bisa tumbuh, seperti kelapa, umbi-umbian, pohon mangga, nanas, dan pepaya. Hasil alam berupa kelapa diolah masyarakat Marore menjadi kopra dan dijual ke Tahuna atau Filipina. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sangihe tahun 2014, produktivitas tanaman ubi kayu di Kecamatan Kepulauan Marore adalah 4,29 ton/hektare. Petani mampu menghasilkan produksi ubi kayu sebanyak 56 ton dari 1,4 ha lahan yang ditanami. Petani Marore juga menghasilkan produksi 9 ton ubi jalar dan 6 ton talas.²² Begitu juga produksi mangga yang mencapai 20,12 ton di lahan 132 ha dan produksi buah pepaya sebesar 900 ton di lahan seluas 112 ha.²³

Di Kampung Kawio terdapat lahan sawah tadah hujan yang bisa ditanami padi dan empang ikan air tawar, tetapi masih belum optimal pengelolaannya. Hal ini karena sawah tersebut terletak di pinggir pantai. Jika hujan turun dan pantai pasang, sawah tersebut terendam. Empang air tawar dimanfaatkan warga membudidayakan ikan mujair untuk dikonsumsi warga.²⁴

Mengenai ketersediaan air bersih, masyarakat Marore memanfaatkan air tanah dan air hujan yang ditampung dalam bak penampungan. Meski sudah ada program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait penyulingan air laut menjadi air yang bisa dikonsumsi, program tersebut belum berjalan. Masyarakat masih meragukan hasil penyulingan air laut sehingga alat-alat penyulingan masih belum dioperasikan, bahkan di Kampung Kawio, fasilitas penyulingannya sudah rusak sebelum digunakan. Sejak adanya bantuan sumur bor untuk setiap rumah dari Pemerintah Kabupaten

²¹ Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, "Marore."

²² Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Sangihe*, 186-188.

²³ Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Marore*, 65-67.

²⁴ BM, Kapitalaung Kawio, Wawancara di Kepulauan Marore, 29 Mei 2016.

Sangihe, kebutuhan air bersih masyarakat Marore terpenuhi.²⁵ Akses masyarakat terhadap air bersih pun menjadi lebih mudah.

2. Modal Fisik

Berbicara mengenai modal fisik kawasan perbatasan, stereotip wilayah terbelakang yang minim infrastruktur dan akses tampaknya tidak selalu tepat. Sebagai salah satu pintu gerbang terluar Indonesia, Pulau Marore memiliki infrastruktur yang terbilang cukup baik. Adanya dermaga sandar bagi kapal Pelni memberikan kemudahan akses bagi masyarakat di Kepulauan Marore yang ingin mengunjungi keluarga di pulau-pulau lainnya. Selain itu, ada dermaga kapal feri di sisi timur Pulau Marore. Namun, sejak pelabuhan feri itu dibangun pada 2012 hingga kini belum pernah digunakan, bahkan ada bagian dermaga yang sudah rusak. Terlepas dari keberadaan infrastruktur yang terbilang cukup memadai, masih ada persoalan yang sebaiknya dapat ditangani pemerintah, yakni frekuensi kedatangan kapal perintis. Keterbatasan dan ketidaktentuan frekuensi kedatangan kapal perintis berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat Marore, khususnya menjual hasil alam dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari.

Jarak tempuh dari Pulau Marore ke Ibu Kota Kabupaten, Tahuna, di Kepulauan Sangihe sekitar 77 mil laut dan dapat ditempuh selama 8–15 jam menggunakan kapal perintis (Sabuk Nusantara 38 dan 51, Kapal Berkat Taloda, dan Meliku Nusa) yang dikelola PT Pelni. Masalahnya, armada tersebut tidak beroperasi setiap hari. Rata-rata hanya ada satu sampai dua kapal saja yang beroperasi setiap minggunya. Namun, sejak awal 2017 ada kapal feri yang berlabuh di Marore setiap hari Jumat. Harga tiket kapal perintis cukup terjangkau, yakni Rp25.000/perjalanan. Demikian pula tiket kapal feri seharga Rp62.500/

²⁵ Jerusalem Mendalora, “Kebutuhan Air Minum di Marore Terpenuhi,” *Antara Sulut*, 2 Juni 2016, diakses pada 28 September 2016 dari <http://manado.antaranews.com/berita/30199/kebutuhan-air-minum-di-marore-terpenuhi>.

perjalanan. Harga tersebut membuat masyarakat Marore bisa menjual ikan dan hasil alam lainnya ke pasar Tahuna. Namun, frekuensi kedatangan kapal perintis yang belum teratur membuat masyarakat kesulitan jika harus mengandalkan penjualan hasil alam menggunakan armada tersebut. Selain kapal perintis, masyarakat Marore memanfaatkan *pumpboat* sebagai sarana transportasi menuju kabupaten, pulau sekitar Marore, Tahuna, bahkan sampai ke Filipina. Namun, biaya operasional *pumpboat* cukup besar.

Terkait sarana pemenuhan kebutuhan hidup, masyarakat Marore mengandalkan perahu untuk mencari ikan. Nelayan Marore memiliki dua jenis perahu untuk mengail (mencari ikan). Pertama, *pelang* atau perahu dayung sepanjang 3–5 meter yang terbuat dari kayu. Penggunaan *pelang* terbatas di sekitar Pulau Marore. Jenis ikan yang didapat pun terbatas pada jenis ikan karang. Jenis perahu yang kedua adalah *pumpboat*, perahu kayu yang menggunakan mesin pompa dan menggunakan bahan bakar bensin.²⁶ Panjang *pumpboat* beragam, berkisar dari 5 sampai 7 meter dan bisa menggunakan satu atau dua mesin. Penggunaan *pumpboat* lebih efektif karena daya jangkaunya bisa lebih jauh.

Selain armada yang disediakan PT Pelni, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe juga memiliki armada kapal Tampungan Lawo. Armada ini dapat digunakan sebagai kapal penumpang dan kapal barang pengangkut kebutuhan pokok masyarakat Kepulauan Marore. Namun, armada tersebut belum setiap saat beroperasi. Tampungan Lawo hanya dioperasikan apabila kapal perintis tidak beroperasi. Kapal ini hanya melayani jalur Tahuna-Marore dan sebaliknya.²⁷

Infrastruktur jalan di tiga pulau (Marore, Kawio, dan Matutuang) sudah cukup baik menghubungkan antardusun di pulau tersebut.

²⁶ Mita Noveria, ed., *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Laut: Tinjauan dari Perspektif Sosial* (Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2014).

²⁷ JA, BPPD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wawancara di Tahuna, 25 Mei 2016.

Jalan utama dibangun dengan bahan baku beton mengelilingi pulau sehingga masyarakat dapat menikmati pemandangan laut yang indah ketika melewati jalanan yang teduh. Jika dilihat dari ketersediaan infrastruktur listrik, Pulau Marore terbilang lebih beruntung dibanding dengan pulau lainnya. Sejak 2013, listrik di Pulau Marore beroperasi 24 jam. Pasokan listrik di Pulau Marore berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang dikelola PLN. Kemudahan akses listrik 24 jam dimanfaatkan masyarakat nelayan dan pengepul ikan untuk mengawetkan ikan dengan es. Keberadaan *freezer* dan es sangat bermanfaat bagi masyarakat saat musim panen ikan.

Berbeda dengan masyarakat Pulau Marore, masyarakat Pulau Kawio dan Pulau Matutuang belum menikmati akses listrik 24 jam. Jika listrik di Pulau Marore dikelola PLN, listrik di Pulau Kawio dan Matutuang dikelola pemerintah daerah setempat. Berdasarkan keterangan Kepala PLN Pulau Marore, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum bersedia menghibahkan mesin pembangkit listrik (PLTD) di Pulau Kawio untuk PLN. Pemda sendiri nyatanya belum mampu mengelola pembangkit listrik tersebut, bahkan di Pulau Kawio, mesin PLTD-nya sudah rusak setelah sempat digunakan selama satu bulan saja.²⁸ Akibatnya, masyarakat Kawio tidak mendapat akses listrik seperti di Pulau Marore. Mereka hanya mengandalkan tenaga surya. Ketika malam hari, Pulau Kawio dan Pulau Matutuang gelap gulita.

Jumlah rumah tangga pelanggan PLN di Kecamatan Kepulauan Marore mencapai 183 rumah tangga dari 448 rumah tangga (meliputi Pulau Marore, Pulau Kawio, dan Pulau Matutuang). Berdasarkan data tersebut, rumah tangga yang dapat mengakses listrik di Kepulauan Marore belum merata dan baru mencapai 40,8%.²⁹

²⁸ MM, Kepala PLN, Wawancara di Kepulauan Marore, 27 Mei 2016; dan BM, Kapitalaung Kawio, Wawancara di Kepulauan Marore, 29 Mei 2016.

²⁹ Diolah dari data Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Marore*, 21.

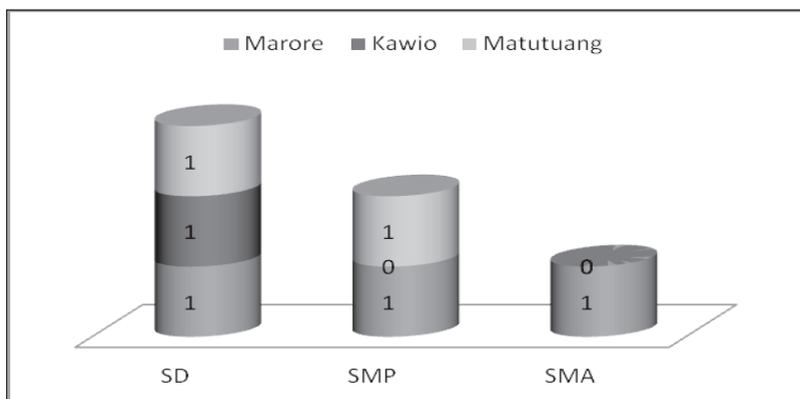
Infrastruktur yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, seperti keberadaan puskesmas dan sekolah, tersedia di Kepulauan Marore. Pelayanan kesehatan yang selama ini berjalan di wilayah kerja Puskesmas Marore, terdiri dari satu puskesmas kecamatan yang terletak di Pulau Marore dan dua puskesmas pembantu (Pustu) yang terletak di dua pulau yang berbeda, yaitu Pustu Pulau Kawio dan Pustu Pulau Matutuang. Puskesmas kecamatan di Pulau Marore menyediakan pelayanan kesehatan dengan fasilitas yang cukup memadai. Ada poli umum, poli KB, klinik gigi, klinik sanitasi, imunisasi, promkes, layanan rawat inap 24 jam, dan laboratorium—meski fasilitasnya belum lengkap. Pelayanan yang belum tersedia adalah poli gigi meskipun alat kesehatannya sudah ada.

Di wilayah kerja Puskesmas Marore terdapat tiga pos pelayanan terpadu (Posyandu) bayi/balita dan tiga Posyandu Lansia yang kegiatan pelayanannya diadakan satu kali setiap bulan. Demi memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi warga perbatasan, terdapat instalasi rawat inap yang letaknya berseberangan dengan puskesmas. Ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Marore kurang memadai. Saat penelitian berlangsung, sudah lima bulan tidak ada dokter di puskesmas. Pelayanan kesehatan hanya ditangani oleh tenaga kesehatan lainnya. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Marore pada 2014 hanya ada 11 orang berstatus pegawai negeri sipil, sembilan pegawai tidak tetap, dan tujuh personel Gerakan Nusantara Sehat (program Kementerian Kesehatan RI).³⁰

Terkait fasilitas persalinan di Kepulauan Marore, terdapat kerja sama antara bidan dan *mama biang* (dukun beranak) yang sudah mendapat pelatihan program persalinan yang profesional dan aman. Kerja sama ini dilakukan atas kesepakatan Kapitalaung (kepala kampung) karena minimnya jumlah bidan/tenaga kesehatan yang menangani persalinan.

³⁰ Puskesmas Marore, *Profil Puskesmas*, 17.

Akses terhadap pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan wilayah. Keberadaan sarana pendidikan di Kecamatan Kepulauan Marore jenjang TK, SD, SMP, dan SMA dapat dilihat dalam grafik berikut.



Gambar 2.3 Distribusi Sarana Pendidikan di Kecamatan Kepulauan Marore³¹

Berdasarkan Gambar 2.3, dapat dilihat bahwa di Pulau Marore terdapat SD, SMP, dan SMA; di Pulau Kawio hanya terdapat SD saja; di Pulau Matutuang terdapat SD dan SMP. Anak-anak di Pulau Kawio dan Matutuang yang ingin melanjutkan sekolah ke SMA harus hijrah ke Pulau Marore atau ke Tahuna. Meski fasilitas pendidikan masih terbatas di tingkat SMA, semangat untuk menempuh pendidikan tinggi dimiliki oleh beberapa anak di Pulau Marore. Bahkan ada warga yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi atau sedang menempuh studi di perguruan tinggi di Sangihe dan Manado.

Rasio guru dan siswa pada satuan pendidikan di Kecamatan Kepulauan Marore terbilang memadai. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Guru menyebutkan bahwa

³¹ Dibuat oleh penulis berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Marore (2015).

rasio guru dan siswa untuk SD, SMP, dan SMA adalah 1:20.³² Sampai tahun 2014, perbandingan guru dan siswa SD di Pulau Marore 1:8, Pulau Kawio 1:12, dan Pulau Matutuang 1:9 (nilai rasio guru dan siswa di Kecamatan Kepulauan Marore adalah 11,33). Perbandingan guru dan siswa SMP di Pulau Marore 1:7 dan di Pulau Matutuang 1:14 (rasio guru dan siswa di Kecamatan Kepulauan Marore adalah 8,38). Perbandingan guru dan siswa di SMA—yang hanya ada di Pulau Marore—adalah 1:3,5 (rasio guru dan siswa di Kecamatan Kepulauan Marore adalah 4,11).³³ Selain guru yang berstatus PNS, di Marore juga terdapat guru honorer SD sebanyak lima orang, guru honorer SMP sebanyak dua orang, dan guru honorer SMA dua orang.³⁴ Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan guru di Kecamatan Kepulauan Marore sudah memadai.

Terkait sarana komunikasi di Kepulauan Marore, masyarakat dapat menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi—meski hanya bisa menggunakan *provider* tertentu. Masyarakat Kampung Marore juga dapat memanfaatkan internet dari jaringan *wi-fi* pos Angkatan Laut. Dengan adanya akses telekomunikasi, masyarakat di Kecamatan Kepulauan Marore tetap dapat menjalin komunikasi dengan kerabat di wilayah lain.

3. Modal Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pembangunan masyarakat menuju kesejahteraan sosial. Aspek ini meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Keberadaan sarana pendidikan di Kecamatan Kepulauan Marore telah membuka kesempatan bagi anak-anak di Pulau Marore dan sekitarnya untuk

³² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pada Pasal 17. Meski sudah dibuat sejak 2008, aturan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2016.

³³ Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Marore*, 33–39. Lihat juga Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Sangihe*, 106–114.

³⁴ Guru Honorer SMA, Wawancara di Marore, 27 Mei 2016.

mengakses pendidikan. Kemudahan mengakses pendidikan berpengaruh terhadap tingkat melek huruf masyarakat Marore. Pada 2015, persentase angka melek huruf di Kampung Marore sebesar 98,27%, Kampung Kawio sebesar 94,42%, dan Kampung Matutuang sebesar 89,22%.³⁵ Berdasarkan data BPS Kepulauan Sangihe 2015, angka putus sekolah di Kecamatan Kepulauan Marore tahun 2013 dan 2014 pada jenjang SD dan SMP nihil. Pada 2013, angka putus sekolah di jenjang SMA mencapai 0,5% dan pada 2014 nihil.³⁶ Dari 71 siswa SMP di Kecamatan Kepulauan Marore (Pulau Marore dan Pulau Matutuang) pada 2014, semuanya dinyatakan lulus. Begitu juga dengan jenjang SMA. Sejumlah 35 siswa pada 2014 dinyatakan lulus.³⁷ Dengan demikian, tingkat pendidikan dasar dan menengah di Kecamatan Kepulauan Marore terbilang baik.

Jika melihat data rasio siswa dan guru di Kecamatan Kepulauan Marore maka jumlah guru masih memadai. Hanya saja, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru SMA Marore, masih ada kekurangan guru mata pelajaran kimia dan matematika. Kondisi ini masih teratasi karena ada guru honorer yang mengajar matematika di SMA dan SD.³⁸ Sejauh ini belum ada program dari pemerintah terkait penempatan Guru 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) di Kecamatan Kepulauan Marore.

Untuk bidang kesehatan, jumlah kelahiran bayi di Puskesmas Kecamatan Marore pada 2015 adalah 12 anak.³⁹ Angka kematian anak dan ibu hamil sampai tahun 2015 adalah nihil.⁴⁰ Sepanjang tahun 2015 tidak terdapat kasus gizi buruk, tetapi ada kasus gizi kurang yang menimpa lima laki-laki dan tujuh perempuan di Pulau Marore,

³⁵ Puskesmas Marore, *Profil Puskesmas*, 11.

³⁶ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Kepulauan Sangihe*, 119.

³⁷ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kepulauan Marore*, 38–39.

³⁸ Guru Honor SMA, Wawancara di Marore, 27 Mei 2016.

³⁹ Puskesmas Marore, *Profil Puskesmas*, 31–32.

⁴⁰ F, Petugas Kesehatan Puskesmas Marore, Wawancara di Marore, 28 Mei 2016.

dua laki-laki di Kawio, dan dua laki-laki serta lima perempuan di Matutuang. Untuk mengatasinya, petugas gizi Puskesmas Marore melakukan pemberian makanan tambahan (PMT).⁴¹ Kondisi gizi kurang bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak seimbang atau tidak memenuhi syarat empat sehat lima sempurna. Hal ini tak terlepas dari kondisi tanah. Kondisi tanah yang berpasir dan berbatu membuat tingkat kesuburan tanah di Kecamatan Kepulauan Marore rendah. Akibatnya, tidak banyak tanaman sayur-mayur dan buah-buahan yang bisa tumbuh di sana.

Terkait program pemberian imunisasi dasar, Kecamatan Kepulauan Marore telah memenuhi kriteria desa UCI (*Universal Child Immunization*), yakni tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0–11 bulan), ibu hamil, dan anak sekolah tingkat dasar. Berdasarkan keterangan tenaga kesehatan di Puskesmas Marore, penyakit yang banyak diderita masyarakat adalah infeksi saluran pernapasan akut, hipertensi, dan mag (gastritis).⁴²

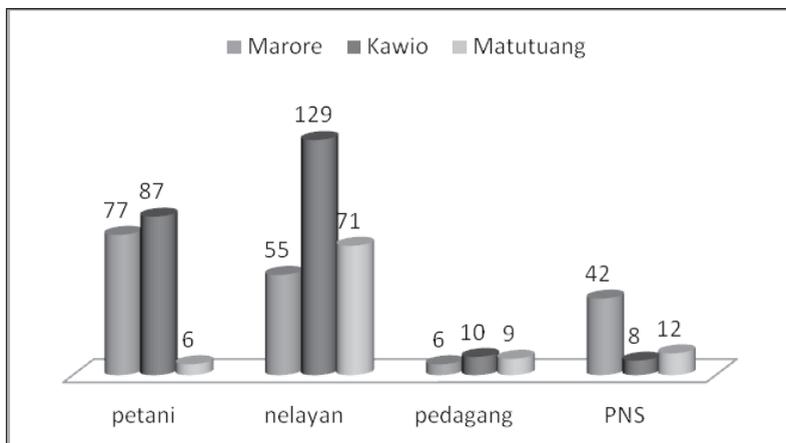
Sebagai daerah terpencil perbatasan yang bergantung pada cuaca, petugas kesehatan di Kepulauan Marore kerap mengalami kesulitan ketika mengambil obat-obatan di kabupaten. Seperti yang diungkapkan salah satu petugas kesehatan Puskesmas Marore: “*Kesulitan suplai obat ada di awal tahun karena kapal tidak bisa melaut akibat cuaca buruk*”.⁴³ Selain itu, masyarakat yang sakit parah dan harus dirujuk ke rumah sakit membutuhkan finansial dan tenaga karena harus dibawa ke Tahuna. Jika pasien memiliki keluarga di Filipina, keluar-ganya lebih memilih berobat ke Filipina. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan yang lebih memadai.

⁴¹ Puskesmas Marore, *Profil Puskesmas*, 22.

⁴² F, Petugas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Kepulauan Marore, Wawancara di Marore, 28 Mei 2016; dan lihat Puskesmas Marore, *Profil Puskesmas*, 37.

⁴³ F, Petugas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Kepulauan Marore, Wawancara di Marore, 28 Mei 2016.

Sebagai wilayah perairan, mayoritas penduduk di Kepulauan Marore adalah nelayan. Namun, ada juga masyarakat di sana yang bertani (menanam kelapa, umbi-umbian, dan sayuran untuk kebutuhan sehari-hari). Masyarakat yang bekerja di sektor formal sebagai pegawai negeri sipil daerah sebagian merupakan pendatang dari luar Kecamatan Kepulauan Marore (dari Tahuna). Jumlah PNS pada 2014 sebanyak 62 orang tersebar di tiga kampung, seperti dapat dilihat dalam Gambar 2.4. Selain itu, terdapat personel koramil/kepolisian enam orang, pegawai bea cukai satu orang, pegawai imigrasi satu orang, pegawai navigasi dua orang, dan pegawai di pos AL lima orang.⁴⁴



Gambar 2.4 Mata Pencapaian Penduduk Kecamatan Kepulauan Marore⁴⁵

Penduduk Kecamatan Kepulauan Marore berjumlah 1.748 jiwa, dengan usia produktif 15–54 tahun berjumlah 1.159 jiwa. Dari jumlah usia produktif tersebut, jumlah penduduk yang bekerja (baik sebagai

⁴⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Kecamatan Kepulauan Marore 2015* (Tahuna: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015), 2.

⁴⁵ Dibuat oleh penulis berdasarkan data Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Marore*, 26.

nelayan, petani, pedagang, maupun PNS) sampai tahun 2014 mencapai 512 jiwa atau 44,17%.⁴⁶ Jika melihat persentase penduduk yang bekerja tidak sampai 50%, jumlah pengangguran/belum bekerja di Kepulauan Marore masih tinggi. Hal ini disebabkan minimnya lapangan kerja di Kepulauan Marore.

4. Modal Ekonomi dan Keuangan

Pulau kecil memiliki karakteristik ekonomi yang rentan. Asumsi yang muncul yakni mengidentikkan sifat alamiah pulau kecil dalam hal ekonomi sebagai wilayah kecil, terisolasi, miskin, dan terbelakang. Asumsi tersebut muncul atas dasar: 1) keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan ekonomi; 2) pulau kecil menjadi subjek fluktuasi pasar internasional atas komoditas; 3) pulau kecil harus mengimpor kebutuhan pokok, bahan bakar, dan perlengkapan lainnya; 4) pendapatan daerah minim; 5) fasilitas pendidikan minim; dan 6) kondisi cuaca yang ekstrem berpengaruh terhadap aspek ekonomi dan lingkungan pulau kecil.⁴⁷ Kondisi-kondisi tersebut tampaknya tecermin dalam kehidupan masyarakat Marore.

Sebagai kawasan perbatasan, perekonomian Kecamatan Kepulauan Marore terbilang masih minim. Hal ini dikarenakan sarana transportasi sulit menjangkau kawasan perbatasan. Harga sembilan bahan pokok (sembako) di Marore pun lebih tinggi daripada harga pasar. Masyarakat kesulitan mengakses bahan pokok makanan karena pusat perdagangan ada di ibu kota kabupaten, yakni di Tahuna. Sarana transportasi dari dan menuju Tahuna sangat terbatas. Kedatangannya bahkan bisa satu minggu sekali. Berdasarkan pengamatan tim selama tinggal di Pulau Marore, harga beras bisa dua kali lipat dari harga pasar, bahkan harga telur mencapai Rp2.500/butir. Tercatat ada 29

⁴⁶ Hasil penghitungan tersebut diperoleh dari data Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Sangihe*, 20-22.

⁴⁷ L. Kristoferson, P. O'Keefe, dan J. Soussan, "Energy in Small Island Economies," *Ambio* 14, No. 4-5 (1985): 242.

kios/warung yang menjual barang-barang kebutuhan masyarakat Kepulauan Marore.⁴⁸

Kondisi masyarakat Kepulauan Marore secara ekonomi masih terbilang lemah karena hanya mengandalkan hasil perikanan dan pertanian untuk konsumsi sehari-hari. Persoalan utama adalah nelayan Marore belum mampu mengelola hasil perikanan menjadi komoditas bernilai tinggi. Nelayan Marore hanya menjual ikan dalam bentuk mentah (ikan segar). Kalaupun diolah, hanya menjadi ikan garang untuk kebutuhan sendiri. Jadi, pengolahan hasil tangkapan nelayan masih belum optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.⁴⁹

Pada 2014, target pendapatan asli daerah (PAD) Kecamatan Kepulauan Marore sebesar Rp1.042.500 bersumber dari pajak reklame yang realisasinya mencapai 100%. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kepulauan Marore tercatat Rp3.365.749. Angka tersebut sesuai target capaian Pemerintah Kecamatan Marore. Sejak tahun 2010–2014, nilai target dan realisasi PBB mencapai 100% sehingga camat Kepulauan Marore mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe atas prestasinya tersebut.⁵⁰ Meski nilai realisasi mencapai 100%, angka PAD dan PBB terbilang minim untuk digunakan membangun wilayah Marore—yang terdiri dari tiga pulau berpenghuni. Maka perlu upaya mencari sumber-sumber pendapatan daerah lain, misalnya pariwisata dan pengolahan ikan tangkap.

Pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai Rp20.927.034/tahun. Perhitungan ini diperoleh

⁴⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Kecamatan Kepulauan Marore 2015*, 11.

⁴⁹ SM, Guru SMA di Pulau Marore, Wawancara di Pulau Marore, 1 Juni 2016.

⁵⁰ SO, Camat Kepulauan Marore, Wawancara di Marore, 1 Juni 2016. Lihat juga Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Marore*, 108–109.

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Sangihe dibagi jumlah penduduk,⁵¹ seperti berikut ini.⁵²

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan per kapita} &= \text{Rp}2.701.680.000 \\ &\quad \underline{\hspace{10em}129.100^{53}} \\ &= \text{Rp}20.927.034 \end{aligned}$$

Jika melihat angka tersebut, pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp1.743.919/per bulan. Angka ini sesuai dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Marore yang mayoritasnya nelayan dan petani kebun dengan pendapatan minim. Kondisi tersebut terjadi karena faktor cuaca dan terbatasnya pasar penjualan ikan. Berdasarkan data Kecamatan Marore, terdapat 184 keluarga prasejahtera dari 464 KK di kecamatan Kepulauan Marore seperti tersaji dalam Gambar 2.5.⁵⁴

Masyarakat Kepulauan Marore sebagian besar adalah nelayan. Karena sulitnya pasar penjualan ikan maka perekonomian nelayan di Kepulauan Marore belum menunjukkan peningkatan. Ketiadaan pasar dan tempat pelelangan ikan (TPI) di Marore menyulitkan nelayan untuk menjual ikan sehingga harapannya hanyalah kepada pengepul ikan di wilayah Marore.⁵⁵ Keterbatasan sarana dan mahal biaya operasional menuju ibu kota kabupaten dan sekitarnya menyebabkan nelayan Marore hanya bisa menjual hasil tangkapan ikan ke pengepul lokal berskala kecil yang ada di pulau tersebut dan selebihnya untuk konsumsi sehari-hari. Sebagian nelayan Marore memilih fokus pada penangkapan ikan *gurango* (ikan hiu) karena harga jual sirip

⁵¹ Penghitungan PDRB ini berdasarkan harga yang sedang berlaku (ADHB).

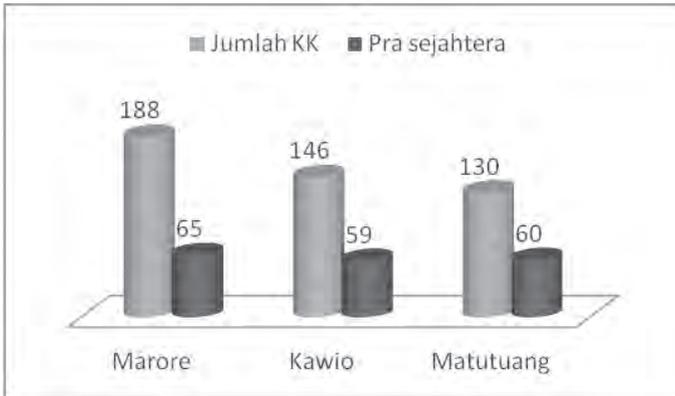
⁵² Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Kepulauan Sangihe*, 363.

⁵³ Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2014.

⁵⁴ Data diperoleh dari Kantor Kecamatan Kepulauan Marore.

⁵⁵ JFS, Pedagang, Wawancara di Marore, 30 Mei 2016.

ikan *gurango* kering kualitas nomor satu harganya Rp1.000.000 di Marore dan mencapai Rp2.000.000 di Manado.⁵⁶



Gambar 2.5 Jumlah Keluarga Prasejahtera di Kecamatan Kepulauan Marore⁵⁷

Keberadaan pengepul ikan sangat penting di Kepulauan Marore. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya transportasi yang harus ditanggung jika menjual ikan langsung ke Tahuna. Berdasarkan keterangan narasumber yang juga salah satu pengepul ikan di Kepulauan Marore, membawa dan menjual ikan secara langsung ke Filipina lebih menguntungkan daripada ke Tahuna. Meski harga penjualan ikan di Tahuna selisih Rp3.000–Rp5.000 dengan harga jual di Filipina, modal untuk bahan bakar *pumpboat* dan es ke Tahuna lebih besar daripada ke Filipina. Jika bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan sekitar 100 liter untuk pergi-pulang ke Tahuna, perjalanan ke Filipina hanya menghabiskan sekitar 50 liter BBM. Jika menjual ikan ke Filipina, pulanginya bisa membawa barang-barang yang laku dijual di Marore, seperti lem, kail, dan paku untuk kapal, minuman soda, dan kebu-

⁵⁶ S, Nelayan Ikan Gurango, Wawancara di Marore, 28 Mei 2016.

⁵⁷ Dibuat oleh penulis berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Kepulauan Marore, 2016.

tuhan sandang masyarakat Marore. Dari penjualan barang-barang tersebut, pengepul ikan mendapatkan keuntungan.⁵⁸

Ketersediaan akses listrik di Kecamatan Kepulauan Marore yang tidak merata di ketiga kampung (pulau) berdampak terhadap perekonomian masyarakatnya. Akses listrik di Pulau Marore sudah 24 jam karena menggunakan kombinasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Jumlah rumah tangga pelanggan PLN adalah 183 dari 448 rumah tangga di Kecamatan Kepulauan Marore. Kemudahan akses listrik 24 jam di Pulau Marore berdampak positif terhadap kehidupan masyarakatnya. Selain masyarakat dapat membuat es sendiri untuk menyimpan ikan hasil tangkapan, masyarakat lain yang bukan nelayan juga dapat membuat es untuk dijual ke masyarakat Pulau Kawio dan Matutuang. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kedua pulau tersebut tidak mendapat akses listrik 24 jam seperti di Pulau Marore. Mereka hanya mengandalkan tenaga surya. Ketika malam hari, baik Pulau Kawio maupun Pulau Matutuang, gelap gulita. Nelayan dari Pulau Kawio dan Matutuang harus mengeluarkan biaya transportasi lebih untuk membeli es di Pulau Marore karena mereka membutuhkan bahan bakar minyak untuk menjalankan *pumpboat*.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan tempat penyimpanan ikan (*cold storage*). Namun, belum berfungsi maksimal, bahkan alatnya sudah rusak.⁵⁹

5. Modal Sosial

Modal sosial merupakan kehendak baik, persahabatan, simpati, dan hubungan sosial di antara individu dan keluarga untuk menciptakan unit sosial. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan

⁵⁸ MM, Pengepul Ikan, Wawancara di Marore, 27 Mei 2016.

⁵⁹ JFS, Pedagang, Marore, Wawancara di Maorere, 30 Mei 2016.

kerja sama yang saling menguntungkan.⁶⁰ Modal sosial kemudian dibaca dalam konteks masyarakat perbatasan sebagai sebuah interaksi sosial antarwarga perbatasan, hubungan saling percaya, dan keanggotaan dalam sebuah kelompok.

Komposisi penduduk Kepulauan Marore terdiri dari tiga etnik besar, yaitu subetnik Siau Tagulandang, subetnik Talaud, dan subetnik Sangihe Besar. Penduduk Kepulauan Marore mayoritas beragama Kristen Protestan, sementara agama Islam dianut pendatang atau pegawai yang ditempatkan di Pulau Marore. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat Marore adalah Bahasa Sangihe Talaud. Bahasa Indonesia hanya digunakan dalam forum resmi dan pengajaran di sekolah.⁶¹ Sebagai masyarakat keturunan Sangir (Orang Sangir atau Orang Sangihe adalah sebutan bagi orang-orang yang berasal dari Pulau Sangihe Besar), penduduk Kepulauan Marore masih memegang tradisi Sangir hingga kini. Salah satu acara tradisi yang masih dilestarikan adalah upacara *tulude* yang digelar setiap awal tahun. Tokoh pejuang Sangihe bernama Barhama dianggap sebagai pemimpin pertama orang Sangihe yang bermukim di Marore. Masyarakat Marore melaksanakan upacara adat *tulude* sebagai peringatan terbentuknya pemukiman Marore setiap 31 Januari.⁶² Upacara adat *tulude* juga merupakan wujud ungkapan syukur orang Sangir karena telah diberkati *Mawu Ruata Ghenggona Langi* (Tuhan Yang Mahakuasa) memasuki tahun yang baru.⁶³

⁶⁰ Robert D. Putnam, Robert Leonardi, dan Raffaella Y. Nanetti, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993) dikutip oleh Rusydi Syahra, "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 5, No. 1 (2003): 5.

⁶¹ "Pulau Marore di Provinsi Sulawesi Utara. Salah Satu dari 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar," diakses pada 15 Desember dari <http://www.didisadili.com/2012/02/pulau-marore-di-provinsi-sulawesi-utara.html>.

⁶² A. Soeratin, ed., *Tepian Tanah Air, 92 Pulau Terdepan Indonesia: Indonesia Bagian Tengah* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), 216.

⁶³ A.B Kristianto (n.d.), *Transsignifikansi (Perubahan Makna) Kue Tamo dalam Upacara Tulude: Suatu Upaya Inkulturasi Liturgi atas Budaya Sangir*, diakses pada 10 September

Gotong royong dan ikatan persaudaraan menjadi kebiasaan baik masyarakat di Kepulauan Marore. Ikatan persaudaraan di Pulau Marore dapat dilihat ketika ada keluarga yang sedang berduka. Masyarakat di Marore bergotong royong membantu keluarga yang berduka itu dengan mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Bantuan tersebut bisa berupa uang maupun bahan makanan. Perwakilan dari desa mengumpulkan sumbangan dari setiap rumah kemudian diantarkan kepada keluarga yang berduka. Tujuannya adalah mengurangi beban keluarga yang sedang berduka.⁶⁴ Selain itu, saat pembangunan pusaran (kuburan), masyarakat Marore akan bergotong royong membangun pusaran tersebut. Kegiatan gotong royong masyarakat Marore juga dapat dilihat ketika ada warga yang akan mengadakan syukuran atas pembangunan rumah tinggal. Warga laki-laki membantu pembangunan rumah tersebut tanpa mendapat bayaran.⁶⁵

Pulau Marore merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan laut dengan Pulau Balut dan Pulau Sarangani di Filipina. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan negara lain, kehidupan masyarakat di kedua negara memiliki ikatan yang kuat berkaitan dengan kondisi masa lalu. Jika dilihat dari sejarahnya, penduduk di pulau Balut dan Sarangani, Filipina sebagian besarnya keturunan Sangir (masyarakat Sangir, sebutan untuk penduduk di Kepulauan Sangihe). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang Sangir yang tinggal di pantai selatan Mindanao dan Davao selama berabad-abad.

Dalam perjalanannya, warga negara Indonesia yang ada di Filipina tersebut berpindah kewarganegaraan ke Filipina. Namun,

2016 dari http://www.academia.edu/9145093/Transnifikasi_Kue_Tamo_dalam_Upacara_Tulude.

⁶⁴ SM, Guru SMA di Kecamatan Kepulauan Marore, Wawancara di Marore, 1 Juni 2016.

⁶⁵ SM, Guru SMA di Kecamatan Kepulauan Marore, Wawancara di Marore, 1 Juni 2016.

tidak sedikit keturunan Sangir yang tinggal di Pulau Balut dan Sarangani masih belum memiliki identitas. Mereka bukan warga negara Filipina meski sudah lama tinggal di sana. Mereka juga tidak memiliki identitas warga negara Indonesia karena memang sejak lama menetap di Filipina. Orang-orang yang tidak tercatat sebagai WNI atau WNP (*undocumented people*) inilah yang masih menjadi persoalan bagi kedua negara. Kondisi ini dialami oleh sekitar 3.000-an penduduk yang ada di Filipina. Mereka ingin kembali menetap di Indonesia karena tidak memiliki hak kepemilikan tanah di Filipina.⁶⁶

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, masyarakat Marore kerap menjual hasil alamnya, seperti ikan, kopra, kelapa, dan ikan garang ke Filipina. Untuk mengisi kekosongan perahu saat pulang, mereka membeli barang-barang kebutuhan dari Filipina. Barang-barang yang dibutuhkan biasanya bahan pokok dan kebutuhan nelayan, seperti, paku, lem, tripleks, dan barang lain untuk kebutuhan perahu nelayan.⁶⁷ Demikian juga sebaliknya, pelintas batas Filipina berperahu mesin fuso datang ke Marore untuk membeli ikan langsung dari nelayan. Perdagangan lintas batas yang melibatkan kedua negara ini sudah terjalin sejak lama karena bagaimanapun, sebagian besar warga di Filipina bagian selatan adalah keturunan Sangir. Interaksi sosial ini menggambarkan kuatnya ikatan persaudaraan yang membawa keuntungan ekonomi bagi kedua belah pihak.

6. Modal Politik

Kecamatan Kepulauan Marore memiliki tiga kampung, yakni Marore, Kawio, dan Matutuang. Ketiga kampung ini berada di pulau yang berbeda dan jarak tempuh untuk mengaksesnya pun berbeda. Pemerintahan pada tingkat kecamatan dipimpin oleh camat, sementara pada tingkat desa (kampung) dipimpin oleh *kapitalaung*. Meski

⁶⁶ JA, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wawancara di Tahuna, 25 Mei 2016.

⁶⁷ MM, Pengepul Ikan, Wawancara di Marore, 27 Mei 2016.

pulaunya terpisah, masyarakat Kawio dan Matutuang memiliki pemerintahan desa di masing-masing pulau. Untuk urusan kecamatan, masyarakat dan perangkat desa harus ke Pulau Marore yang merupakan pusat kecamatan. Begitu juga untuk pengurusan izin lintas batas, masyarakat Kawio dan Matutuang harus mengurus perizinan ke pos lintas batas (PLB) di Pulau Marore.

Secara infrastruktur, baik desa maupun kecamatan, di wilayah ini sudah memiliki bangunan yang permanen. PLB satu atap juga sudah tersedia. Yang masih menjadi persoalan adalah keterbatasan sumber daya manusia untuk mengisi pos-pos jabatan di instansi tersebut. Di kantor Kecamatan Kepulauan Marore, terdapat kekosongan dua jabatan Kasi sehingga Kasi yang ada harus merangkap pekerjaan. Saat penelitian kami masih berlangsung, jabatan kasi yang kosong adalah kasi pemerintahan dan kasi kesejahteraan sosial.

Sarana dan prasarana di kantor kecamatan juga masih kurang menunjang kerja pegawai, seperti sarana komputer, printer, dan jaringan internet. Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan surat-menyurat ke kabupaten secara cepat, pegawai kecamatan mengandalkan jaringan internet gratis (*wi-fi*) dari pos Angkatan Laut. Selain itu, PLB satu atap yang sudah setahun berdiri belum juga diresmikan sehingga pegawainya kerap kesulitan melayani pelintas batas yang sewaktu-waktu meminta cap lintas batas.

Belum maksimalnya pelayanan satu atap juga berdampak pada pengurusan Pas Lintas Batas di Kecamatan Marore. Seperti yang diungkapkan narasumber: "*Pelintas harus muter-muter cari petugas. Kalau di Filipina, petugasnya (satu atap) yang kerjakan dan kami mendapatkan minuman gratis.*"⁶⁸ Narasumber lain mengungkapkan bahwa pelayanan lintas batas di Filipina lebih baik dibandingkan PLB di Marore. "*Kantornya (PLB Marore) ada, namun orangnya susah dicari, sering tidak ada di tempat sehingga kami suka kesulitan dalam*

⁶⁸ YM, Pedagang, Wawancara di Marore, 30 Mei 2016.

*mengurus surat secara cepat.*⁶⁹ Kondisi seperti inilah yang tampaknya harus diperbaiki oleh pihak-pihak yang bertugas di Pos Lintas Batas Pulau Marore.

Sebagai wilayah pulau kecil terluar di Indonesia, Kecamatan Kepulauan Marore banyak mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Pemerintah Pusat. Sesuai Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo, yakni membangun wilayah NKRI dari pinggiran, ada sejumlah kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk kecamatan ini. Misalnya, masalah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi cuaca yang terkadang ekstrem (terutama pada Agustus hingga Februari) menyebabkan kapal-kapal perintis dan *pumpboat* sulit untuk berlayar. Akibatnya, nelayan tidak dapat melaut dan kapal perintis tidak bisa bersandar di pelabuhan Marore. Penduduk Kecamatan Kepulauan Marore kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demi mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Pusat melalui pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan bantuan rawan pangan pada bulan-bulan cuaca ekstrem. Bantuan tersebut berupa beras sebanyak 20 ton yang dibagikan untuk seluruh kepala keluarga di Kecamatan Kepulauan Marore. Jadi, saat musim angin kencang, masyarakat Marore tidak kelaparan.⁷⁰ Selain rawan pangan, bantuan beras raskin berharga murah (Rp2.500/kg) juga cukup membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan harian.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki program bantuan penyediaan *cold storage* di setiap kampung sebagai tempat penyimpanan ikan hasil tangkapan nelayan. Namun, *cold storage* ini belum dimanfaatkan secara optimal karena membutuhkan daya listrik besar dan PLN belum mampu memenuhinya.

⁶⁹ MM, Pengepul Ikan, Wawancara Marore, 27 Mei 2016.

⁷⁰ RD, Sekretaris Kecamatan Kepulauan Marore, Wawancara di Marore, 29 Mei 2016.

Program lain yang diberikan KKP adalah bantuan 12 perahu motor (*pumpboat*) bagi nelayan secara gratis. Nelayan ataupun kelompok nelayan yang belum memiliki *pumpboat* diberikan bantuan perahu dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian—karena bisa menangkap ikan sendiri tanpa harus menyewa perahu.⁷¹ Berdasarkan keterangan narasumber di Kawio, perahu-perahu bantuan dari KKP tersebut kualitasnya kurang baik. Dalam pelayaran dari Kawio ke Tahuna saja sudah terjadi kebocoran. Hal ini dikarenakan kayu dan bahan yang digunakan untuk membuat perahu *pumpboat* tersebut kualitasnya tidak sebagus bahan dari Filipina. Nelayan lalu mengambil mesinnya kemudian membuat perahu sendiri dengan membeli bahan bakunya dari Filipina.⁷²

Dari sisi perumahan, mayoritas bangunan rumah di Kepulauan Marore berjenis semi-permanen. Namun, masih ada rumah penduduk yang terbuat dari kayu atau bambu. Demi mewujudkan rumah laik huni, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan bantuan 20 juta rupiah bagi masing-masing keluarga yang tidak mampu dalam bentuk bahan baku rumah. Berdasarkan keterangan narasumber, sudah ada 16 bantuan rumah dari pemerintah untuk tiga kampung. Bahan baku rumah, seperti kayu, semen, paku, dan asbes didatangkan dari Tahuna menggunakan kapal perintis, sementara tanah dan biaya tukang ditanggung penerima bantuan.⁷³

Perhatian pemerintah terhadap kawasan perbatasan, termasuk Kepulauan Marore patut diapresiasi. Namun, pemberian bantuan rawan pangan bagi masyarakat di tiga pulau ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, pemberian bantuan rawan pangan bisa mencegah kelaparan di kawasan perbatasan/pulau kecil terluar yang sangat tergantung dengan cuaca. Di lain sisi, pemberian bantuan seperti itu juga dapat

⁷¹ Mekanisme pemberian bantuan perahu bermacam-macam. Awalnya diberikan untuk pribadi, namun kemudian dibentuk kelompok.

⁷² BM, Kapitalaung Kampung Kawio, Wawancara di Marore, 29 Mei 2016.

⁷³ S, Nelayan Marore, Wawancara di Marore, 28 Mei 2016.

menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan mereduksi kreativitas masyarakat. Dulunya masyarakat Kepulauan Marore bisa mengonsumsi umbi-umbian, sagu, dan lainnya sebagai pengganti nasi saat cuaca buruk. Kini masyarakat di sana sudah tidak khawatir kekurangan pangan karena mengandalkan bantuan beras dari pemerintah. Akibatnya, masyarakat Kepulauan Marore menjadi kurang kreatif untuk memenuhi kebutuhan makanannya dan hanya mengonsumsi nasi. Hal ini diakui oleh salah seorang narasumber yang mengatakan: *“Kalau musim angin kencang, selama tidak melaut, untuk sehari-hari ngutang di warung, sekarang ada bantuan beras dari pemerintah. Tiga kampung dapat. Jadi tidak pernah kehabisan beras, tidak rawan pangan. Kalau angin kencang cari ikannya dengan pancing pakai bambu.”*⁷⁴

Masyarakat Kepulauan Marore memang belum mampu mengelola hasil perikanan secara optimal, namun hal itu tidak menyurutkan niat mereka untuk mengail ikan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemandirian masyarakat, kemampuan beradaptasi, dan bertransformasi terhadap perubahan yang terjadi telah dilakukan masyarakat perbatasan, terutama Kepulauan Marore sejak dulu. Segala keterbatasan yang ada nyatanya tidak menyurutkan nasionalisme masyarakat perbatasan. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Camat Marore *“Kalau untuk nasionalisme, Marore sangat tinggi. Sesusah apa pun masyarakat di sini, tidak akan berpaling dari NKRI. Kalaupun ada gangguan dari Filipina, kita akan lawan.”*⁷⁵

Terkait upaya pertahanan keamanan di wilayah Kepulauan Marore, terdapat sinergi antara Kepolisian Sektor Marore, Koramil, dan pos Angkatan Laut (AL). Adapun jumlah personel dari Koramil dan Polsek adalah enam orang dan pos AL lima orang.⁷⁶ Jika melihat

⁷⁴ S, Nelayan Marore, Wawancara di Marore, 28 Mei 2016.

⁷⁵ RD, Sekretaris Camat Marore, Wawancara di Marore, 29 Mei 2016.

⁷⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Kecamatan Kepulauan Marore 2015* (Kabupaten Kepulauan Sangihe: BPS, 2015), 2.

jangkauan operasi Kecamatan Kepulauan Marore yang meliputi 10 pulau (baik pulau berpenghuni maupun tidak berpenghuni), jumlah personel pos AL yang hanya satu komandan dan empat anggota masih belum memadai. Prasarana operasi pos AL pun masih minim. Kebutuhan pos AL untuk operasi di laut adalah *sea rider*, namun kenyataannya hanya memiliki perahu karet tanpa lunas papan—jika terkena ombak bisa melengkung dan tergulung ombak.⁷⁷

Sebagai pulau kecil terluar di perbatasan Indonesia dengan akses terbatas ke ibu kota kabupaten, kehidupan masyarakat Kepulauan Marore kini lebih baik karena adanya berbagai bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun, sejumlah harapan masih tergantung demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat membuka lapangan kerja, misalnya pabrik pengolahan ikan di Kabupaten Sangihe, agar pemuda/pemudi Kepulauan Marore bisa bekerja di sana. Dengan adanya pabrik pengolahan ikan, semangat nelayan Marore mencari ikan menjadi lebih tinggi karena ada pasar penjualannya. Selanjutnya, harapan masyarakat agar ada agen bahan bakar minyak (BBM), baik bensin sebagai bahan bakar untuk *pumpboat* maupun minyak tanah untuk bahan bakar memasak. Apabila ada agen BBM maka distribusi BBM menjadi lebih mudah dan biaya operasional nelayan menjadi lebih ekonomis. Harapan terakhir masyarakat adalah adanya kapal pengepul/pengumpul ikan hasil tangkapan nelayan. Dengan adanya kapal pengepul ikan, terdapat kepastian penjualan hasil tangkapan. Pada akhirnya, hal ini berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Kepulauan Marore.

Keenam modal sebagai indikator ketahanan sosial masyarakat perbatasan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

⁷⁷ B, petugas pos AL Pulau Marore, Wawancara di Marore, 30 Juni 2016.

Tabel 2.1 Indikator Ketahanan Sosial Masyarakat Kepulauan Marore

No	Modal Ketahanan Sosial	Variabel	Indikator	Bobot nilai (+ atau -)
1	Alam	Iklim/Cuaca	Lamanya musim angin kencang/cuaca ekstrem	(-)
			Sumber daya laut	Potensi ikan (dibanding WPP 716)
		Sumber daya pertanian	Tingkat produksi ikan	(-)
			Kesuburan tanah	(-)
			Produktivitas tanaman	(-)
Ketersediaan air	Ketersediaan air bersih	(+)		
	Akses terhadap air bersih	(+)		
2	Fisik	Transportasi	Ketersediaan kapal perintis	(+)
			Frekuensi kapal perintis	(-)
			Keterjangkauan harga tiket kapal perintis	(+)
	Fasilitas Kesehatan	Puskesmas/posyandu	Instalasi Rawat Inap	(+)
			Ketersediaan Dokter	(-)
			Ketersediaan Tenaga Medis lainnya	(+)
			Gedung Sekolah (SD, SMP, SMA)	(+)
	Fasilitas Pendidikan	Jumlah ketersediaan guru (rasio guru dan murid)		(+)
				(+)
	Fasilitas Ekonomi	Kios/Warung	Pasar	(-)
			Tempat pelelangan ikan (TPI)	(-)
			Cold Storage	(+)
			Listrik	Listrik 24 jam (di Pulau Marore)
	Listrik	Listrik 24 jam (di Pulau Kawio dan Matutuang)		(-)
			Jumlah pelanggan PLN (Pulau Marore)	(+)
			Komunikasi	Penggunaan telepon genggam
	Akses internet (Pulau Marore)		(+)	
3		Manusia	Tingkat Kesehatan	Angka kelahiran bayi hidup
			Angka kematian ibu nihil	(+)
	Tingkat pendidikan	Banyaknya lulusan SMP	(+)	
Tingkat pekerjaan	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	(-)		
4	keuangan	Tingkat Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(-)
			Pendapatan Per kapita	(-)
5	Sosial	Hubungan saling percaya	Gotong-royong	(+)
			Pemakaian bahasa antarwilayah	(+)
			Jumlah kunjungan	(+)
			Keberadaan keluarga di negara tetangga	(+)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Modal Ketahanan Sosial	Variabel	Indikator	Bobot nilai (+ atau -)
6	Politik	Struktur kelembagaan	Jumlah personel kecamatan	(-)
			Tingkat pelayanan	(-)
		Bantuan dari pemerintah	Bantuan pangan (beras)	(+)
			Bantuan perahu (<i>pumpboat</i>)	(+)
			Bantuan <i>cold storage</i>	(+)
			Bantuan alat penyulingan air laut menjadi air minum	(+)
			Bantuan rumah bagi masyarakat miskin	(+)
		Fasilitas pertahanan dan Keamanan	Jumlah personel Hankam	(-)
			Prasarana operasi keamanan laut	(-)

Berdasarkan tabel tersebut, indikator modal alam, modal keuangan/ekonomi, dan modal politik sebagian besar memiliki nilai negatif. Modal fisik secara umum baik, hanya kekurangan tenaga dokter, pasar, dan TPI yang selayaknya dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Marore dan sekitarnya. Selain kondisi internal yang tergambar dalam enam modal di atas, masyarakat Kepulauan Marore perlu memperhatikan tantangan dari luar, yaitu kehadiran nelayan Filipina di wilayah mereka. Bahkan, di antaranya berlabuh di pulau sekitar Matutuang untuk sekadar beristirahat. Secara kultur mungkin hal tersebut dianggap biasa oleh sebagian nelayan. Namun, secara Hukum Laut Internasional, nelayan Filipina sudah melanggar teritorial tangkapannya. Pemerintah daerah setempat berhak menangkapnya karena termasuk kategori *illegal fishing*.

Persoalan *illegal fishing* yang dilakukan nelayan Filipina di sekitar perairan Marore bukanlah persoalan yang mudah. Hal ini dikarenakan nelayan yang mengail ikan tersebut adalah warga negara Filipina keturunan Sangir. Berdasarkan keterangan narasumber, kapal nelayan Filipina (biasa disebut *fuso*) yang mencari ikan di perairan Marore dilengkapi dengan senjata. Nelayan Marore jadi tidak berani mengusir nelayan Filipina tersebut. Seperti diungkapkan petugas Pos AL Marore: “Pernah ada laporan dari sekretaris desa bahwa Pulau

Buku ini tidak diperjualbelikan.

*Mamanuk adalah tempat memancing nelayan kita. Namun sekarang justru banyak nelayan Filipina yang memancing di sana. Nelayan Marore takut karena nelayan Filipina membawa senjata.*⁷⁸

Lebih jauh, nelayan-nelayan Filipina juga mencuri ikan tuna kualitas ekspor di perairan Sangihe dan dikirim ke General Santos (Gensan), Filipina, menggunakan *pumpboat* berkapasitas di bawah 30 GT. Berdasarkan temuan pihak KKP di Tahuna pada pertengahan tahun 2015, *pumpboat-pumboat* tersebut menggunakan bendera Indonesia, namun beranggotakan Anak Buah Kapal (ABK) asing. Dalam sebuah operasi yang dilakukan KKP, ditemukan jumlah *pumpboat* yang beroperasi di Tahuna dan ber-ABK asing sebanyak 82 unit. Pada operasi selanjutnya ditemukan 450 ABK yang tidak mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia maupun kartu identitas Filipina apalagi visa.⁷⁹

Pencurian ikan yang dilakukan nelayan Filipina di perairan Marore jarang diketahui pihak berwenang. Hal ini dikarenakan jangkauan patroli wilayah pos AL Marore terbatas di sekitar Pulau Marore dan Kawio saja. Patroli hanya dilakukan sekali sebulan sehingga apabila ada pencurian ikan di perairan pulau-pulau lainnya, seperti di Mamanuk, akan sulit teridentifikasi. Masih lemahnya fungsi pengawasan di Marore karena posisi pos AL di bawah komando Komandan Pangkalan Angkatan Laut Sulawesi Utara (Danlanal). Segala pergerakan menunggu arahan dari Danlanal. Jika tidak ada arahan dari Danlanal maka tidak ada pergerakan. Sinyal komunikasi di Kepulauan Marore juga masih mengalami kendala. Selain itu, keterbatasan personel pos AL (satu komandan dan empat anggota) serta prasarana patroli juga berdampak pada fungsi pengawasan laut.

⁷⁸ B, petugas Pos AL Marore, Wawancara di Marore, 30 Juni 2016.

⁷⁹ "Nelayan Sangihe SMS ke Menteri Susi: Nelayan Filipina Curi Ikan di Sangihe," *Manado Ekspres*, 23 Juni 2015, diakses pada 28 September 2016 dari http://www.manadoexpress.co/berita-7984-nelayan-sangihe-sms-ke-menteri-susi-nelayan-filipina-curi-ikan-di-sangihe.html?fb_comment_id=712843905505475_712966318826567#f191e5acf.

Saat ini, prasarana yang dimiliki pos AL adalah perahu karet. Perahu karet tidak memiliki lunas papan sehingga jika terkena ombak bisa melengkung dan tergulung ombak.⁸⁰

Jika melihat kondisi tersebut dan dikaitkan dengan ketahanan sosial menurut definisi Adger (kemampuan masyarakat untuk menahan atau melindungi diri dari gangguan eksternal terhadap infrastruktur sosial mereka),⁸¹ dapat dikatakan bahwa kebutuhan hidup dan penguasaan sumber daya masyarakat Marore dan sekitarnya mengalami gangguan dari pihak Filipina. Pencurian ikan di wilayah perairan Marore (Kabupaten Sangihe) oleh nelayan asing menjadi salah satu penyebab kerentanan ekonomi masyarakat di sana. Sumber daya alam yang dimiliki masyarakat Marore selayaknya dikelola secara optimal demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Oleh sebab itu, perlu perhatian dari pemerintah pusat, daerah, juga peran aktif masyarakat perbatasan dalam menjaga kedaulatan lautnya.

Tak dapat dipungkiri bahwa kawasan perbatasan kerap diwarnai maraknya aktivitas pelanggaran hukum lintas batas, seperti *illegal trading*, *illegal mining*, *illegal dredging/sand*, *illegal migration*, *illegal logging*, *human trafficking*, *people smuggling*, *illegal fishing*, *sea piracy*, dan *contraband*.⁸² Kondisi tersebut merugikan Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan. Oleh sebab itu, kawasan perbatasan semestinya mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam hal pembangunan dan pengelolaannya.

⁸⁰ B, Petugas Pos AL Marore, Wawancara di Marore, 30 Juni 2016.

⁸¹ W.N. Adger, "Social And Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24, No. 3 (2000): 361, doi:10.1191/030913200701540465.

⁸² "Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015–2019," (2015), 1.

C. KESIMPULAN

Kecamatan Kepulauan Marore merupakan kawasan perbatasan antara Indonesia-Filipina yang memiliki hubungan historis dan ekonomi sejak dahulu. Perekonomian masyarakat Marore bisa dikatakan terhubung secara simbiosis dengan Filipina, seperti diungkapkan Martinez. Hal ini bisa dilihat dari interaksi perdagangan yang terjadi. Nelayan Marore memilih menjual ikan ke fuso Filipina atau menjualnya langsung ke Filipina. Ketika kembali, mereka mengisi kekosongan perahu dengan membawa barang dagangan yang laku dijual di Marore sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi. Masyarakat Filipina pun mendapat keuntungan ekonomi berupa suplai ikan berkualitas baik dengan harga terjangkau.

Interaksi perdagangan yang terjadi antarkedua negara ini jika dikaitkan dengan ketahanan sosial memiliki catatan tersendiri. Bisa dikatakan bahwa ketahanan sosial masyarakat Kepulauan Marore lebih stabil karena tidak terlalu bergantung pada Filipina. Kebutuhan sehari-hari masyarakat Marore kebanyakan masih didatangkan dari Tahuna dan sekitarnya. Hanya saja, untuk bahan dasar kapal, yakni paku, lem, dan tripleks, masyarakat memilih produk dari Filipina. Ketahanan sosial masyarakat Marore justru rentan akibat banyaknya bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bantuan pemerintah sebagai bentuk perhatian terhadap kawasan perbatasan memang patut diapresiasi, hanya saja bantuan tersebut sebaiknya lebih diprioritaskan dalam hal pembangunan infrastruktur pengolahan hasil tangkapan nelayan atau penciptaan lapangan kerja. Penyebabnya, bantuan tersebut berpengaruh terhadap kemandirian masyarakat dalam mempertahankan kebutuhan hidup.

Selain itu, kemudahan akses transportasi dari dan ke Tahuna selayaknya bisa lebih ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kepastian frekuensi kapal perintis yang berlayar dari dan menuju Marore, roda perekonomian masyarakat Kepulauan Marore menjadi lebih hidup dan meningkat. Fasilitas kelembagaan pemerin-

tahan dan fasilitas pertahanan keamanan juga perlu lebih ditingkatkan karena menjadi modal penting dalam menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia. Jika kondisi-kondisi tersebut dapat terpenuhi, ketahanan sosial masyarakat Kepulauan Marore dapat lebih terbangun.

Dengan segala tantangan yang dihadapi masyarakat perbatasan, tampaknya pengelolaan kawasan perbatasan perlu perlakuan khusus. Pendekatan keamanan (*security approach*) yang selama ini diterapkan di kawasan perbatasan perlu menyertakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini ditujukan selain untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial, dan budaya, serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.⁸³

Kondisi ketahanan sosial masyarakat di Kecamatan Kepulauan Marore masih cukup rentan dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Kondisi tersebut juga dialami masyarakat Pulau Sebatik di Kalimantan Utara yang berbatasan darat dan laut dengan wilayah Malaysia yang akan dibahas lebih lanjut dalam Bab III.

DAFTAR ACUAN

- Adger, W. N. "Migration, Remittances, Livelihood Trajectories, and Social Resilience." *Ambio* 19, No. 3 (2009): 142–151.
- Adger, W. N. "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24, No. 3 (2000): 347–364.
- Badan Pusat Statistik. *Kepulauan Marore dalam Angka 2015*. Tahuna: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Kepulauan Sangihe dalam Angka 2015*. Tahuna: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015.

⁸³ Decentralization Support Facility Indonesia, *Naskah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan secara Terpadu* (Jakarta: DFS Indonesia, November 2011), 6.

- Badan Pusat Statistik. *Statistik Daerah Kecamatan Kepulauan Marore 2015*. Tahuna: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015.
- Bunting, Stuart W. *Principles of Sustainable Aquaculture Promoting Social, Economic and Environmental Resilience*. London and New York: Routledge, 2013.
- Decentralization Support Facility Indonesia. *Naskah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Secara Terpadu*. Jakarta: DFS Indonesia, November 2011.
- Keck, Markus dan Patrick Sakdapolrak. "What Is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward." *Erdkunde* 67, No. 1 (2013): 5–19.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. *Statistik Perikanan Tangkap di Laut menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 2005–2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2014.
- Kristianto, A.B. "Transignifikansi (Perubahan Makna) Kue Tamo dalam Upacara Tulude: Suatu Upaya Inkulturasi Liturgi atas Budaya Sangir." Diakses pada 10 September 2016 dari http://www.academia.edu/9145093/Transignifikansi_Kue_Tamo_dalam_Upacara_Tulude.
- Kristoferson, L, P. O'Keefe, dan J. Soussan. "Energy In Small Island Economies." *Ambio* 14, No. 4–5 (1985): 242–244.
- Martinez, O.J. *Border People: Life and Society in the U.S.-Mexico Borderlands*. Tucson: University of Arizona Press, 1994.
- Mendalora, Jerusalem. "Kebutuhan Air Minum di Marore Terpenuhi." *Antara Sulut*, 2 Juni 2016. Diakses pada 28 September 2016 dari <http://manado.antaranews.com/berita/30199/kebutuhan-air-minum-di-marore-terpenuhi>.
- Noveria, Mita, ed. *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Laut: Tinjauan dari Perspektif Sosial*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2014.
- "Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015–2019."
- "Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru."
- Puskesmas Marore. *Profil Puskesmas Kecamatan Kepulauan Marore 2015*. Marore: Puskesmas Marore, 2016.

- Putnam, Robert D., Robert Leonardi, dan Raffaella Y. Nanetti. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Olwig, M. F. "Multi-sited Resilience: the Mutual Construction of Local and Global Understandings and Practices of Adaptation and Innovation." *Applied Geography* 33, (2012): 112–118.
- Soeratin, A., ed. *Tepian Tanah Air, 92 Pulau Terdepan Indonesia: Indonesia Bagian Tengah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011.
- Syahra, Rusydi. "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 5, No. 1 (2003): 1–22.
- Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil. "Marore." Diakses pada 22 Juli 2016 dari http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/305.
- "Nelayan Sangihe SMS ke Menteri Susi: Nelayan Filipina Curi Ikan di Sangihe." *Manado Ekspres*, 23 Juni 2015. Diakses pada 28 September dari http://www.manadoexpress.co/berita-7984-nelayan-sangihe-sms-ke-menteri-susi-nelayan-filipina-curi-ikan-di-sangihe.html?fb_comment_id=712843905505475_712966318826567#f191e5acf.
- "Pulau Marore di Provinsi Sulawesi Utara: Salah Satu dari 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar." Diakses pada 15 Desember 2016 dari <http://www.di-disadili.com/2012/02/pulau-marore-di-provinsi-sulawesi-utara.html>.

WAWANCARA

- Wawancara dengan B, Petugas Pos AL, Kecamatan Kepulauan Marore, 30 Juni 2016.
- Wawancara dengan BM, Kapitalaung Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore, 29 Mei 2016.
- Wawancara dengan F, Petugas Kesehatan Puskesmas, Kecamatan Kepulauan Marore, 28 Mei 2016.
- Wawancara dengan JA, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tahuna, 25 Mei 2016.
- Wawancara dengan JFS, Pedagang, Kecamatan Kepulauan Marore, 30 Mei 2016.
- Wawancara dengan MM, Pengepul Ikan dan Kepala Unit PLN Marore, Kecamatan Kepulauan Marore, 27 Mei 2016.

- Wawancara dengan RD, Sekretaris Camat Kepulauan Marore, Kecamatan Kepulauan Marore, 29 Mei 2016.
- Wawancara dengan S, Nelayan, Kecamatan Kepulauan Marore, 28 Mei 2016.
- Wawancara dengan SA, Nelayan Ikan Gurango, Kecamatan Kepulauan Marore, 28 Mei 2016.
- Wawancara dengan SO, Camat Kepulauan Marore, Kecamatan Kepulauan Marore, 1 Juni 2016.
- Wawancara dengan SM, Guru SMA, Kecamatan Kepulauan Marore, 1 Juni 2016.
- Wawancara dengan YM, Pedagang, Kecamatan Kepulauan Marore, 30 Mei 2016.

BAB III

Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau Sebatik

M. Fakhry Ghafur

A. GAMBARAN UMUM PULAU SEBATIK

Perbatasan merupakan kawasan yang sangat strategis bagi kepentingan nasional Indonesia, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik keamanan. Pembangunan di wilayah perbatasan pun seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program dan kebijakan yang tengah dicanangkan pemerintah saat ini, sebagaimana yang tertera dalam Nawa Cita pemerintah, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran penting dalam mengembangkan wilayah perbatasan dan menjadikannya sebagai garda depan pembangunan nasional, terutama pulau-pulau kecil terluar yang sarat potensi sumber daya alamnya.

Meningkatnya aktivitas perdagangan dan interaksi sosial di Pulau Sebatik mendorong Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk melakukan kerja sama lintas batas. Pada 1970, kedua negara menyepakati kerja sama perdagangan lintas batas atau *Agreement on Border Trade* (BTA). Kesepakatan itu tidak hanya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan mengatur perdagangan lintas batas kedua negara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

saja, tetapi juga untuk meningkatkan potensi sosial-budaya serta potensi lainnya.

Untuk mengakomodasi perdagangan lintas batas di wilayah Sebatik Indonesia, pemerintah membuka tiga pos lintas batas (PLB), yaitu di Sei Nyamuk, Sei Pancang, dan Sei Melayu.¹ Dengan dibukanya PLB, aktivitas perdagangan lintas batas semakin marak dan ekonomi warga mengalami peningkatan. Namun, aktivitas ilegal juga tetap berjalan, seperti perdagangan ilegal, pencurian ikan, migrasi ilegal, perdagangan manusia, peredaran narkoba, dan terorisme.

Tulisan ini menjelaskan secara lebih mendalam kondisi ketahanan sosial masyarakat di wilayah Sebatik dilihat dari beberapa aspek, yaitu modal alam, fisik (infrastruktur, sarana dan prasarana), sumber daya manusia, keuangan, sosial, dan modal politik. Sebelum menjelaskan lebih jauh terkait ketahanan sosial, akan dijelaskan terlebih dahulu kondisi geografis dan masalah kependudukan sehingga dapat tergambar potensi dan dinamika sosial masyarakat yang berkembang di wilayah Sebatik.

Secara geografis, Pulau Sebatik merupakan bagian dari gugusan kepulauan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau ini merupakan salah satu dari pulau terluar yang terletak pada 4° 10' 05 LU–4° 01, 37" LU, 117° 41' 05" BT–117° 55' 56" BT.² Sebelah utara Wilayah Sebatik Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah Sabah (Malaysia), sebelah barat berbatasan dengan Nunukan, sementara di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Selat Makasar. Jadi, Pulau Sebatik terbagi dua, sebelah selatan masuk wilayah Indonesia,

¹ Dalam bahasa lokal Sebatik, Sungai=Sei. Jadi, nama Sungai Nyamuk, Sungai Pancang dan lain-lain juga disebut Sei Nyamuk, Sei Pancang, dan seterusnya.

² Bayu Setiawan, dkk, "Kondisi dan Potensi Wilayah Sebatik," dalam Bayu Setiawan, dkk, *Kompleksitas Pembangunan dan Strategi Pemberdayaan Keluarga di Perbatasan Sebatik* (Yogyakarta: Elmatara, 2012). Lihat juga, Lina Puryanti dan Sarkawi B. Husain, "A People-State Negotiation in a Borderland: A Case of the Indonesia-Malaysia Frontier in Sebatik Island," *Jurnal Wacana* 13, No. 1 (April 2011): 107.

sementara sebelah utara merupakan daerah Sabah, wilayah Malaysia bagian timur.

Wilayah Sebatik Indonesia berada di dekat khatulistiwa yang memiliki iklim tropis sehingga memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Selama beberapa bulan terjadi musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi hingga mencapai 1.500 mm/tahun.³ Hal ini menjadikan Sebatik sebagai wilayah yang sangat subur dan potensial untuk area pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, pisang, dan kakao. Selain itu, wilayah Sebatik kaya akan sumber daya mineral, baik berupa minyak bumi maupun gas. Namun, pemerintah belum melakukan observasi lebih jauh terkait kandungan mineral yang ada. Berdasarkan hasil riset Mustafa Abu Bakar, cadangan minyak bumi Pulau Sebatik mencapai 2,1 juta barel, dan setiap tahun kekayaan alam lainnya cenderung mengalami peningkatan.⁴

Secara administratif, wilayah Sebatik dimekarkan dalam beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat. Seiring berlangsungnya otonomi daerah pada 2011, wilayah Sebatik dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah, dengan total luas wilayah sekitar 247,5 km persegi.⁵ Di antara kelima kecamatan, Sebatik Tengah adalah kecamatan dengan perbatasan darat terpanjang dengan luas wilayah 47,71 km². Kecamatan ini dilalui sembilan patok perbatasan negara, mulai dari patok tiga di Desa Aji Kuning sampai patok sebelas di Desa Sungai Limo.⁶

Jumlah penduduk di wilayah Sebatik pada 2015 mencapai 37.992 jiwa yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik 4.646

³ Bayu Setiawan, dkk, *Kompleksitas Pembangunan*, 33.

⁴ Mustafa Abu Bakar, *Menata Pulau-pulau Kecil Terluar* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006).

⁵ Media Informasi Kantor Kecamatan Sebatik Tengah.

⁶ Media Informasi Kantor Kecamatan Sebatik Tengah.

jiwa, Kecamatan Sebatik Barat 7.837 jiwa, Kecamatan Sebatik Tengah 7.337 jiwa, Kecamatan Sebatik Timur 12.524 jiwa, dan Kecamatan Sebatik Utara 5.648 jiwa.⁷ Dari jumlah tersebut, mayoritasnya berprofesi sebagai pedagang, petani, dan nelayan.

Posisi strategis Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia serta potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan pulau ini wilayah strategis lintas batas. Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas II Kabupaten Nunukan, aktivitas lintas batas dari dan menuju Malaysia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama sebelum pos lintas batas di Sei Nyamuk ditutup.⁸

Tabel 3.1 Pelintas Batas dengan Menggunakan Pas Lintas Batas melalui Pos Sei Pancang, Sebatik Tahun 2010–2014⁹

Tahun	WNI		WNA	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
2010	28479	27895	92	97
2011	29107	29107	109	108
2012	32251	30310	106	110
2013	5358	5358	0	0
2014	4948	4948	0	0

Menggeliatnya aktivitas pelintas batas di Pulau Sebatik dipengaruhi oleh kondisi penduduk yang sebagian besar bergantung pada aktivitas perdagangan lintas batas. Sebanyak sepertiga jumlah penduduk berada di wilayah Sebatik Barat dan dua pertiga lainnya berada di wilayah Sebatik Tengah dan Sebatik Timur. Sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah Sebatik Tengah dan Sebatik Timur sangat dinamis dengan maraknya aktivitas lintas batas sehingga memacu roda pertumbuhan ekonomi serta semakin memajukan

⁷ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Nunukan dalam Angka 2016* (Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2016), 56.

⁸ Berdasarkan data Lalu-Lintas Keimigrasian dari Kantor Imigrasi Kelas II Kabupaten Nunukan tahun 2008–2014.

⁹ Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan, 2016.

sarana infrastruktur. Oleh karena itu, wajar kiranya aktivitas lintas batas dan interaksi sosial lintas batas sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Sebatik Tengah dan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Kondisi tersebut tampak di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, tempat tim peneliti melakukan riset, di mana mayoritas penduduknya adalah pedagang yang banyak melakukan aktivitas lintas batas. Jaraknya yang dekat dengan wilayah Sabah (Sebatik Malaysia) menjadikan penduduk Aji Kuning sejak awal sudah banyak melakukan interaksi sosial-ekonomi dengan masyarakat Malaysia. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga setempat, sebagian besar warga Aji Kuning lahir di Tawau, Malaysia, dan atau pernah bekerja di Malaysia sehingga banyak yang mempunyai kerabat di sana dan kerap melakukan kunjungan.¹⁰ Tidak mengherankan jika sebagian warganya mempunyai identitas ganda, yaitu warga Indonesia dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan mempunyai *My Card* atau *Identity Card* (IC) Malaysia. Berdasarkan jumlah kunjungan penduduk Sebatik di kedua negara, secara sosial-budaya, antara warga Aji Kuning dan Tawau, Sebatik Malaysia, hampir tidak ada batas. Ada sebagian warga yang mendirikan rumah di wilayah Sebatik Malaysia, begitu juga sebaliknya. Bahkan, seorang warga Sebatik Malaysia yang sempat kami wawancarai kerap mengunjungi Aji Kuning dan Tarakan untuk membeli keperluan maupun kunjungan keluarga.¹¹

Jaraknya yang dekat dengan Kota Tawau, Sabah, Malaysia, dan hanya memakan waktu tempuh 15–20 menit menggunakan perahu motor (*speedboat*) menjadikan mobilitas dan interaksi masyarakat antarkedua negara sangat tinggi. Dari segi ekonomi, banyak komoditas hasil pertanian, seperti kelapa sawit, pisang, dan kakao, serta ikan segar hasil tangkapan nelayan yang dijual ke Tawau, Malaysia.

¹⁰ S, warga Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah, Wawancara di Sebatik Tengah, 12 Juni 2016.

¹¹ N, warga Sabah, Wawancara di Sebatik Malaysia, 11 Juni 2016.

Sementara itu, pedagang di Tawau menjual sejumlah barang kebutuhan pokok yang banyak dibeli warga Sebatik, seperti beras, gula pasir, terigu, susu, minyak goreng, tabung gas, dan sebagainya. Selain karena keterbatasan pasokan dari Indonesia, komoditas kebutuhan pokok dari Malaysia sangat diminati warga karena harga cukup murah dan kualitasnya tidak jauh berbeda dengan barang dari Indonesia.

Meski potensi alam berlimpah serta hubungan sosial yang kuat, perekonomian warga wilayah Sebatik Indonesia masih sangat bergantung pada negara tetangga, Malaysia. Di satu sisi, hal ini sangat merugikan. Pasalnya, ketergantungan pada negara lain dan minimnya ketersediaan barang akan memengaruhi kondisi ketahanan sosial masyarakat di wilayah Sebatik. Bahkan, tidak mustahil akan menggerus rasa nasionalisme warga dan pada akhirnya mengakibatkan disintegrasi bangsa. Berdasarkan pengamatan tim peneliti, banyak warga Sebatik yang memilih menjadi warga negara Malaysia—atau sekadar bekerja di Malaysia—karena kelebihan fasilitas yang disediakan Pemerintah Malaysia dibandingkan fasilitas di wilayah Sebatik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan aset/potensi yang ada secara optimal sehingga dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Sebatik secara keseluruhan.

B. ANALISIS KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT PULAU SEBATIK

Ketahanan sosial pada dasarnya merupakan kekuatan yang saling bersinergi satu dengan yang lainnya, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Ketahanan sosial masyarakat di suatu wilayah sangat tergantung pada aset/modal yang dimiliki dan ketahanan ini berperan signifikan dalam mengatasi berbagai macam gangguan serta kesulitan yang menerpa.¹² Peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan,

¹² Patrick Sakdapolrak, “The Concept of Social Resilience,” diakses pada 16 September 2016 dari www.transre.org.

sangatlah penting karena ketahanan sosial adalah pilar keberhasilan pembangunan nasional.

Kualitas ketahanan sosial di suatu wilayah dapat diukur dengan melihat modal/potensi yang dimiliki. Ada beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur ketahanan sosial masyarakat, di antaranya menggunakan metode yang dikemukakan Sakdaporlak, yaitu pengukuran dengan melihat potensi yang dimiliki, seperti modal alam, modal fisik (sarana dan prasarana), modal sumber daya manusia, modal finansial (keuangan), modal sosial, dan modal politik.¹³ Tim peneliti menggunakan metode ini untuk mengukur kualitas ketahanan sosial masyarakat di Pulau Sebatik.

1. Modal Alam

Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar di wilayah perbatasan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Hal itu tidak lepas dari melimpahnya potensi sumber daya alam, baik berupa hasil pertanian maupun perkebunan. Sebagian besar hasil bumi itu berupa kelapa sawit, kelapa, kakao, dan pisang.¹⁴ Potensi alam berupa hasil bumi yang melimpah disebabkan oleh tanah Pulau Sebatik yang subur serta kandungan airnya yang melimpah. Sebagaimana di daerah lainnya di wilayah Kalimantan Utara, Pulau Sebatik memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada Mei sampai Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada November sampai April. Secara umum, Pulau Sebatik bersuhu panas dengan suhu udara rata-rata 27,8°C sampai suhu tertinggi di bulan Agustus hingga mencapai 33,0°C. Curah hujan juga relatif tinggi dengan bulan basah terjadi pada Mei–Desember hingga curah hujan mencapai lebih dari 200 mm/bulan. Di Sebatik, tidak ada istilah bulan kering. Di luar bulan basah, curah hujan berkisar 100–200 mm/bu-

¹³ Patrick Sakdapolrak, “The Concept”

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Potret Usaha Pertanian Kabupaten Nunukan Menurut Subsektor* (Nunukan: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Nunukan, 2013), 53.

lan.¹⁵ Air hujan yang melimpah digunakan warga untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi dan mencuci.

Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan tanah di Sebatik sangat subur dan potensial bagi area perkebunan. Kebun sawit dan pisang terhampar luas di Sebatik dan memberikan hasil yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi warga, terutama di Sebatik Tengah. Berdasarkan sensus pertanian tahun 2013, sebagian besar sektor pertanian maupun perkebunan adalah penggerak utama ekonomi masyarakat. Sebesar 25,8 ribu meter² dijadikan warga sebagai lahan yang digunakan untuk sektor pertanian.¹⁶

Pada sektor perkebunan, kelapa sawit masih menjadi primadona di wilayah Sebatik, dengan lahan yang terus meningkat setiap tahunnya. Kini kurang lebih 1.778 (ha) lahan dijadikan warga sebagai perkebunan kelapa sawit. Hasil kelapa sawit dari Sebatik sebagian besar dijual ke Tawau dalam bentuk tandan buah segar (TBS) karena belum ada pabrik pengolahan kelapa sawit yang besar di wilayah Sebatik. Sementara itu, hasil olahan pisang yang terkenal di Sebatik adalah keripik pisang yang umumnya disajikan dengan cara digoreng terlebih dahulu sebelum dikemas. Kendati keripik pisang hasil olahan rumah tangga usaha tani banyak diminati, para pengepul maupun pedagang di Tawau enggan membelinya. Hal ini dikarenakan tidak adanya lisensi dari Malaysia sehingga warga hanya menjual langsung berupa hasil buminya saja. Harga hasil bumi tersebut fluktuatif, tergantung kondisi pertukaran uang di Malaysia.¹⁷

Adapun yang menjadi persoalan adalah masih kurangnya posisi tawar dengan pembeli di negara tetangga. Petani maupun pedagang

¹⁵ Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, "Pulau Sebatik," diakses pada 30 November dari http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/297.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Potret Usaha*, 18.

¹⁷ A, Pedagang di Desa Aji Kuning, Wawancara di Kecamatan Sebatik Tengah, 13 Juni 2016.

di Sebatik tidak dapat menentukan harga. Harga lebih dipengaruhi oleh pertukaran ringgit Malaysia. Menurut pedagang di Sebatik, jika suatu komoditas sudah tidak diminati oleh konsumen di Malaysia, secara otomatis permintaan barang akan menurun. Hal ini mengakibatkan petani lebih memilih untuk membuka ladang atau kebun baru.¹⁸

Selain dari sektor perkebunan dan pertanian, potensi sumber daya laut di wilayah perairan Sebatik merupakan modal alam yang besar dan perlu dikembangkan lebih optimal. Berdasarkan data BPS, produksi perikanan di seluruh wilayah Sebatik mencapai 3.314,55 ton/tahun dengan nilai produksi perikanan mencapai 65 miliar/tahun.¹⁹ Dengan potensi laut yang melimpah, perairan Sebatik masuk dalam kategori Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) IV Selat Makasar dan Laut Arafuru serta WPP VII laut Sulawesi dan Samudra Pasifik. Perairan Sebatik diperkirakan mempunyai potensi yang sangat besar untuk perikanan tangkap, udang, dan ikan pelagis.²⁰

Wilayah Pulau Sebatik yang dikelilingi laut seharusnya bisa menjadikan hasil laut sebagai sumber penghasilan yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakatnya. Namun, fasilitas yang terbatas, baik itu ketersediaan alat maupun tempat penampungan ikan, membuat nelayan Sebatik kalah bersaing dengan nelayan negara tetangga yang jauh lebih maju dan hasil tangkapan ikannya lebih sedikit. Akibatnya, sebagian nelayan Sebatik mencari peralatan dan modal dari pengusaha Malaysia dengan konsekuensi harus menjual hasil tangkapannya kepada mereka. Itulah yang menyebabkan harga ikan di Sebatik Tengah (selama pengamatan) sedikit lebih mahal dibandingkan harga komoditas lainnya. Seharusnya dua potensi inilah

¹⁸ A, Pedagang di Desa Aji Kuning, Wawancara di Kecamatan Sebatik, 13 Juni 2016.

¹⁹ Data tersebut diolah dari Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik dalam Angka 2015, Kecamatan Sebatik Barat dalam Angka 2015, Kecamatan Sebatik Tengah dalam Angka 2015, Kecamatan Sebatik Timur dalam Angka 2015, dan Kecamatan Sebatik Utara dalam Angka 2015* (Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015).

²⁰ Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, "Pulau Sebatik"

yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sebatik.

Meski sumber daya laut di Sebatik melimpah, ketersediaan infrastruktur untuk penangkapan dan pengelolaan ikan masih sangat terbatas dan menjadi persoalan dalam meningkatkan potensi sumber daya laut di Sebatik. Banyak nelayan yang menjual hasil tangkapan ikannya ke Tawau karena harganya yang tinggi dan supaya tidak ada ikan yang tersisa hingga membusuk. Selain itu, jarak yang jauh serta belum adanya pelabuhan berstandar nasional menjadi kendala bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan ke Kabupaten Nunukan.

Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong warga Sebatik menjual hasil bumi dan ikan ke Tawau, Malaysia. *Pertama*, aktivitas ini sudah dilakukan turun-temurun. *Kedua*, masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan ekonomi daripada urusan politik. Menurut penuturan warga, ketika terjadi sengketa Ambalat yang sempat memicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, warga Sebatik yang ada di Aji Kuning dan sekitarnya serta warga Tawau tidak terpengaruh dengan kondisi politik. Aktivitas perdagangan lintas batas pun masih terus berlangsung. Tampaknya sudah menjadi karakter warga di perbatasan Sebatik untuk mengutamakan kesejahteraannya dibandingkan politik. *Ketiga*, jarak tempuh antara Aji Kuning dan Tawau cukup dekat sehingga relatif lebih murah membeli kebutuhan di Tawau daripada di Kabupaten Nunukan.

Sementara itu, ketersediaan air bersih yang bersumber dari air hujan memang sudah mencukupi karena intensitas hujan yang tinggi. Namun, kondisi tanah yang berbukit dan kandungan air tanah yang kurang baik menjadikan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan warga sangat terbatas. Sudah lama warga Sebatik mendambakan air hasil sulungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Berdasarkan pengamatan, banyak warga hanya mengandalkan air hujan untuk

mandi dan mencuci.²¹ Namun, air hujan kurang bagus untuk kebutuhan memasak dan minum. Saat ketersediaan air bersih menipis, warga mengandalkan air galon untuk minum dan memasak. Hal ini menjadi persoalan yang perlu dicari solusinya. Sejak 2011, sebenarnya sudah ada upaya pemerintah membuat bendungan sebagai tempat penyulingan air laut menjadi air tawar yang bisa dikonsumsi. Namun, karena beberapa persoalan, sampai saat ini upaya tersebut belum dapat terealisasi.

2. Modal Fisik

Kondisi infrastruktur di wilayah Sebatik saat ini relatif baru berkembang, bahkan dapat dikatakan tertinggal dibandingkan wilayah lainnya, baik Kabupaten Nunukan maupun Tawau, Sabah, Malaysia. Hal tersebut tidak lepas dari minimnya sarana dan prasarana penunjang, seperti fasilitas kesehatan, sarana transportasi, dan pendidikan.

Kondisi ini jelas merugikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana telah dijelaskan, ketergantungan terhadap negara lain dapat mengikis rasa nasionalisme. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan hidupnya daripada membela negara dan memperjuangkan nasionalismenya. Jika suatu saat kondisi ekonomi Malaysia berada pada level kurang baik, bukan tidak mungkin daerah Sebatik akan terkena imbasnya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dinanti dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang belum memadai di wilayah Sebatik.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjang kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Saat ini, Sebatik hanya memiliki satu unit Puskesmas Induk dan 49 unit Posyandu.²² Selain itu, di Sebatik belum terdapat rumah sakit yang

²¹ Hasil pengamatan penulis selama penelitian lapangan di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, pada 11–16 Juni 2016.

²² Data tersebut diolah dari Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik, Kecamatan*

dapat menampung pasien rawat inap. Warga yang sakit harus dirujuk ke rumah sakit di Nunukan atau di Tawau yang fasilitasnya jauh lebih baik. Warga Sebatik bisa berobat di rumah sakit di Malaysia dengan syarat mempunyai kerabat yang dapat menjamin pasien selama berobat di rumah sakit tersebut. Akibatnya, banyak warga Sebatik yang memilih untuk berobat di Tawau, Malaysia, daripada ke puskesmas atau ke rumah sakit Nunukan yang jaraknya lebih jauh.²³ Minimnya fasilitas pelayanan kesehatan ditambah jumlah dokter dan tenaga medis yang belum memadai, jelas dapat menghambat warga yang akan berobat, terlebih jika ada anggota keluarga yang sakit parah dan perlu mendapatkan pengobatan secara intensif.

Dalam bidang pendidikan, ketersediaan guru di Sebatik masih belum memadai, terutama untuk jenjang sekolah tingkat lanjutan. Untuk jumlah guru SD di seluruh wilayah Sebatik mencapai 201 orang guru dengan jumlah murid sebanyak 3,699 orang siswa (rasio guru: murid rata-rata di tiap kecamatan sebesar 1: 15). Untuk tingkat SLTP, jumlah guru mencapai 117 orang guru dengan jumlah murid sebanyak 1,687 orang siswa (rasio guru: murid rata-rata mencapai 1: 17). Jumlah guru tingkat SLTA mencapai 741 orang guru dengan jumlah murid mencapai 1,398 orang siswa (rasio guru: murid rata-rata mencapai 1: 20).²⁴

Dalam bidang transportasi, sarana transportasi di wilayah Sebatik masih kurang memadai meski jalan sudah relatif bagus. Kapal yang digunakan kebanyakan masih belum memenuhi standar. Belum adanya akses pesawat langsung menuju Sebatik juga menjadi persoalan yang perlu dicari solusinya. Minimnya akses transportasi tersebut berdampak pada terbatasnya mobilisasi warga antardesa/kecamatan,

Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur, dan Kecamatan Sebatik Utara (Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015).

²³ S, warga Desa Aji Kuning, Wawancara di Kecamatan Sebatik Tengah, 12 Juni 2016.

²⁴ Data tersebut diolah dari Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur, dan Kecamatan Sebatik Utara* (Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015).

termasuk masalah pengangkutan hasil pertanian. Hal ini mengakibatkan kurang menyatunya warga Sebatik dengan wilayah lainnya dalam satu kabupaten. Sarana angkutan umum di Sebatik jumlahnya terbatas dengan biaya (ongkos) yang mahal, terutama jika hendak ke Kabupaten Nunukan melalui Bambangan. Dari seluruh wilayah Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Utara yang armada transportasinya relatif memadai dengan jumlah kendaraan mencapai 152 unit serta dua dermaga perintis di Kecamatan Sebatik Barat yang masih beroperasi.²⁵ Tantangan bagi pemerintah adalah menciptakan sarana transportasi yang murah dan mudah dijangkau masyarakat.

Infrastruktur di Sebatik saat ini sudah memadai dengan adanya jalan yang beraspal dan sejumlah kapal *speedboat* untuk mengangkut hasil bumi. Namun, masih banyak pedagang di sana yang menjual hasil buminya ke Tawau, baik secara resmi maupun ilegal. Sebagian warga merasa keberatan dengan ditutupnya pos lintas batas di Sei Nyamuk karena biaya transportasi yang mahal dan waktu tempuh ke Nunukan melalui Bambangan jauh dan tidak efisien. Oleh karena itu, banyak warga Sebatik yang tidak mengurus PLB (dalam arti ilegal) ketika hendak melakukan aktivitas perdagangan maupun kunjungan lintas batas ke Malaysia. Hal ini menjadi problem manakala mereka berhadapan dengan askar Malaysia yang mengontrol keluar-masuk orang dan barang di wilayah perbatasan Malaysia.

3. Modal Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di Sebatik. Potensi ini berupa kualitas dan kuantitas sosial masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk berbagai aktivitas lembaga sosial maupun individu, seperti tersedianya pos pelayanan kesehatan terpadu (Posyandu) yang beranggotakan ibu rumah tangga yang mempunyai anak balita. Di wilayah Sebatik,

²⁵ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Barat* (Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015).

khususnya di Kecamatan Sebatik Tengah, aktivitas Posyandu berjalan cukup dinamis. Posyandu yang letaknya strategis—dekat dengan pemukiman—memudahkan warga untuk datang. Masalahnya, fasilitas atau sarana pendukung, seperti obat-obatan dan alat kesehatan lainnya, masih terbatas. Dengan terbatasnya fasilitas dan sarana pendukung kesehatan, tingkat kematian cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 137 jiwa setiap tahunnya.

Dari segi pendidikan, kondisi SDM relatif masih rendah. Sebagian besar masyarakat Sebatik hanya berpendidikan SD sampai SLTP. Kurangnya taraf pendidikan masyarakat Sebatik tidak lepas dari keterbatasan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti fasilitas pendidikan maupun tenaga pengajar, terutama di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Utara. Jumlah penduduk di atas umur 15 tahun atau lulus SD yang kemudian bekerja mengalami peningkatan hingga mencapai 37,52% dan pada 2014 hanya 1% saja yang dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, penduduk di tingkat SLTA yang bekerja sebesar 20,29%, lebih besar dibandingkan yang melanjutkan kuliah ke jenjang perguruan sebesar 0,74%.²⁶

Jumlah sekolah untuk jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Sebatik masih belum memadai. Sekolah dasar (SD) di Kecamatan Sebatik hanya ada 21 sekolah negeri dan delapan sekolah swasta.²⁷ Untuk jenjang SLTP, baru ada tujuh sekolah negeri dan empat sekolah swasta. Untuk jenjang SLTA, ada empat sekolah negeri dan swasta serta satu sekolah SMK.²⁸ Kondisi ini menyebabkan banyak anak usia sekolah yang belum dapat melanjutkan pendidikan

²⁶ Data tersebut diolah dari Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur, dan Kecamatan Sebatik Utara* (Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015).

²⁷ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik*

²⁸ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik*

sampai tingkat yang lebih tinggi, terlebih jika jarak sekolah yang jauh dan sarana transportasi yang terbatas.

Tabel 3.2 Jumlah Sekolah Tingkat SD sampai Tingkat SLTA di Wilayah Sebatik²⁹

Kecamatan	Jumlah SD		Jumlah SLTP		Jumlah SLTA	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sebatik Barat	6	2	2	0	0	0
Sebatik	2	1	2	1	1	0
Sebatik Timur	4	4	0	2	0	1
Sebatik Tengah	6	0	2	0	1	0
Sebatik Utara	2	1	1	1	0	1
Jumlah	20	8	7	4	2	2

4. Modal Ekonomi dan Keuangan

Secara umum, penghasilan utama masyarakat Sebatik diperoleh dari hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Tidak mengherankan jika dalam beberapa tahun terakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku di Kabupaten Nunukan—termasuk Sebatik dari sektor pertanian dan perikanan—tahun 2014 mencapai 20,10% atau Rp18.705.300 per tahun atau Rp1.558.775 per bulan dari total PDRB per kapita di Nunukan sebesar Rp93.045.780 per tahun atau Rp7.753.815 per bulan.³⁰

Pendapatan penduduk tersebut diperoleh dari penjualan hasil bumi, seperti kelapa sawit, kakao, pisang, juga hasil tangkapan ikan yang dijual di pasar tradisional tidak jauh dari pemukiman warga. Pedagang di pasar tersebut sebagian adalah warga sekitar atau warga Nunukan yang juga berjualan di Tawau, Malaysia. Selain melakukan aktivitas jual-beli di pasar, ekonomi masyarakat juga tumbuh melalui aktivitas perdagangan lintas batas. Produknya berupa hasil bumi dan hasil tangkapan ikan. Dari hasil jual-beli ini, masyarakat Sebatik

²⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2014

³⁰ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik*

memiliki modal untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, baik untuk dijual kembali di pasar tradisional maupun untuk dikonsumsi sehari-hari.

Kebutuhan akan sayuran, buah-buahan, dan lauk-pauk (misalnya ikan, tempe, dan tahu) didapat dari pedagang sayur yang berkeliling ke rumah warga menjajakan dagangannya. Kebutuhan pokok lainnya diperoleh dari warung-warung yang ada di sekitarnya. Warga Sebatik Indonesia banyak yang membeli sejumlah bahan komoditas, seperti beras, minyak, biskuit, minuman dan air mineral, gas, dan BBM dari Tawau, Malaysia. Bahan komoditas itu lalu dijual kembali di Sebatik. Menurut warga, harganya lebih murah dan kualitasnya jauh lebih bagus daripada produk Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika 90% komoditas barang kebutuhan pokok di Sebatik, terutama di Aji Kuning, berasal dari Malaysia.

Harga barang kebutuhan pokok (sembako) di Sebatik tidak jauh berbeda dengan di negeri tetangga (Malaysia). Untuk barang kebutuhan pokok yang disubsidi, seperti gas, beras, terigu, gula pasir, dan minyak tanah, harganya pun relatif murah. Hal itu sesuai dengan pernyataan salah seorang pedagang di Sebatik Tengah bahwa harga kebutuhan pokok, seperti beras, tepung, gula, dan minyak goreng, jauh lebih murah dibandingkan harga di Nunukan. Harga gula, misalnya, dipatok sebesar 70 RM/pak dengan berat sekitar 10–12 kg.³¹ Kendati harga murah, bukan berarti pedagang dapat seenaknya membeli dagangan tanpa kuota. Ada batasan jumlah barang yang boleh dibeli, yaitu tidak lebih dari 2,5 kg/barang untuk sembako.

Sektor pertanian dan perkebunan di Sebatik sangatlah potensial untuk dikembangkan. Sebagian besar wilayah Sebatik, terutama Sebatik Tengah, digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Dalam bercocok tanam, warga Sebatik masih mengandalkan peralatan tradisional. Namun, jumlah produksi yang dihasilkan cenderung

³¹ AN, pegawai BPS Kabupaten Nunukan, Wawancara di Nunukan, 13 Juni 2016.

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saat ini, perkebunan kelapa sawit (yang tumbuh dengan pesat) masih menjadi sumber penghasilan utama masyarakat Sebatik. Luas area perkebunan kelapa sawit di Sebatik mencapai 1.778 ha dengan produksi per tahun mencapai 6.000 ton.³² Sebagian besar hasil panen kelapa sawit dijual ke Tawau, Malaysia, yang sudah lebih unggul dalam pengelolaan dan produksi minyak kelapa sawit.

Selain sektor perkebunan, penghasilan masyarakat juga didapatkan dari hasil penangkapan ikan secara tradisional. Sebagian nelayan mencari peralatan dan modal dari pengusaha Malaysia untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Rata-rata hasil tangkapan ikan nelayan Sebatik bisa mencapai 203,5 ton/bulan dan produksi rata-rata per bulan mencapai 2.446 ton.³³ Sebagian besar hasil tangkapan ikan warga dijual ke Malaysia. Alasannya, harga yang lebih tinggi dan jarak yang lebih dekat dibandingkan menjual ke Kabupaten Nunukan. Biaya mahal dan belum tersedianya sarana penyimpanan untuk menjaga kesegaran ikan (*cold storage*) juga menjadi alasan mereka lebih memilih menjual ke Malaysia. Jadi, keterbatasan infrastruktur, minimnya alat transportasi (alat angkut), dan ketiadaan fasilitas penampungan ikan segar masih menjadi kendala para nelayan Sebatik. Selain itu, jumlah fasilitas pendukung ekonomi warga, seperti bank atau lembaga keuangan, juga masih sangat terbatas. Di Kecamatan Sebatik belum ada bank, namun sudah ada empat koperasi non-KUD dan empat koperasi primer yang membantu perekonomian warga. Sementara itu, di Kecamatan Sebatik Barat, aktivitas perekonomian mulai menggeliat dengan dibukanya dua bank umum dan 14 koperasi non-KUD. Di Sebatik Tengah, sudah ada sejumlah bank, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan sejumlah KUD dan koperasi non-KUD.³⁴

³² Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik*.

³³ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik*.

³⁴ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik*.

Aktivitas transaksi keuangan masyarakat Sebatik lebih banyak terjadi di wilayah Malaysia. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya aktivitas perdagangan lintas batas warga Sebatik. Jaraknya yang dekat—hanya memakan waktu 10–20 menit perjalanan menggunakan *speed boat*—menjadikan banyak pedagang di Sebatik yang memilih menjual barang dagangannya ke Tawau. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap transaksi ekonomi di tengah masyarakat. Mayoritas warga lebih terbiasa menggunakan mata uang ringgit dibandingkan rupiah. Baik di pasar tradisional maupun tempat perbelanjaan, ringgit menjadi mata uang yang paling banyak digunakan dan menjadi alat tukar utama terutama dalam bertransaksi. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya barang produksi Malaysia yang beredar dan digunakan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga, barang produk Malaysia diminati karena harganya yang murah dan mudah didapat.³⁵

Pada akhirnya, wilayah Sebatik Indonesia menjadi tempat penampungan barang-barang produksi Malaysia, seperti beras, gula, minyak goreng, terigu, susu, dan gas LPG (umumnya disebut gas elpiji). Sementara itu, Tawau menjadi tempat menampung hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan yang merupakan produk andalan masyarakat Sebatik. Dari sini dapat dilihat betapa besar keuntungan dari hasil transaksi perdagangan lintas batas masyarakat Pulau Sebatik.

Maraknya aktivitas perdagangan lintas batas memang menguntungkan karena mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga. Namun, hal itu bisa merugikan karena aktivitas ilegal, misalnya pencurian ikan, penebangan liar, perdagangan manusia, migrasi ilegal, peredaran narkoba, terorisme, dan perdagangan senjata pun meningkat. Kondisi ini jelas akan menghambat pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya wilayah Sebatik. Selain itu, kondisi ini juga

³⁵ NA, Warga Desa Aji Kuning, Wawancara di Kecamatan Sebatik Tengah, 12 Juni 2016.

dapat mengurangi potensi ekonomi Sebatik yang dari segi ketersediaan barang sangat bergantung pada Malaysia.

Di satu sisi, adanya aktivitas lintas batas dan ketergantungan terhadap Malaysia dapat meningkatkan perekonomian warga. Di sisi lain, hal itu bisa menjadi persoalan yang mengancam ketahanan sosial masyarakat Sebatik. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sehingga masyarakat tidak terlalu bergantung pada negara tetangga.

5. Modal Sosial

Secara demografis, jumlah penduduk di wilayah Sebatik Indonesia sangat potensial jika dibandingkan wilayah perbatasan lainnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nunukan tahun 2015, penduduk Sebatik secara keseluruhan berjumlah 40.645 jiwa yang tersebar di lima kecamatan. Sebagian besar penduduknya adalah perantau dari Bugis, Jawa, dan Flores (NTT).³⁶

Suku asli Sebatik adalah Suku Tidung yang sebagian besarnya beragama Islam. Adat istiadat dan budaya masyarakat Sebatik sangat dipengaruhi oleh budaya Bugis dalam berbagai segi kehidupan masyarakatnya. Meski terdapat beragam suku, masyarakat Sebatik hidup dalam suasana yang harmonis dan penuh kekeluargaan. Kondisi ini menjadi modal utama dalam meningkatkan dan mempertahankan ketahanan sosial masyarakat di wilayah Sebatik.

Sebelum ditempati para perantau, Sebatik merupakan wilayah hutan primer lebat yang jarang penduduknya. Kondisi tanah yang subur karena intensitas curah hujan yang tinggi, ditambah permukaan tanahnya yang berbukit, dan penduduknya yang masih jarang, membuat Sebatik menjadi wilayah yang potensial bagi para perantau

³⁶ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik*.

Bugis.³⁷Banyak perantau membeli tanah dan membuka lahan baru untuk bermukim dan berdagang hasil bumi serta ikan. Seiring berjalannya waktu, aktivitas perdagangan semakin marak, terutama dengan terbentuknya negara modern dan berlangsungnya aktivitas lintas batas di kedua negara.

Jarak yang dekat dengan negara tetangga (Malaysia) mendorong interaksi lintas batas masyarakat semakin kuat dan meningkatkan segi kehidupan sosial dan ekonomi kedua negara. Para petani di wilayah Sebatik Indonesia menjual hasil bumi berupa kelapa sawit, pisang, kakao, serta ikan ke Tawau, Malaysia. Begitu juga sebaliknya, para pebisnis di Tawau menjual barang kebutuhan pokok, seperti beras, terigu, minyak goreng, gula pasir, sampai gas elpiji yang kebanyakan adalah barang yang disubsidi Pemerintah Malaysia.³⁸

Aktivitas perdagangan lintas batas yang terjalin sejak lama mendorong terjalinnya ikatan emosional antarwarga kedua negara. Pada akhirnya, interaksi sosial antarwarga kedua negara jadi membudaya dan turun-temurun hingga saat ini. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, banyak anggota keluarga dan tokoh masyarakat yang melakukan kunjungan kekeluargaan ke Tawau. Tujuannya ada yang sekadar bersilaturahmi dengan kerabat, ada pula yang menghadiri upacara peringatan kenegaraan ataupun festival budaya kedua negara.³⁹ Mereka saling membantu dan bekerja sama ketika ada hajatan keluarga, upacara, dan festival budaya antarkedua wilayah.

Untuk mempermudah aksesibilitas lintas batas, baik untuk kunjungan maupun perdagangan, kedua negara memberlakukan pas lintas batas yang telah disepakati dalam *Border Crossing Agreement* (BCA) pada 1970. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 yang mengatur jenis dan jumlah

³⁷ Setiawan, Bandiyono, Sudiyo, dan Soekarni, *Kompleksitas Pembangunan*.

³⁸ S, Warga Desa Aji Kuning, Wawancara di Kecamatan Sebatik Tengah, 12 Juni 2016.

³⁹ S, Warga Desa Aji Kuning, Wawancara di Kecamatan Sebatik Tengah, 12 Juni 2016.

barang, pelintas batas, barang bawaan, hingga transportasi yang digunakan. Peraturan ini juga menetapkan kuota lintas batas sebesar 600.00 ringgit pada setiap perahu untuk setiap *trip* per orang dalam jangka waktu satu bulan. Para pelintas batas yang hendak berkunjung atau berdagang ke Tawau harus mempunyai kartu lintas batas (KLB) yang dapat diurus di kantor pas lintas batas di Sei Nyamuk. Namun, sejak PLB di Sei Nyamuk ditutup dan dialihkan ke Kabupaten Nunukan, banyak warga yang memilih untuk melintas batas secara ilegal. Jarak yang jauh serta moda transportasi yang terbatas menjadi alasan warga tidak mengurus KLB di Nunukan. Pada akhirnya, para pelintas batas memilih menyeberang secara ilegal melalui jalur tikus di Sei Pancang atau di sekitar wilayah Desa Aji Kuning yang berbatasan langsung dengan wilayah Sabah, Malaysia. Warga juga menggunakan jaringan kerabat di Tawau yang mempunyai *Identity Card* (IC) Malaysia yang dapat digunakan untuk aktivitas lintas batas. Bahkan, ada yang mempunyai kewarganegaraan ganda dengan tujuan mempermudah akses masuk ke dua negara.

Melihat fenomena tersebut, tampaknya aktivitas lintas batas yang kuat disebabkan oleh adanya saling ketergantungan antarkedua belah pihak yang sudah terjadi sejak lama. Dari sisi Sebatik Indonesia, masih belum optimalnya pembangunan serta keterbatasan suplai kebutuhan pokok menjadi penyebab semakin besarnya ketergantungan masyarakat Sebatik pada produk luar. Dari sisi Malaysia, mereka juga memerlukan suplai bahan baku, seperti pisang, kelapa sawit, dan ikan untuk industri.

Selain hubungan sosial yang bersifat eksternal, hubungan sosial yang bersifat internal juga terjalin cukup baik. Kegiatan PKK dan kelompok karang taruna/pemuda menjadi media interaksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Sebatik, misalnya menyelenggarakan pertandingan olahraga dan seni (Porseni) secara gotong royong dan membangun usaha ekonomi produktif secara bersama-sama. Di samping itu, kelompok tani dan majelis taklim

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjadi sarana yang efektif dalam mempererat ikatan sosial di antara warga.⁴⁰

6. Modal Politik

Wilayah Sebatik Indonesia pada mulanya merupakan salah satu dari lima kecamatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada 2006, Kecamatan Sebatik dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat. Pada 2011, seiring dengan era otonomi daerah, wilayah Sebatik dimekarkan menjadi lima kecamatan, yang meliputi Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah.⁴¹ Secara keseluruhan, wilayah Sebatik memiliki luas sekitar 246,61 km².

Jumlah pegawai di instansi pemerintah relatif sedikit dan tidak memadai jika dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Di Sebatik Tengah, misalnya, jumlah pegawai di kecamatan, baik PNS maupun non-PNS, mencapai 64 orang dengan jumlah instansi yang masih terbatas.⁴² Sebatik Tengah adalah kecamatan yang memiliki banyak “jalur tikus” dan bersinggungan langsung dengan negara tetangga. Wilayah ini mempunyai panjang perbatasan mencapai 47.71 km dan dilalui oleh sembilan patok dari 18 patok perbatasan, mulai dari patok tiga di Desa Aji Kuning hingga patok sebelas di Desa Sungai Limo.⁴³ Untuk mendukung terciptanya suasana politik dan keamanan yang stabil di daerah perbatasan Sebatik, terdapat beberapa unit kerja yang menangani sejumlah bidang, seperti Pamtas, pos marinir, maupun pos TNI AL yang menjaga pertahanan dan keamanan sepanjang wilayah perbatasan.

⁴⁰ H, Camat Sebatik Tengah, Wawancara di Sebatik Tengah, 12 Juni 2016.

⁴¹ Media informasi Kantor Kecamatan Sebatik Tengah.

⁴² Media informasi Kantor Kecamatan Sebatik Tengah.

⁴³ Media informasi Kantor Kecamatan Sebatik Tengah.

Di samping mengoptimalkan unit kerja yang ada, pemerintah juga perlu memperbaiki sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik di Sebatik, termasuk masalah pengamanan perbatasan. Saat ini, pengamanan wilayah perbatasan masih terkendala sejumlah persoalan, di antaranya jumlah personel yang masih terbatas di Pamtas dan pos AL serta masih kurangnya sarana infrastruktur operasi di lapangan, khususnya dalam menjaga wilayah dari pelanggaran hukum internasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk mengatasi berbagai masalah perbatasan yang semakin kompleks.

Untuk meningkatkan pembangunan dan pengelolaan potensi di Sebatik, pemerintah pusat memberikan berbagai bantuan, misalnya bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp100 miliar untuk pengembangan sumber daya perikanan di Sebatik. Bantuan tersebut untuk membangun sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan, misalnya membangun *cold storage*, *solar packed dealer* nelayan, perlindungan abrasi pantai, dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut, hasil tangkapan ikan nelayan Sebatik memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat dikelola dengan baik di Sebatik. Pemberian bantuan untuk peningkatan infrastruktur secara intens dilakukan pemerintah pusat, yaitu dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan Sebatik yang sejak lama mengalami banyak kendala dan tantangan. Bantuan pemerintah tersebut mendorong wilayah Sebatik menjadi daerah otonomi baru yang proses pembangunannya dapat terus berlanjut dan saling sinergi antarkecamatan di wilayah Sebatik.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 3.3 Indikator Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau Sebatik

No.	Modal Ketahanan Sosial	Variabel	Indikator	Bobot (+ atau -)
1.	Alam	Iklim	lamanya musim teduh	(+)
			lamanya musim penghujan	(+)
		Sumber Daya Laut	potensi ikan	(+)
			tingkat produksi ikan	(+)
		Sumber Daya Pertanian	kesuburan tanah	(+)
			kepemilikan lahan/kebun/sawah	(+)
		Air	ketersediaan air bersih	(-)
akses terhadap air bersih	(-)			
2.	Fisik	Transportasi	Kapal/kendaraan	(+)
			Frekuensi	(+)
		Fasilitas Kesehatan	Keterjangkauan	(-)
			Puskesmas	(+)
	Fasilitas Pendidikan	Rawat Inap	(-)	
		Ketersediaan Dokter	(+)	
	Fasilitas Ekonomi	Gedung Sekolah	(+)	
		SD, SMP, SMA	(+)	
	Listrik	Ketersediaan guru	Pasar	(+)
			TPI	(-)
		Listrik	Cold storage	(-)
			Listrik 24 jam	(+)
Komunikasi	Akses ke Telepon	Akses ke Listrik	(+)	
		Akses ke Telepon	(+)	
3.	Manusia	Tingkat Kesehatan	Angka harapan hidup	(+)
			Tingkat kematian bayi	(+)
		Tingkat Pendidikan	Tingkat kematian ibu	(+)
			Tingkat kelulusan	(-)
			Penduduk bekerja	(+)
4.	Sosial	Interaksi sosial	Eksistensi kelembagaan sosial	(+)
			Gotong-royong	(+)
			Pemahaman bahasa antarwilayah	(+)
			Jaringan kekerabatan	(+)
			Jumlah kunjungan	(+)
5.	Keuangan		Pendapatan Per kapita	(-)
			Akses ke bank, lembaga keuangan	(+)
			Dana pensiun	(+)
6.	Politik		Struktur Pemerintahan	(-)
			Tingkat pelayanan	(-)
			Bantuan pemerintah	(+)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Berdasarkan tabel tersebut, masyarakat Sebatik secara umum memiliki modal alam, fisik, manusia, dan sosial yang cukup baik (+). Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam setiap modal misalnya keterbatasan air bersih pada modal alam, keterbatasan sarana jalan dan rumah sakit pada modal fisik, serta tingkat pendidikan yang mayoritas masih SD dan SMP pada modal manusia. Sementara itu, modal keuangan dan politik/pemerintahan cenderung masih lemah (-), yaitu pendapatan per kapita sektor pertanian dan perikanan yang relatif rendah serta pengawasan kegiatan lintas batas ilegal yang masih belum optimal.

C. TANTANGAN PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT PULAU SEBATIK

Jika dilihat dari enam indikator pengukuran ketahanan sosial masyarakat di wilayah Sebatik yang sudah dijelaskan, tampak bahwa ketahanan sosial masyarakatnya masih belum sepenuhnya kuat, khususnya dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur (lihat Tabel 3.2).

Dari aspek transportasi, misalnya, meski menunjukkan tren positif karena adanya sejumlah sarana dan moda transportasi, jumlah unit kendaraan/kapal pengangkut serta keterjangkauan masih menjadi kendala. Fasilitas fisik lainnya, seperti gedung SD, SMP, SMA, dan fasilitas kesehatan sudah ada namun belum memadai. Untuk keperluan rawat inap, warga harus pergi ke Kabupaten atau Tawau. Hal ini menunjukkan masih rentannya ketahanan sosial masyarakat Sebatik, terutama dalam modal sumber daya manusia dan infrastruktur.

Kekuatan Sebatik tampak dari modal sosialnya. Hal ini ditandai dengan adanya interaksi sosial yang kuat, keberadaan kelembagaan sosial internal, dan menggeliatnya media interaksi, seperti aktivitas gotong royong antarwarga Sebatik. Interaksi sosial, baik antarwarga maupun dengan penduduk Sebatik Malaysia, dapat mendorong perekonomian dan keharmonisan warga. Hal tersebut dapat dilihat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dari intensitas kunjungan warga dari kedua negara, baik untuk aktivitas perdagangan maupun kunjungan kekerabatan. Semakin maraknya kunjungan antarwarga dari kedua negara, hubungan warga di wilayah Sebatik pun semakin baik.

Infrastruktur dan fasilitas perekonomian Sebatik memang masih terbatas. Hal ini tidak lepas dari pengelolaan potensi-potensi pendukung lainnya yang belum dikembangkan secara optimal. Misalnya, kekuatan hubungan sosial masyarakat Sebatik Indonesia dan Malaysia, serta potensi sumber daya alam Sebatik yang melimpah, baik perkebunan, pertanian, kelautan, maupun pertambangan. Hasil pengamatan di lapangan dan diskusi dengan berbagai pihak menunjukkan masih tidak ada sinergi kebijakan pembangunan di wilayah Sebatik. Koordinasi antarlembaga maupun institusi tidak berjalan seiring sehingga pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan Sebatik masih belum optimal.

Tidak sinerginya koordinasi antarinstansi dan lembaga dalam pengelolaan perbatasan tidak lepas dari paradigma lama dalam pembangunan wilayah perbatasan yang menganggap wilayah perbatasan sebagai daerah pertahanan yang terisolir dan bagian belakang dalam pembangunan nasional. Paradigma ini jelas mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan jauh tertinggal dibandingkan daerah lainnya.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, misalnya, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur. Namun, sampai saat ini, penduduk di wilayah Sebatik masih kesulitan dalam hal sarana dan prasarana, baik darat, laut, maupun udara. Hal ini jelas dapat menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat. Sarana transportasi dan infrastruktur yang belum memadai mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk melakukan aktivitas perdagangan dengan wilayah terdekat dengan biaya yang murah. Sarana dan prasarana penunjang aktivitas perdagangan lintas batas

inilah yang seharusnya ditingkatkan sebagai strategi meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di perbatasan.

Selain mengoptimalkan modal/aset potensial dalam negeri lainnya, kerja sama antarnegara dalam aktivitas lintas batas perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi guna memacu perekonomian masyarakat di perbatasan. Tanpa perhatian pemerintah, terutama dalam pengelolaan wilayah perbatasan melalui penguatan kerja sama lintas batas, dikhawatirkan timbul kerentanan dalam hal ketahanan sosial masyarakat di tengah era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sekarang ini.

Dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat masih diliputi beragam persoalan. Minimnya infrastruktur dan belum adanya evaluasi terkait kerja sama lintas batas kedua negara menjadi pemicu maraknya aktivitas ilegal yang datang dari luar.

Keterbatasan infrastruktur pengamanan wilayah perbatasan juga menjadi pemicu banyaknya nelayan Malaysia menangkap ikan dengan perahu besar di perairan Sebatik. Selain itu, peredaran narkoba dan senjata ilegal juga marak terjadi di sepanjang jalur tikus perbatasan, terutama di Desa Aji Kuning yang berbatasan langsung dengan wilayah Sabah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan kerja sama lintas batas yang sudah disepakati sebelumnya dalam *Border Trade Agreement* (BTA) tahun 1970.

Tujuan kerja sama ini untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal perdagangan lintas batas dan menekan aktivitas ilegal yang semakin marak di perbatasan kedua negara. Dalam kerja sama ini disepakati jumlah barang, pelintas batas, transportasi yang digunakan, dan kuota lintas batas sebesar 600 ringgit untuk setiap perahu yang hendak melintas dengan jangka waktu satu bulan. Melalui kerja sama yang sinergi dan berkelanjutan, aktivitas ilegal seharusnya dapat ditekan, baik dari pihak Indonesia maupun Malaysia.

Kerja sama lintas batas juga diharapkan membantu meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan Sebatik, terutama dari aspek sosial dengan adanya saling keterikatan dan ketergantungan masyarakat di kedua negara. Dari segi ekonomi, optimalisasi kerja sama lintas batas diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat perbatasan melalui aktivitas perdagangan batas kedua negara sesuai hukum yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Potensi kekayaan alam yang melimpah di wilayah Sebatik tampaknya belum dioptimalkan dan dikembangkan secara menyeluruh. Akibatnya, program pembangunan belum menyentuh aspek yang potensial sehingga wilayah Sebatik Indonesia jauh tertinggal dibanding dengan wilayah Sebatik Malaysia. Minimnya moda transportasi, terbatasnya air bersih dan barang kebutuhan pokok produksi dalam negeri, kurangnya infrastruktur pendidikan serta kesehatan menjadikan perkembangan sosial dan mobilitas penduduk antarkecamatan dan kabupaten masih sangat terbatas, terutama jika dibandingkan wilayah sekitar (Nunukan, Tarakan, dan Tawau/Malaysia).

Dari segi sosial kemasyarakatan, organisasi-organisasi kemasyarakatan ruang lingkungannya sebatas gotong royong dan pembinaan keagamaan melalui majelis taklim. Kegiatannya belum mencakup aspek pemanfaatan potensi sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia. Masalah ini disebabkan oleh tingkat pendidikan warga Sebatik yang relatif rendah dan minimnya sumber dana serta akses informasi. Masih rendahnya taraf pendidikan warga Sebatik berdampak pada kurangnya SDM yang mampu bersaing dengan penduduk di negara tetangga—yang secara ekonomi relatif lebih baik.

Guna mengatasi persoalan ketahanan sosial masyarakat Sebatik, diperlukan upaya perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan wilayah perbatasan Sebatik. Selain itu, perlu langkah mengoptimalkan potensi

sumber daya alam dan meningkatkan sarana pendidikan, transportasi umum, serta memperbaiki infrastruktur, seperti pengelolaan air bersih dan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Untuk dapat melakukan hal tersebut, pemerintah dan masyarakat kedua negara sebenarnya sudah mempunyai modal besar, yaitu ekistensi kerja sama lintas batas. Namun, perjanjian-perjanjian yang mendasari kerja sama lintas batas tersebut disepakati puluhan tahun lalu sehingga perlu ada evaluasi terhadap dokumen perjanjiannya maupun pelaksanaan kerja samanya selama ini. Hal ini akan dibahas pada Bab IV.

DAFTAR ACUAN

- Abu Bakar, Mustafa. *Menata Pulau-pulau Kecil Terluar*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2006.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Nunukan dalam Angka 2016*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2016.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Sebatik dalam Angka 2015*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Sebatik Barat dalam Angka 2015*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Sebatik Tengah dalam Angka 2015*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Sebatik Timur dalam Angka 2015*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Sebatik Utara dalam Angka 2015*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Potret Usaha Pertanian Kabupaten Nunukan Menurut SubSektor*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2014.
- Puryanti, Lina, dan Sarkawi B Husain. "A People-State Negotiation in a Borderland: A Case of the Indonesia-Malaysia frontier in Sebatik Island." *Jurnal Wacana* 13, No. 1 (April 2011).
- Sakdapolrak, Patrick. "The Concept of Social Resilience." Diakses pada 16 September 2016 dari <http://www.transre.org/en/blog/what-social-resilience/>.

Setiawan, Bayu dkk. *Kompleksitas Pembangunan dan Strategi Pemberdayaan Keluarga di Perbatasan Sebatik*. Yogyakarta: Elmatara, 2012.

Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil. "Pulau Sebatik." Diakses pada 30 November 2016 dari http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/297.

WAWANCARA

Wawancara dengan AN, Kepala Badan Pusat Statistik, Kabupaten Nunukan, 13 Juni 2016.

Wawancara dengan H, Camat Sebatik Tengah, 12 Juni 2016.

Wawancara dengan K, Petugas Pos Angkatan Laut di Sei Nyamuk, 12 Juni 2016.

Wawancara dengan N, Warga Sungai Pukul, Sabah, Malaysia, 11 Juni 2016.

Wawancara dengan NA, Warga Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, 12 Juni 2016.

Wawancara dengan S, warga Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, 12 Juni 2016.

Wawancara dengan SO, Kapolsek Sei Nyamuk, 12 Juni 2016.

BAB IV

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Batas di Kepulauan Marore

Bayu Setiawan

A. SIGNIFIKANSI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA

Wilayah perbatasan makin dianggap penting seiring dengan makin besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan wilayah perbatasan, terutama aspek-aspek yang memungkinkan pelayanan lebih baik untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan menjadi salah satu upaya untuk menjadikannya wilayah yang maju seperti wilayah-wilayah lain di luar perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pengembangan wilayah perbatasan sebenarnya menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah sejak dikeluarkannya UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Pada dasarnya, program pengembangan wilayah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan meningkatkan keamanan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebagai wilayah terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Filipina, wilayah perbatasan di Kabupaten Sangihe mempunyai peran yang sangat strategis bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wilayah perbatasan ini merupakan wilayah penyangga (*safety belt*) untuk infiltrasi pengaruh-pengaruh dari negara tetangga dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan serta keamanan. Namun, wilayah perbatasan cenderung dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Keterisolasian, ketertinggalan, dan kemiskinan merupakan isu-isu yang selalu menjadi perhatian. Wilayah perbatasan seharusnya lebih diperhatikan dan lebih dipacu dalam berbagai bidang pembangunan untuk memenuhi fungsinya sebagai wilayah penyangga.

Keterisolasian dan ketertinggalan wilayah perbatasan Sangihe, khususnya Kepulauan Marore, menyebabkan hubungan wilayah tersebut dengan negara tetangga (Filipina) menjadi semakin dekat. Selain karena kedekatan geografis, kedekatan hubungan ini juga disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan dan kesamaan latar belakang sejarah penduduk di wilayah perbatasan ini. Sampai saat ini, kedekatan hubungan antarwilayah dan penduduknya masih terpelihara dengan baik. Namun, karena masing-masing merupakan negara berdaulat, tentunya hubungan antarpenduduk sudah tidak bebas seperti sebelum masing-masing negara menyatakan kemerdekaannya.

Hubungan antara penduduk di wilayah perbatasan ini menjadi sangat terbatas karena adanya berbagai peraturan yang mengatur hubungan penduduk. Peraturan-peraturan ini merupakan kesepakatan antara kedua negara. Meskipun terbatas, hubungan antarpenduduk wilayah perbatasan ini masih bisa berlangsung karena adanya berbagai kerja sama yang terangkum dalam berbagai perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Filipina. Selain secara formal, penduduk di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina selama ini telah melakukan upaya kerja sama secara informal. Berbagai cara dilakukan penduduk

kedua negara untuk dapat mempertahankan keberadaannya. Salah satunya, mengatur kerja sama hubungan lintas batas tradisional—yang juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial.

B. HUBUNGAN PENDUDUK SANGIHE DENGAN PENDUDUK FILIPINA BAGIAN SELATAN

Masyarakat Sangihe dan Filipina bagian selatan mempunyai hubungan sosial dan kekerabatan sejak berabad-abad lalu. Data dan tulisan sejarah yang ada banyak menunjukkan asal usul orang Sangihe Talaud dari wilayah utara yang juga mencakup wilayah Filipina bagian selatan. Hubungan ini menjadi alasan utama lintas batas penduduk di kedua wilayah perbatasan ini. Dari data sejarah juga dapat dijelaskan bahwa sudah terdapat interaksi antara orang-orang di Sulawesi Utara, terutama dari Minahasa, dengan orang-orang di Filipina bagian selatan. Hubungan yang terjalin, selain memberikan dampak positif, juga terkadang menimbulkan dampak negatif yang berujung pada konflik dan peperangan antarkerajaan. Selain interaksi dengan penduduk di Filipina bagian selatan, orang-orang Sangir melakukan interaksi dengan orang-orang asing lainnya untuk berdagang. Orang-orang Sangir juga melakukan perjalanan ke luar wilayahnya untuk berdagang dan belajar agama Islam (yang dikenal dengan Islam tua), terutama dari Pulau Mindanao.¹

Sebelum adanya perjanjian lintas batas antara Pemerintah Indonesia dengan Filipina dan sebelum kemerdekaan, penduduk Sangihe sudah menjalin hubungan dengan penduduk di Filipina bagian selatan, khususnya penduduk di Pulau Balut dan Saranggani. Hubungan ini terjadi karena adanya kedekatan geografis. Jarak antara Pulau Marore dengan Pulau Balut dan Saranggani kini dapat ditempuh

¹ Lihat Aswatini, ed., *Migrasi Kembali Orang-Orang Sangir-Talaud dari Pulau-pulau di Wilayah Filipina* (Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI, 1994), 17–26.

dalam waktu 3–4 jam menggunakan perahu motor (*pumpboat*). Pulau Balut dan Saranggani kelihatan dari Pulau Marore. Jarak dari Sangihe ke kedua pulau di Filipina bagian selatan ini lebih dekat dibandingkan jarak ke Tahuna (Ibu Kota Kabupaten Sangihe) yang harus ditempuh selama kurang lebih 8–9 jam. Oleh karena itu, sudah sejak lama orang-orang di sekitar Pulau Marore lebih sering pergi ke Filipina untuk berdagang ataupun bekerja. Adanya hubungan kekeluargaan, persamaan bahasa, ciri-ciri fisik, serta letak geografis yang dekat merupakan faktor penyebab mobilitas penduduk di wilayah perbatasan ini. Selain mobilitas penduduk, sudah sejak lama juga terjadi mobilitas barang, terutama barang-barang kebutuhan sehari-hari dan hasil-hasil pertanian serta perikanan.

Mobilitas penduduk pada awalnya untuk bekerja di kebun-kebun di Filipina bagian selatan. Kemudian orang-orang yang bekerja tersebut banyak yang menetap di sana. Tekanan penduduk, terbatasnya sumber daya alam, dan tekanan ekonomi lainnya mendorong penduduk Sangihe mencari lahan perkebunan dan kehidupan yang lebih baik di Filipina Selatan. Hal ini sudah berlangsung beratus-ratus tahun lamanya. Setelah kemerdekaan, orang-orang Sangihe di Pulau Balut dan Saranggani ini dianggap pelintas batas negara yang tidak sah.² Dalam perkembangannya, mobilitas penduduk Sangihe Talaud ke Filipina didasari oleh berbagai alasan, misalnya mencari pekerjaan guna memperbaiki kualitas hidup keluarga. Faktor politik yang memberikan sumbangan terhadap mobilitas penduduk ke Filipina adalah pendudukan Jepang. Faktor lain adalah keinginan menyebarkan agama Islam ke Filipina serta penyelundupan dan perdagangan yang dilakukan nelayan secara ilegal, termasuk penyelundupan orang ke wilayah Mindanao.³

² Lihat Aswatini dkk, *Mobilitas Penduduk Wilayah Perbatasan Indonesia Filipina di Sulawesi Utara: Pola dan Determinan* (Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI, 1994), 1–2.

³ Lihat John Haba, “Sejarah dan hubungan Sosial Warga Masyarakat di Wilayah Perbatasan Laut Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Sangihe,” dalam

Setelah kemerdekaan kedua negara, jumlah penduduk Sangihe yang menetap di Filipina masih cukup banyak. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pemerintah kedua negara. Untuk mengatasi permasalahan penduduk yang secara ilegal masuk ke wilayah Indonesia maupun Filipina, pemerintah kedua negara menyepakati perjanjian kerja sama pada 4 Juli 1956. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1957 tentang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Filipina. Pada dasarnya, persetujuan ini mengenai pengaturan keimigrasian yang mengatur pula tentang legalisasi dan repatriasi. Upaya pemulangan pernah dilakukan Pemerintah Indonesia pada 1963–1965 dan pada 1983–1991.⁴ Namun, hingga saat ini, diperkirakan masih banyak penduduk Sangihe yang menetap di Filipina bagian selatan. Ada upaya dari mereka untuk pulang dan menetap di Sangihe. Perpindahan penduduk di wilayah perbatasan ini erat kaitannya dengan meningkatnya kondisi ekonomi di salah satu negara. Penduduk suatu daerah cenderung untuk melakukan perpindahan ke negara yang lebih baik kondisi ekonominya. Sebelum tahun 1970-an, banyak penduduk Kepulauan Sangihe dan Talaud yang pergi ke wilayah Filipina Selatan dan akhirnya menetap di sana. Waktu itu keadaan ekonomi di Filipina lebih baik dibandingkan di Indonesia. Setelah tahun 1970-an, keadaan ekonomi Indonesia cenderung lebih baik dibandingkan Filipina. Oleh karena itu, banyak penduduk Sangihe yang ingin kembali ke Indonesia. Namun, karena berbagai keterbatasan, Kepulauan Sangihe tidak dapat menampung mereka yang kembali. Sebagian dari mereka lalu dipindahkan ke wilayah Halmahera, Maluku Utara.⁵

Mita Noveria, ed., *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Laut: Tinjauan dari Perspektif Sosial* (Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2014), 116–117.

⁴ Sri Suharjo dkk., *Marore Suatu Kampung di Wilayah Perbatasan* (Manado: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2002), 61–64.

⁵ Lihat Aswatini dkk., *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah Perbatasan (Kasus Kabupaten Sangihe Talaud, Daerah Perbatasan Indonesia-Filipina)* (Jakarta,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keberadaan orang-orang Sangihe di Filipina hingga saat ini menjadi permasalahan yang belum selesai penanganannya. Mereka disebut warga negara Indonesia penduduk Filipina. Ada pula yang menyebutnya “sapi” (Sangihe Filipina) atau “pisang” (Filipina Sangihe). Orang-orang Sangihe Filipina adalah orang-orang Sangihe dan masih merupakan warga negara Indonesia. Sebagian besar dari mereka menetap di wilayah Balut dan Saranggani, bahkan ada yang lahir di Filipina. Sementara itu, orang-orang Filipina Sangihe adalah orang asli Sangihe, baik yang lahir di Sangihe maupun yang lahir di Filipina, namun sudah menjadi warga negara Filipina. Kehidupan orang-orang Sangihe di Filipina bagian selatan saat ini lebih buruk dibandingkan orang-orang Sangihe di Marore. Sebagai pendatang, hak-hak mereka sangat dibatasi dan tidak dapat memiliki tanah. Mereka hanya diperbolehkan menggarap lahan untuk ditanami kelapa. Selain itu, masalah keamanan dan kerawanan di wilayah pulau Balut dan Saranggani membuat orang-orang Sangihe menjadi kurang nyaman tinggal di wilayah tersebut. Mereka ingin kembali ke Sangihe, tetapi tidak mempunyai cukup biaya. Selain itu, keterbatasan lahan juga menjadi permasalahan sendiri. Mereka yang mampu kembali ke Indonesia, sebagian tinggal di pulau-pulau di Kepulauan Sangihe dengan kerabatnya. Sebagian ada yang menyewa lahan, dan sebagian lainnya membeli lahan. Sebagai contoh, saat ini Pulau Matutuang sebagian penduduknya adalah orang-orang yang pernah menetap di Filipina. Pada awalnya, Matutuang diakui sebagai milik orang-orang Marore dan digunakan untuk persinggahan nelayan Marore ketika melaut. Lama-kelamaan, banyak dari mereka yang mengusahakan kebun di sana. Saat ini, Matutuang sudah menjadi desa tersendiri di Kecamatan Marore. Sebagian penduduknya adalah penduduk Pulau Marore sendiri dan sebagian lagi adalah orang-orang Sangihe yang pernah menetap di Filipina bagian selatan. Banyak dari mereka yang masih

Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI, 1997), 36–37.

menyewa lahan untuk perkebunan, hanya sebagian kecil yang mampu membeli tanah di Pulau Matutuang.

C. KERJA SAMA LINTAS BATAS NEGARA INDONESIA-FILIPINA

Hubungan antara penduduk Sangihe dan Filipina sudah terjalin sejak lama sebelum mereka terpisahkan oleh batas kedaulatan negara. Oleh karena itu, hubungan ini tidak dapat dihentikan. Keinginan untuk bertemu dan saling mengunjungi serta mempererat tali persaudaraan masih menjadi alasan melakukan kegiatan lintas batas antara kedua negara. Setelah adanya pengakuan kedaulatan negara, aktivitas mobilitas penduduk penduduk antara Indonesia (Sangihe) dan Filipina perlu diatur secara formal. Pelintas batas yang sebelumnya tidak perlu melengkapi diri dengan surat dan dokumen, kini harus memiliki persyaratan lintas batas antarnegara, seperti paspor dan visa atau surat pas lintas batas antarnegara.

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina, khususnya dalam memfasilitasi lintas batas—termasuk secara tradisional yang selama ini telah dilakukan orang-orang di kedua wilayah perbatasan tersebut, pemerintah kedua negara melakukan kerja sama yang tertuang dalam berbagai perjanjian. Pada dasarnya, perjanjian kerja sama yang dilakukan adalah untuk mengatur lintas batas orang dan barang serta cakupan wilayah perbatasan yang dapat memanfaatkan kegiatan lintas batas ini. Perjanjian kerja sama lintas batas (*Border Crossing Agreement*) disusun atas persetujuan Pemerintah Indonesia dan Filipina mengingat kepentingan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan kedua negara yang sering melakukan mobilitas lintas batas untuk keperluan sosial, budaya, dan ekonomi.

Disusunnya perjanjian kerja sama lintas batas ini karena masih banyaknya pelintas batas orang maupun barang yang bebas keluar masuk Indonesia maupun Filipina yang telah merdeka dan berdaulat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah perbatasan, pada 4 Juli 1956, pemerintah kedua negara menandatangani kerja sama mengatur pelintas batas atau tentang keimigrasian. Perjanjian kerja sama ini dinamakan *Immigration Agreement between the Republic of Philippines and the Republic of Indonesia*. Melalui kesepakatan kerja sama ini, diharapkan wilayah perbatasan menjadi lebih tertib dan aman. Namun, pelaksanaannya masih banyak menemui kendala karena banyak pelintas batas yang belum memahami makna kerja sama ini.

Selanjutnya, dilakukan kembali perjanjian baru untuk lebih melengkapi perjanjian sebelumnya. Pada 14 September 1965, ditandatangani kesepakatan kerja sama *Joint Directives and Guidelines of the Implementation of the Immigration Agreement on Repatriation and Border Crossing Arrangement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Philippines* di Manila. Perjanjian ini mengatur mobilitas pelintas batas antarnegara dan nilai barang bawaan serta jenis barang bawaan yang diperbolehkan, yaitu barang-barang kebutuhan hidup dengan nilai di bawah 500 peso untuk setiap orang.

Perjanjian ini diteruskan lagi dengan *Exchange of Note* yang ditandatangani pada 31 Januari 1966. Implementasi perjanjian kerja sama ini pada awalnya masih banyak mendapatkan kesulitan sehingga dilakukan pengawasan dan pengkajian atas perjanjian yang telah ada. Pengaturan dan pengawasan lalu lintas orang agak sulit dilakukan. Pelintas batas tidak dapat dicegah untuk melakukan kunjungan, baik ke Filipina maupun ke Indonesia. Hubungan antara penduduk Sangihe dan Filipina bagian selatan sudah sejak lama terjalin. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang sejarah, sosiokultural, dan ekonomi.

Upaya memperbaiki perjanjian terus dilakukan agar masyarakat di wilayah perbatasan mendapatkan kemudahan dan keuntungan dari perjanjian ini. Hal ini dikarenakan selama diberlakukan perjanjian tersebut telah terjadi pembatasan gerak langkah penduduk perbatasan. Sebagai tindak lanjut pertemuan Presiden Soeharto dan Presiden

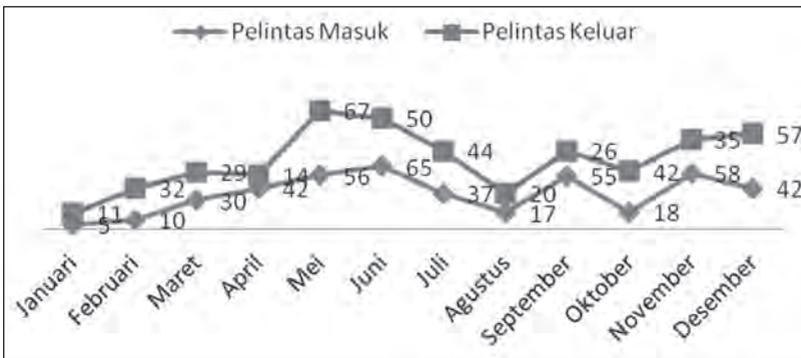
Marcos di Manado pada 29–30 Mei 1974, pada 11 Maret 1975 di Jakarta telah disepakati penyempurnaan perjanjian lintas batas antara Indonesia dan Filipina. Kesepakatan kerja sama lintas batas ini pada intinya memperluas pos lintas batas yang dapat mengeluarkan kartu atau pas lintas batas serta jangkauan wilayah lintas batas orang dan barang ke wilayah Sangihe dan Talaud serta Filipina. Perjanjian kerja sama ini mengatur lintas batas orang atau kaitannya dengan keimigrasian agar para pelintas batas yang cukup banyak itu memahami kegunaan dari keimigrasian. Untuk melintas antarnegara diperlukan dokumen yang dikeluarkan Kantor Imigrasi, biasanya berupa paspor. Sementara itu, di wilayah perbatasan—sesuai kesepakatan bersama dalam perjanjian ini—penduduk yang melintas antarnegara dapat menggunakan pas lintas batas (*border crossing card*). Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa yang berwenang mengeluarkan pas lintas batas serta sebagai pintu pemeriksaan keluar masuk pelintas batas di wilayah Filipina adalah Pos Perbatasan Mabila (Pulau Balut), Cape San Agustin, dan Bongao (Tawi-Tawi), sementara di Indonesia meliputi Marore, Miangas, dan Tarakan.

Penggunaan pas lintas batas hanya berlaku di wilayah perbatasan (*border area*) yang disepakati bersama. Wilayah perbatasan di Filipina meliputi wilayah Kelompok Kepulauan Balut, Kepulauan Olanivan, Kepulauan Saranggani, Cape San Agustin, dan Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi. Sementara itu, wilayah perbatasan di Indonesia mencakup Kelompok Kepulauan Nanusa (Pulau Miangas, Garat, Karakatung, Manupung, Kakorotan, Maio, dan Marampit), Kelompok kepulauan Kawio (Pulau Marore, Kamboleng, Kawaluso, Mamanuk, Matutuang dan Dumarehe), Kelompok Kepulauan Bukide (Pulau Bukide, Liang, Salehe, Meliang, Mekurang, Malentok, dan Lipang), serta Tarakan.

Wilayah perbatasan yang disepakati merupakan wilayah yang dapat dikunjungi pelintas batas tradisional mengacu pada latar belakang sejarah. Mereka yang bepergian di luar wilayah perbatasan harus menggunakan paspor layaknya orang yang berkunjung ke luar

negeri. Penduduk dari perbatasan Filipina Selatan hanya diperbolehkan masuk ke empat wilayah kelompok kepulauan (Nanusa, Kawio, Bukide, dan Tarakan). Sebaliknya, penduduk Indonesia juga hanya diperbolehkan pergi ke lima wilayah kepulauan (Balut, Olanivian, Saranggani, Cape San Agustin, dan Tawi-Tawi). Pas lintas batas ini diberikan agar penduduk dapat pergi dari pulau-pulau di sekitar Sangihe dan Talaud ke pulau lainnya di Filipina Selatan untuk kunjungan keluarga, kegiatan keagamaan seperti perayaan Natal atau Lebaran, serta tujuan wisata.

Hingga saat ini, ketentuan penggunaan pas lintas batas, batas wilayah, dan kawasan perbatasan yang disepakati masih berlaku. Penduduk kedua kawasan perbatasan yang memiliki kartu lintas batas bisa bebas masuk dan melakukan perjalanan ke Indonesia maupun Filipina untuk tujuan perdagangan, kunjungan keluarga, ziarah keagamaan, dan atau rekreasi. Berdasarkan data Kecamatan Marore, sepanjang 2015 terdapat sejumlah pelintas batas yang melakukan *check point* di Pos Lintas Batas Marore seperti terlihat dalam grafik berikut.



Gambar 4.1 Pelintas Batas melalui Pos Lintas Batas Marore Tahun 2015⁶

⁶ Diolah penulis berdasarkan data dari Kecamatan Marore tahun 2015.

Berdasarkan data dari Kecamatan Marore, yang melakukan perjalanan lintas batas terdiri dari warga negara Indonesia (WNI), warga negara Indonesia penduduk Filipina (WNIPP), dan warga negara Filipina (WNP). Tujuan lintas batas tersebut pada umumnya mengunjungi keluarga. Namun, sepanjang kunjungan tersebut, para pelintas batas memanfaatkannya untuk berdagang sehingga ada nilai ekonomi yang dibawa dalam kunjungan keluarga. Misalnya, pelintas batas WNI (orang-orang Marore) yang mengadakan perjalanan ke Filipina dengan alasan kunjungan keluarga sembari membawa ikan untuk dijual ke Filipina. Ketika pulang, sebagian dari mereka membawa barang dagangan, yaitu barang kebutuhan sehari-hari masyarakat Marore. Begitu juga WNP masuk ke Marore untuk kunjungan keluarga sembari membawa barang dagangan yang bisa dijual di Marore ataupun dengan tujuan membeli ikan dari nelayan Marore.⁷

Pemberlakuan pas lintas batas ini masih bermanfaat bagi masyarakat hingga saat ini. Dalam perkembangannya, penggunaan pas lintas batas tidak terbatas pada kunjungan keluarga dan berdagang, tetapi juga untuk kepentingan berobat, pendidikan, serta bekerja.⁸ Mereka biasanya berobat ke kota Davao atau General Santos, Filipina, karena lebih dekat. Fasilitas dan pelayanan kesehatan juga lebih bagus dibandingkan di Tahuna atau Manado. Selain bekerja di perkebunan, pada umumnya orang-orang Sangihe bekerja di tempat pengolahan ikan di General Santos.⁹ General Santos merupakan tempat penam-

⁷ YM dan JFS, pedagang, Wawancara di Marore, 30 Mei 2016. Berdasarkan data pelintas batas yang tercatat, alasan pelintas batas dari dan ke Filipina adalah kunjungan keluarga. Akan tetapi, para pelintas batas membawa barang bawaan biasanya hanya untuk sekadar oleh-oleh ataupun bekal di jalan. Namun, tidak menutup kemungkinan mereka juga membawa barang-barang untuk berdagang yang mereka anggap sudah biasa hal ini dilakukan oleh para pelintas batas.

⁸ Frederik Wulanmas, "Impacts of the Implementation of Border Crossing Area Agreement between Indonesia and the Philippines at the Border of Miangas Island of North Celebes," *Jurnal Hukum Internasional* 9, No.1 (Oktober 2011): 167-168.

⁹ Wawancara dengan penduduk Matutuung yang sedang mengurus dokumen untuk pergi ke Filipina (mereka hendak berobat dan menengok adiknya yang kuliah di General Santos) di Kantor Pelayanan Terpadu atau Pos Lintas Batas Satu Atap Marore,

pungan dan pengolahan ikan yang cukup besar dan banyak menampung tenaga kerja. Wilayah General Santos merupakan wilayah yang dikembangkan untuk pertanian dan perikanan. Perusahaan perkebunan dan perikanan membutuhkan banyak tenaga kerja dan banyak tenaga kerja dari Sangihe dan Talaud (atau dikenal dengan Nusa Utara) didatangkan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di sana. Pada 1950-an, keadaan ekonomi Indonesia yang buruk menyebabkan banyak orang pergi ke Filipina Selatan sebagai pekerja migran.¹⁰ Pada waktu itu, semakin berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebabkan banyak orang pergi ke Filipina Selatan sehingga menjadi permasalahan bagi Pemerintahan Magsaysay pada waktu itu.¹¹ Pergi ke wilayah Filipina Selatan lebih mudah transportasinya dan jaraknya lebih dekat dari Sangihe. Para pelintas batas, baik dari Filipina maupun dari Sangihe, banyak menggunakan *pumpboat* atau *perahu fuso* yang banyak dimiliki penduduk perbatasan.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, pemerintah kedua negara terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan. Pada 1 Juli 1975 disepakati perjanjian kerja sama yang menghasilkan berbagai peraturan bagi pelintas batas, yaitu *The Implenting Rule and Regulation on Border Crossing*. Perjanjian kerja sama lintas batas bertujuan mempermudah pengawasan dan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah pebatasan. Perjanjian kerja sama tersebut berisi tentang pembentukan *border committees*, patroli perbatasan, pembentukan *border crossing system*, pertukaran *liaison officer*, pertukaran informasi, intelijen dan publikasi serta komunikasi elektronika di Davao dan Manado. Dalam pelaksanaannya, tugas pengawasan melibatkan berbagai lembaga, yaitu Kecamatan Marore,

2 Juni 2016.

¹⁰ Djorina Velasco, "Navigating the Indonesian-Philippine Border: The Challenges of Life in the Borderzone," *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies* 25, No. 1-2 (2010): 102.

¹¹ Evelyn Tan-Cullamar, "The Indonesian Diaspora and Philippine-Indonesia Relation," *Philippine Studies* 41, No. 1 (1993): 44.

Bea Cukai, Imigrasi, Pos Angkatan Laut, dan Kantor Perwakilan Filipina (*Republic of Philippines Team Station*). Dalam hal ini, camat bertindak sebagai koordinator kerja sama antarlembaga tersebut.

Seperti dijelaskan sebelumnya, untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan dan untuk memberikan pelayanan bagi para pelintas batas, disepakati adanya pos lintas batas. Pos lintas batas berwenang memberikan izin pelintas batas yang masuk maupun keluar. Pulau Marore merupakan salah satu pintu keluar dan masuk pelintas batas. Oleh karena itu, di pulau ini terdapat beberapa instansi yang diberi kewenangan untuk memberikan izin para pelintas batas sekaligus juga mempunyai tugas pengawasan di wilayah perbatasan. Sebenarnya sudah ada upaya untuk memberikan pelayanan kepada pelintas batas dengan dibangunnya pos lintas batas satu atap. Bangunan fisik kantor yang dibangun sejak tahun 2013 sudah selesai dan dapat digunakan, tetapi belum berfungsi secara optimal karena belum diresmikan. Camat Marore selaku kepala pemerintahan sekaligus koordinator *Border Crossing Agreement* (BCA) sangat mengharapkan beroperasinya kantor ini agar pelayanan bagi pelintas batas menjadi lebih efektif dan efisien. Selama ini, para pelintas batas mengurus dokumen dengan mendatangi masing-masing kantor yang ada. Camat Marore mengimbau para petugas yang terkait dengan pengurusan keimigrasian untuk memanfaatkan kantor satu atap yang ada untuk memudahkan pelayanan meskipun belum diresmikan.

“...tapi pada prinsipnya kami selaku koordinator menyampaikan kepada tim yang tergabung dalam BCA ini sudah menempatkan PLB tersebut agar tim ini bersatu, tidak sektoral. Kadang imigrasi, bea cukai, di situ kami maksudkan agar pelayanan kita satu atap yang ada di PLB walaupun belum diresmikan.”¹²

Selain itu, diharapkan agar instansi yang ada di Marore—yang merupakan satu kesatuan—dapat bersatu dan terpadu dalam mem-

¹² SO, Camat Kepulauan Marore, Wawancara di Marore, 1 Juni 2016.

berikan pelayanan serta tidak terkesan sektoral. Selama ini, kendala dalam memberikan pelayanan adalah terbatasnya petugas di masing-masing instansi. Pengurusan dokumen jadi terhambat karena terkadang petugas tidak ada di tempat. Semua itu dapat diatasi jika timnya terpadu dan dapat saling melengkapi.

Kerja sama lain yang sangat penting adalah terkait perdagangan. Lintas batas orang tidak akan terlepas dari lintas batas barang. Hal ini dikarenakan pelintas batas selalu memanfaatkan kunjungan untuk membawa barang untuk diperdagangkan. Perundingan antara Pemerintah RI dan delegasi Pemerintah Filipina pada 29 Juli 1971 di Manila menghasilkan kesepakatan perjanjian perdagangan lintas batas antara kedua negara. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1972 tentang Pengesahan *Agreement on Border Trade between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Philippines*. Perjanjian kerja sama ini lebih menekankan pada kerja sama perdagangan yang mengatur pula perdagangan tradisional yang dilakukan pelintas batas tradisional. Barang-barang yang dibawa para pelintas batas sebenarnya barang bawaan atau cangkungan yang nilai harganya tidak lebih dari 400 peso.

Perjanjian ini kemudian mengalami perubahan. Selanjutnya, pada 8 Agustus 1974 disepakati perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Filipina tentang perdagangan lintas batas, *Agreement on Border Trade Between The Government of the Republic Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines*. Perjanjian ini merupakan penyempurnaan perjanjian sebelumnya serta mengacu pada *Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation*. Dalam perjanjian ini (Pasal II) disepakati bahwa yang dimaksud perdagangan perbatasan meliputi Kepulauan Nanusa, Kawio, dan Bukide (Indonesia) serta Kelompok Kepulauan Balut (Filipina). Dalam Protokol 2 dijelaskan tentang pelabuhan untuk masuk dan keluar barang di Mabila (Pulau Balut) dan Miangas

(Kepulauan Nanusa) serta Marore (Kepulauan Kawio dan Bukide). Protokol 3 menjelaskan tentang cara perdagangan, di mana nilai barang yang diperdagangkan tidak lebih dari 1.000 peso atau US\$150 untuk satu orang dalam satu kali perjalanan atau dalam satu perahu atau kumpit tidak lebih dari 10.000 peso atau US\$1.500. Barang-barang yang diperdagangkan dari Indonesia meliputi hasil produk pertanian dan berbagai produk lokal di wilayah perbatasan, selain tambang dan minyak. Sementara itu, barang-barang dari Filipina yang boleh diperdagangkan adalah barang kebutuhan konsumsi sehari-hari serta berbagai peralatan yang dibutuhkan di wilayah perbatasan Indonesia.

Kemudian perjanjian lintas batas antara Indonesia-Filipina mengalami perubahan lagi. Perjanjian lintas batas tradisional ini telah direvisi lagi dengan ditandatanganinya *Revised Agreement on Border Crossing between The Republic of Philippines and The Republic of Indonesia* di Jakarta pada 11 Maret 1975. Dalam revisi perjanjian ini (Annex “A”, VIII.1) ditetapkan bahwa nilai barang bawaan nilai harganya tidak melebihi dari 500 peso. Kenyataannya, selama ini barang bawaan bisa melebihi nilai yang diperbolehkan. Pada akhirnya, barang bawaan dapat berkembang menjadi barang yang mempunyai nilai jual untuk diperdagangkan melalui jalur atau lintas batas tradisional.

Hal ini menjadi rancu karena barang yang dibawa adalah barang kebutuhan sehari-hari—bukan barang untuk diperdagangkan—yang telah diatur dalam perjanjian. Selama ini, sebagian besar pelintas batas menganggap barang bawaan itu adalah barang yang diperdagangkan. Meskipun implementasi dari perjanjian ini telah dikuatkan dengan diterbitkannya Kepres 23/1972, hal ini masih membuat bingung para pelintas batas tradisional. Adanya batas nilai barang bawaan tidak boleh melebihi 500 peso bagi pelintas batas yang menggunakan pas

lintas batas membuat pelintas batas tradisional mencari upaya lain dengan menggunakan jalur tidak resmi atau menyelundup.¹³

Legalitas kegiatan perdagangan sebenarnya sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos, dan Kiriman melalui Jasa Penitipan. Bab III Pasal 8 menetapkan bahwa barang pelintas batas antara Indonesia dan Filipina tidak boleh melebihi US\$250 untuk satu orang dalam jangka waktu satu bulan. Demikian pula yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 tahun 2010 tentang Perdagangan Lintas Batas Antarnegara. Peraturan ini tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa diberikan kebebasan bea masuk bagi barang pribadi pelintas batas dengan ketentuan nilai pabean paling banyak US\$250 untuk satu orang dalam jangka waktu satu bulan. Barang dagangan tertentu dibebaskan dari pajak jika tidak melebihi nilai US\$250.¹⁴ Jika melebihi nilai tersebut maka akan dikenakan pajak sebesar 10%. Peraturan ini sama dengan peraturan kegiatan perdagangan yang masuk ke wilayah lain di Indonesia.

Perdagangan lintas batas negara saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya di Bab IV Pasal 55 dan 56 yang mengatur perdagangan perbatasan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian perdagangan lintas batas adalah tempat masuk atau keluarnya barang, jenis barang yang diperdagangkan, nilai maksimal transaksi perdagangan, wilayah tertentu yang dapat dilakukan perdagangan perbatasan, serta kepemi-

¹³ Lihat Pristiwanto, "Permasalahan Perdagangan Lintas Batas di wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara," *Patrawidya* 16, No. 2 (2015): 236.

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan No.188/2010, Pasal 12 ayat (1c): Indonesia dengan Filipina paling banyak FOB (*Free on Board*) US\$250 per orang untuk jangka waktu 1 bulan.

likan identitas yang melakukan perdagangan (berupa paspor atau pas lintas batas yang diakui).¹⁵

Walaupun dalam jumlah yang kecil dan dilakukan secara tradisional, perdagangan juga membutuhkan fasilitas pendukung (dalam hal ini pos lintas batas). Selain memfasilitasi keluar-masuk orang, pos lintas batas juga memfasilitasi keluar dan masuknya barang. Oleh karena itu, idealnya dalam satu pos lintas batas memiliki fasilitas untuk kegiatan *Custom, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS). Hal ini diperlukan untuk memperlancar kegiatan perlintasan orang dan perdagangan di kawasan perbatasan atau kawasan perdagangan (*trade zone*). Di Marore sudah terdapat pos lintas batas yang sudah dapat memberikan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan.

Ketika cuaca sedang bersahabat,¹⁶ banyak perahu dari Filipina yang bersandar di pelabuhan di Marore membawa barang-barang dagangan yang biasanya sudah dipesan sebelumnya atau titipan keluarga. Mereka datang ke Marore untuk melapor dan mengurus dokumen. Sebaliknya, beberapa perahu dari Marore dan pulau-pulau sekitarnya mengangkut hasil perikanan untuk dibawa ke Filipina Selatan. Mereka terlebih dahulu mengurus surat-surat atau dokumen yang diperlukan untuk pergi ke Filipina. Tim pos lintas batas akan menjalankan perannya masing-masing sesuai kewenangannya.

Pelayanan pengurusan dokumen lintas batas orang maupun barang dianggap sudah cukup baik. Demikian pula pengurusan dokumen ketika tiba di Filipina. Para petugas sudah memberikan pelayanan secara baik, meskipun menurut salah satu nelayan yang

¹⁵ Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, FGD di Jakarta, 13 Oktober 2016.

¹⁶ Menurut beberapa nelayan Marore, waktu yang baik di sekitar laut wilayah perbatasan Marore dan Filipina Selatan adalah bulan April sampai dengan Mei. Oleh karena itu, keadaan cuaca ini juga memengaruhi berbagai aktivitas penduduk perbatasan ini. Kegiatan melaut akan terhenti ketika musim ombak besar.

merangkap sebagai pedagang ikan, pelayanan di Marore kurang efisien. Di Filipina, begitu kita menyerahkan surat-surat kepada petugas, merekalah yang mengurus hingga selesai. Para pelintas batas atau pedagang hanya tinggal menunggu saja. Di Marore, para pelintas batas atau pedagang harus terlebih dahulu mencari petugas berwenang yang kadang tidak ada di tempat. Oleh sebab itu, menyatukan para petugas pos lintas batas merupakan cara untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada pelintas batas. Hal yang terpenting dalam pengurusan dokumen untuk perdagangan ini adalah tidak membawa barang-barang yang dilarang dan tidak melebihi kuota atau nilai barang yang sudah ditentukan.

“Jadi, kemungkinan kalau di pelayanan lintas batas yang ada di Marore ini. Dari segi pelayanan untuk kantor-kantor yang di sini sudah difokuskan dalam satu kantor, cuma yang dari tim keamanan dipisahkan termasuk angkatan laut Filipina dengan angkatan laut Indonesia. Jadi setiap pengurusan dalam bentuk administrasi tidak ada kendala, semua aman-aman saja. Namun, mungkin dibatasi masalah muatan. Jadi, tidak lebih dari 2,5 juta rupiah kalau dalam segi rupiah atau 250 dollar. Setelah kita sampai di sana, pelayanan juga tidak berbeda jauh dengan pelayanan di sini. Istilahnya yang penting kita oke-oke, tidak membawa barang yang dilarang dan tidak melebihi kuota yang dibatasi oleh pemerintah. Pemerintah kita juga pemerintah mereka, kalau di sana lebih enak juga pelayanan mereka di sana.”¹⁷

Aturan tentang nilai barang bawaan atau barang yang diperdagangkan tersebut saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan nilai uang. Jika berdagang ke Filipina maupun sebaliknya dengan nilai yang kecil, menurut para pelaku usaha atau pelintas batas, tidak akan mendapatkan keuntungan memadai. Namun, hal ini tidak menyurutkan niat mereka melakukan aktivitas perdagangan demi bertahan hidup di pulau terluar ini. Jarak Filipina Selatan yang lebih dekat dibandingkan Tahuna atau Manado, pasar untuk komoditas yang

¹⁷ MM, Pedagang ikan yang berdagang secara lintas batas tradisional dari Marore, Wawancara di Marore, 29 Mei 2016.

diperdagangkan sudah ada, barang-barang yang dibeli dari Filipina juga mudah diperdagangkan kembali ke Marore adalah alasan para pedagang ini masih bertahan melakukan perdagangan. Menurut para pedagang, belanja ke Filipina lebih menguntungkan daripada belanja ke Tahuna. Mereka juga bisa melakukan perdagangan dengan cara barter. Hal ini sering dilakukan oleh para pedagang di wilayah perbatasan karena berbagai keterbatasan di wilayah ini.

“Ke Filipina harus bawa peso kalau tidak bawa barang ...barter... jadi bawa ikan kemudian baru dapat peso nanti baru bisa dibelanjakan. Lebih gampang ke Filipina daripada ke Tahuna, karena kita belanja pakai peso nanti kalau dibawa ke Indonesia akan lebih untung.”¹⁸

Hasil tangkapan ikan di sekitar kepulauan Marore merupakan produk utama para nelayan untuk diperdagangkan di wilayah Filipina Selatan. Pasarnya pun sudah pasti ada. Dari hasil perdagangan ikan, para nelayan tidak membawa pulang uang peso karena tidak berlaku di Marore. Uang peso itu akan mereka gunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan penduduk perbatasan, terutama baju-baju dan berbagai kelengkapan aktivitas nelayan. Kelengkapan melaut dari Filipina dianggap lebih bagus dan harganya lebih murah. Mereka juga membeli tripleks untuk membuat perahu, paku, lem, cat, peralatan tangkap, dan lain-lain di Filipina. Namun, mereka tidak pernah membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Filipina karena harganya lebih mahal. Hal itu mereka lakukan untuk bertahan hidup di pulau terpencil di wilayah perbatasan. Upaya ini tergolong upaya ketahanan sosial ekonomi penduduk perbatasan.

Agar mendapatkan keuntungan yang cukup besar, para pelintas batas membawa cukup banyak barang dagangan. Beberapa cara pun dilakukan tanpa harus melakukan pelanggaran. Kuota dagang yang kecil bisa menjadi besar bila ada beberapa orang dalam satu kapal.

¹⁸ YM, Pemilik toko dan pedagang ikan yang berdagang secara lintas batas tradisional dari Marore, Wawancara di Marore, 31 Mei 2016.

Misalnya, satu kapal berisi lima orang diperbolehkan membawa barang senilai US\$1.250. Cara lain adalah dengan membawa barang dagangan yang sama beberapa kali. Misalnya, Coca Cola merupakan barang yang banyak dicari oleh masyarakat perbatasan untuk pesta atau perayaan Natal. Dalam satu perayaan Natal, permintaan minuman ringan dari Tahuna bisa mencapai 500 kerat, itu pun hanya dari seorang pedagang saja.

“... ambilnya kan sedikit-sedikit, 50 habis ambil lagi 50, jadi tidak sampai sekian juta. Modal 120 ribu untuk satu kerat kalau 10 kerat 1,2 juta, kalau 50 kerat dibagi dengan lima nama berbeda kan, seperti itu aja gampang, yang penting kita tidak mencuri, dengan bukan membawa barang larangan kan dengan barang berlabel gitu kan kita bisa lolos... Kalau di sana mereka tetap, Pak. Mereka hitung kalau mau muat berapa kapasitas barangnya mereka lihat. Mereka tidak percaya kalau itu hanya 250 dollar. Jadi pintar-pintar kita mengatur yang ada di dalam kapal, ada lima orang bikin lima barang. Daripada kita rugi kan bawa kapal besar terus isinya cuma sekian¹⁹

Sebenarnya permintaan akan minuman keras juga cukup banyak, tetapi banyak pedagang tidak berani membawanya karena memang dilarang. Meskipun demikian, beberapa jenis minuman keras dari Filipina bisa ditemukan di Tahuna. Minuman keras dari Filipina tersebut laku dijual karena kebiasaan masyarakat yang suka minuman keras ketika pesta. Para pedagang membawa barang—yang dilarang—tersebut dengan cara ilegal (diselundupkan) dari wilayah Indonesia maupun dari Filipina. Sebagian dari mereka menganggap barang-barang yang dibawa itu merupakan oleh-oleh buat keluarganya.

“Ke Filipina 3 jam menggunakan *pumboat*. Kemudian kami mencari pembeli ikan, dari situ kita bisa mendapatkan peso untuk belanja. Mau belanja apa? Sembako ada di Indonesia jadi saya belanja barang-barang yang cepat laku. Seperti minuman keras tanduay... Kalau saya bawa sandal dan tikar yang dari Filipina mau terjual sampai

¹⁹ MM, Pedagang ikan dan barang-barang kebutuhan nelayan yang berdagang secara lintas batas tradisional dari Marore, Wawancara di Marore, 29 Mei 2016.

kan? Karena saya ini pengusaha kecil yang modalnya kecil seperti kredit di bank jadi harus setor tiap bulan, saya punya anak sekolah sudah kuliah. Tetapi modal di sini hanya 300 kg ikan...cuma dapat berapa bisa buat beli apa? Sementara kita harus memakai orang, belum pas sementara, perahu tetap harus disewa. Jadi, orang mau menyelundup sabun Daia, rokok Surya, minyak tanah, bensin, minyak tanah, itu kita bawa syukur-syukur habis, jual ikan, belanja, laut bersahabat bisa dapat pulang, kalau tidak kita bisa tertahan di bawah. Sementara harusnya besok sudah dibelanjakan... Balik dari Filipina kita muat racun ... itu minuman, untuk kita kasih ke orang-orang sini. Yang mana ibu tahu itu racun dibawa? Karena itu yang cepat laku untuk diputar. Ke bawah bawa ikan segar, orang-orang bawa racun ke sini lewat botol-botol, ya karena itu yang cepat...²⁰

Border Trade Agreement pada dasarnya membatasi orang melakukan kegiatan perdagangan. Banyaknya pembatasan, baik komoditas maupun nilai komoditas dagang, mengurangi keuntungan para pedagang. Oleh karena itu, mereka melakukan perdagangan ilegal dengan menyelundupkan barang-barang tanpa melalui prosedur resmi demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Para penyelundup memanfaatkan kelemahan para petugas pos lintas batas dan para petugas keamanan.

Hal ini juga diakui para petugas pos lintas batas dan petugas keamanan di Pulau Marore. Namun, menurut mereka, penyelundupan saat ini sudah jauh berkurang. Letak pos lintas batas Marore yang terpencil, wilayah lautan yang luas, serta keterbatasan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi menyebabkan lemahnya pengawasan. Para penyelundup bisa melintasi wilayah laut yang luas tanpa melalui pos lintas batas di Marore. Hal ini ditambah dengan adanya para nelayan Filipina yang menangkap ikan di wilayah Indonesia. Sulit untuk mengatakan tidak ada perdagangan ilegal

²⁰ YM, Pemilik toko dan pedagang ikan serta barang-barang kebutuhan sehari-hari, berdagang secara lintas batas tradisional dari Marore, pernah punya pengalaman membawa barang secara ilegal, Wawancara di Marore, 31 Mei 2016.

karena masih dijumpai barang-barang yang sebenarnya tidak boleh diperdagangkan—bahkan sampai ke Tahuna yang bukan wilayah perbatasan. Hal seperti ini juga terjadi di wilayah perbatasan lain, seperti Miangas. Permasalahan yang dihadapi sama dengan permasalahan di Marore. Selama peraturan masih membatasi masyarakat dalam berdagang dan tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan, perdagangan ilegal akan tetap menjadi masalah.²¹

Apabila dilihat dari perjanjian perdagangan lintas batas yang disepakati pada 1974, berarti sudah cukup lama perjanjian tersebut berlaku. Namun, kini zaman telah berubah. Apakah perjanjian kerja sama perdagangan lintas batas ini masih dapat diimplementasikan saat ini? Mungkin diperlukan perubahan dengan membuat perjanjian yang lebih baru dengan penyempurnaan perjanjian yang selama ini diberlakukan. Menurut para pelaku perdagangan lintas batas di Pulau Marore, peraturan atau perjanjian kerja sama dagang tersebut sudah selayaknya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Mereka mempunyai perhitungan dan pertimbangan sendiri.

“Kalau misalkan modal awal kita 10 juta, kalau dari sini perhitungan nilai jualnya dari barang yang kita jual itu sekitar 30% dari pembelian. Jadi, kasarnya, kita dapat itu tiga juta kalau total laku, itu masih di luar dari biaya operasional kita makan, jadi standar minimal ya 10 juta. Kalau kita jual dengan persentase penjualan 10%, masyarakat kita bagaimana, Pak. Di sini saja kami pasang dari Tahuna 30%. Sudah bayar kapal dan sebagainya, jadi tidak murni bisnis untuk mendapatkan untung. Jadi, Pak, sebaiknya ke depannya harusnya tidak dibatasi, apalagi di era masyarakat ekonomi ASEAN, yang waktu dulu BCA itu tidak apa-apa, jadi semua aturan-aturan dulu sewaktu BCA itu masih berlaku sampai sekarang.”²²

²¹ Wulanmas, “Impacts of the Implementation,” 166–167.

²² Wawancara Tim dengan JFS, seorang guru dan juga pemilik toko dan pedagang ikan serta barang-barang kebutuhan sehari-hari, 31 Mei 2016.

Permasalahan serupa diungkapkan oleh pelaku perdagangan lintas batas yang meminta diperbolehkannya perdagangan yang lebih besar. Menurut para pelaku perdagangan lintas batas, pengurangan kuota dan pembatasan nilai komoditas perdagangan akan mengurangi keuntungan mereka. Potensi ikan di Marore sebenarnya cukup besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan ikan di Filipina. Selain mengumpulkan ikan-ikan dari para nelayan di Marore, Filipina juga mengumpulkan ikan dari nelayan-nelayan di wilayah perbatasan, seperti Matutuang, Kawio, Kawaluso, sampai Bukide.

“Kita sebenarnya bisa bawa berton-ton (ikan) ke Filipina, tetapi dibatasi 2,5 juta. Jadi kita kalau mau belanja hitung-hitung. Susah juga ke sana belanja harus dengan ukuran dollar kalau lebih mereka langsung minta, daripada barang tidak bisa dibawa...Kalau menurut saya memang terlalu kecil, Pak, siapa yang usaha tidak mencari untung? Kita harus berusaha untuk mencari untung kalau kita cuma membawa sekian buat apa kita berjualan jauh-jauh. Lebih baik kita duduk di rumah daripada merugi.”²³

Ketika tidak mendapatkan keuntungan yang berarti, mereka lebih baik tidak berdagang. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja karena menyangkut kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Adanya pedagang sebenarnya menguntungkan karena kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi. Masyarakat juga dapat menjual hasil perikanan melalui pedagang pengumpul. Potensi perikanan di wilayah perbatasan Pulau Marore sangat besar dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat karena keterbatasan pemasaran. Relatif rendahnya kualitas sumber daya dan teknologi penangkapan pun jadi kendala sehingga kesempatan ini dimanfaatkan nelayan asing yang lebih maju pengetahuan dan teknologi penangkapan ikannya. Meskipun ada aturan pemerintah tentang kerja sama

²³ Wawancara dengan MM, pedagang ikan dan barang-barang kebutuhan nelayan, perdagangan lintas batas tradisional dari Marore, 29 Mei 2016.

usaha dengan pihak asing, masih ditemukan pelanggaran yang merugikan nelayan Indonesia.²⁴

Potensi laut yang luas di Sangihe banyak dimanfaatkan oleh pihak lain, terutama nelayan-nelayan asing Filipina. Sementara itu, hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dijual masyarakat Sangihe tidak mempunyai nilai tambah karena dijual secara langsung dan belum ada industri yang mengolah hasil pertanian dan hasil laut tersebut. Perdagangan merupakan salah satu peluang usaha yang dapat memberi keuntungan bagi masyarakat perbatasan—meskipun masih banyak hambatan yang dirasakan. Hambatan-hambatan tersebut membuat para pedagang menghindari pemeriksaan. Akhirnya, ada pedagang yang tidak hanya membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga senjata, zat-zat psikotropika, dan teroris.²⁵ Hal ini bisa dicegah dengan perjanjian kerja sama perdagangan yang memudahkan masyarakat perbatasan untuk berdagang secara legal dan menguntungkan.

Perjanjian perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Filipina yang disepakati pada 1974 sampai saat ini belum pernah diperbarui. Untuk mencegah terjadinya perdagangan ilegal, sudah selayaknya pemerintah kedua negara meninjau ulang perjanjian tersebut. Masyarakat sebenarnya mampu melakukan perdagangan dengan skala yang agak besar, namun adanya pembatasan membuat mereka tidak dapat melakukannya. Perdagangan besar memang sudah ada aturan tersendiri di kedua negara. Namun, perlu pertimbangan atau kebijakan khusus dalam membuat peraturan perdagangan untuk daerah

²⁴ Mochamad Nadjib, “Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing): Ancaman Kedaulatan Ekonomi di wilayah Perbatasan Laut,” dalam Mita Noveria, ed., *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Laut: Tinjauan dari Perspektif Sosial* (Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2014), 348–349.

²⁵ Bayu Setiawan, “Kebutuhan Dasar Penduduk: Pemenuhan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesempatan Kerja di Wilayah Perbatasan Laut,” dalam Mita Noveria, ed., *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Laut: Tinjauan dari Perspektif Sosial* (Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2014), 269–271.

perbatasan. Peraturan perdagangan lintas batas tidak boleh merugikan masyarakat perbatasan dan tidak memberatkan pemerintah kedua negara. Dengan demikian, pemberlakuan peraturan baru patut dipertimbangkan secara matang karena berdampak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan di wilayah perbatasan.

Perjanjian kerja sama perdagangan menjadi kendala untuk meningkatkan aktivitas perdagangan atau ekonomi masyarakat perbatasan. Dalam perjanjian yang telah disepakati kedua negara, memang ada keterbatasan dan pembatasan dalam melakukan aktivitas perdagangan. Perdagangan lintas batas sangat berbeda dengan perdagangan antarnegara. Perjanjian perdagangan perbatasan bukanlah *free trade agreement* (FTA) atau *preferential trade agreement* (PTA) untuk meningkatkan akses pasar produk di antara kedua negara. Perdagangan lintas batas hanya diperbolehkan melalui *exit/entry point* yang telah ditentukan mengacu pada *Border Trade Agreement* dan beberapa persyaratan lainnya yang telah disepakati. Jika ingin mengubah perjanjian perdagangan lintas batas, perlu diperhatikan keuntungan dan kerugiannya, terutama penentuan ambang batas nilai perdagangan. Di satu sisi, keuntungan yang akan didapat adalah insentif untuk memudahkan masyarakat perbatasan mendapatkan barang kebutuhan pokok dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang selama ini terpuruk secara ekonomi. Di sisi lain, ada kerugian yang akan dialami jika menaikkan batas nilai dagangan. Misalnya, kebijakan ini rentan disalahgunakan oknum pedagang besar dengan memanfaatkan penduduk di wilayah perbatasan. Hal ini akan mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor perdagangan. Pada akhirnya, neraca perdagangan perbatasan menjadi defisit serta dapat mengurangi daya saing industri sekitar perbatasan.²⁶ Jika dilihat dari kemampuan ekonominya, hanya bebe-

²⁶ Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, FGD di Jakarta, 13 Oktober 2016.

rapa orang saja di perbatasan, terutama di Marore, yang memiliki modal untuk melakukan perdagangan dengan nilai besar. Namun, hal ini dapat diatasi dengan koperasi atau usaha dagang bersama. Bentuk koperasi dan usaha dagang bersama dapat membantu masyarakat di pulau-pulau kecil terluar untuk mendapat kemudahan akses perdagangan di wilayah perbatasan.

Perdagangan merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk menyejahterakan masyarakat perbatasan. Bila hal ini dikembangkan dan dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin perdagangan ke Filipina akan menghasilkan devisa bagi negara. Devisa ini pada akhirnya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat perbatasan itu sendiri. Aktivitas perdagangan juga dapat dijadikan wahana untuk memberdayakan masyarakat perbatasan Marore dan sekitarnya, utamanya masyarakat lokal.

Pembaruan perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Filipina diharapkan dapat mewujudkan kerja sama masyarakat perbatasan yang lebih baik. Semua perjanjian kerja sama selalu diupayakan untuk direvisi sesuai zaman yang semakin cepat berubah. Sebagai contoh, *Indonesia-Philippines Plan Action 2014–2016* merupakan realisasi *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) yang dibentuk sejak tahun 1993 untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk menyelesaikan berbagai masalah perbatasan. *Plan of Action* ini ditandatangani oleh kedua negara pada 24 Februari 2014. Di dalam *Plan of Action* ini, ada upaya meninjau dan memperbarui perjanjian lintas batas perdagangan tahun 1974 dan melaporkan perkembangannya kepada JCBC. Perhatian pemerintah kedua negara dalam meningkatkan kerja sama, khususnya perdagangan tradisional lintas batas, sudah cukup besar. Namun, tindak lanjut dari revisi perjanjian ini belum juga terwujud. Oleh sebab itu, diperlukan langkah nyata dan tidak hanya sebatas dokumen perjanjian. Langkah nyata ini selalu ditunggu masyarakat pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ingin meningkatkan kesejahteraannya lewat kemudahan kerja sama perdagangan lintas batas.

D. BENTUK KERJA SAMA LINTAS BATAS YANG DILAKUKAN MASYARAKAT LOKAL

Berbagai bentuk kerja sama telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan Filipina dengan menandatangani perjanjian atau *agreement* sejak 1956. Hal ini dilakukan untuk mengatur kegiatan lintas batas orang dan barang agar dapat menciptakan ketertiban dan keamanan wilayah perbatasan kedua negara. Perjanjian yang sudah lama itu sepertinya sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini. Namun, masyarakat di perbatasan Indonesia-Filipina tetap menjalin kerja sama dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Adanya saling ketergantungan dan kepentingan masing-masing masyarakat perbatasan membuat mereka melakukan berbagai upaya agar dapat bertahan hidup di wilayah perbatasan yang terpencil dan terisolasi.

Masyarakat Sangihe mengembangkan kerja sama lintas batas tradisional karena wilayah mereka masih belum didukung sepenuhnya oleh kehadiran negara. Letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan, sarana prasarana yang terbatas, dan kondisi alam yang terkadang tidak menguntungkan merupakan gambaran wilayah Kepulauan Marore, seperti halnya wilayah perbatasan lain di Indonesia. Namun, wilayah Kepulauan Marore memiliki potensi perikanan yang menjanjikan. Sulitnya memasarkan hasil perikanan ke wilayah Tahuna, Bitung, atau Manado menyebabkan masyarakat Sangihe bergantung pada Filipina bagian selatan dirasakan untuk pemasaran hasil perikanan. Oleh karena itu, sampai saat ini, mereka dengan ketahanan sosial yang dimiliki masih dapat bertahan di wilayah.

Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pernah berupaya melakukan kerja sama dengan Pemerintah Filipina. Namun, kerja sama yang pernah digagas tersebut tidak berlanjut karena ada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pergantian pemerintahan di Filipina. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih terus berupaya melakukan kerja sama itu mengingat masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Sangihe terkait upaya mengembangkan wilayah perbatasan di Pulau Marore dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Upaya kerja sama juga sudah sering dilakukan Pemerintah Kecamatan Marore dengan pemerintahan di Pulau Balut, misalnya pertandingan persahabatan dalam perayaan hari kemerdekaan Filipina di Batuganding. Setiap tahun pihak kecamatan diundang oleh 'mayor' (kepala daerah di Filipina setara dengan bupati). Setiap tahun, dengan seizin bupati, pihak kecamatan membawa delegasi kebudayaan dan olahraga pergi memenuhi undangan mayor yang berkedudukan di Batuganding. Perayaan ulang tahun kemerdekaan Filipina ini dimanfaatkan pula oleh orang-orang Sangihe di Filipina untuk bertemu dengan kerabatnya dari Indonesia. Keberadaan orang-orang Sangihe ini juga dimanfaatkan orang-orang Marore dan sekitarnya untuk memperluas jaringan perdagangan, pekerjaan, dan lain-lain.

Bentuk kerja sama yang sudah lama terjalin di wilayah perbatasan adalah aktivitas perdagangan lintas batas tradisional. Pulau Marore dan pulau-pulau sekitarnya memiliki laut yang kaya akan potensi ikan dan mata pencaharian utama penduduknya adalah nelayan. Selama ini, masih dirasakan kesulitan pemasaran hasil tangkapan. Untuk menjual ikan ke Tahuna, nelayan menghadapi banyak kendala, yakni jarak yang jauh dan biaya yang mahal serta kapal yang dapat mengangkut hasil tangkapan tidak setiap saat ada. Filipina kemudian jadi pilihan untuk memasarkan hasil tangkapan ikan karena lebih dekat dan lebih terjangkau. Jaringan kerja sama antara nelayan penangkap ikan dengan pengumpul ikan dan pembeli ikan di Filipina yang merupakan rantai pemasaran yang menguntungkan pihak yang terlibat. Menurut pengakuan salah seorang pengumpul ikan, keuntungan yang didapatkan dari menjual ikan tidak terlalu besar. Hasil penjualan ikan ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kemudian dibelikan barang-barang kebutuhan penduduk. Oleh pengumpul ikan, barang-barang tersebut dijual kepada penduduk Marore. Dari penjualan inilah mereka mendapatkan keuntungan. Hasil penjualan berupa uang tentunya tidak dapat dibelanjakan di Marore atau di Tahuna karena dalam bentuk uang Peso Filipina. Oleh karena itu, uang tersebut digunakan untuk membeli barang-barang yang bisa dijual kembali.

Kerja sama perdagangan ini juga dilakukan penduduk Marore atau pulau-pulau sekitarnya dengan penduduk perbatasan Filipina, baik warga negara Filipina (WNP) maupun warga negara Indonesia penduduk Filipina (WNIPP). Seperti yang telah dijelaskan, mereka sering melakukan kunjungan keluarga atau kepentingan lainnya ke wilayah perbatasan Indonesia menggunakan perahu *fuso*, seperti *pumpboat* tetapi lebih besar. Biasanya mereka datang membawa barang-barang kebutuhan penduduk untuk dibarter atau ditukar dengan ikan. Dalam hal barter ini, mereka mempunyai jaringan keluarga atau pertemanan dengan penduduk Filipina. Jika penduduk Filipina akan datang ke Marore, mereka memberi tahu sebelumnya, lalu datang membawa barang-barang atau makanan/minuman yang dibutuhkan penduduk Marore. Kalau penduduk Marore memerlukan peralatan untuk perahu *pumpboat* atau bahan-bahan untuk perahu (seperti tripleks, paku, dan lem) mereka akan membawanya dari Filipina. Dengan demikian, penduduk pulau Marore dan sekitarnya sangat terbantu dengan kerja sama yang terjalin selama ini dengan penduduk Filipina (warga negara Filipina dan orang-orang Sangir warga negara Indonesia yang tinggal di Filipina). Bentuk hubungan kerja sama seperti ini masih dipertahankan hingga kini. Hal seperti inilah yang membuat masyarakat di wilayah perbatasan dapat mempertahankan hidupnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

E. KESIMPULAN

Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada di wilayah perbatasan Sangahe, diperlukan perlakuan dan kebijakan khusus yang sifatnya melihat kebutuhan lokal. Kerja sama wilayah perbatasan memang sudah diatur dalam berbagai kesepakatan perjanjian. Aturan kerja sama yang tertuang dalam *Border Crossing Agreement* sampai saat ini tidak banyak mengalami perubahan dan masih berlaku untuk masyarakat perbatasan Indonesia-Filipina. Kesepakatan dalam hal penggunaan pas lintas batas dan wilayah perbatasan (*border area*) yang mempertimbangkan faktor sosial budaya dan sejarah cukup membantu masyarakat di wilayah perbatasan mempertahankan hubungannya dengan kerabatnya di Filipina Selatan. Selain *Border Crossing Agreement*, telah pula disepakati *Border Trade Agreement* yang mengalami beberapa kali penyempurnaan, terakhir kali disempurnakan pada 1974. Perjanjian kerja sama perdagangan lintas batas tersebut masih berlaku hingga saat ini dengan berbagai keterbatasan dan dianggap merugikan oleh masyarakat perbatasan. Oleh sebab itu, perjanjian ini perlu ditinjau ulang dan direvisi dengan memperhatikan keuntungan dan kerugian masyarakat perbatasan. Hal ini supaya tidak menimbulkan kerawanan dengan adanya perdagangan ilegal di wilayah perbatasan. Upaya pembaruan perjanjian kerja sama perlu segera ditindaklanjuti dengan kerja nyata agar masyarakat mendapat manfaat dan keuntungan dari perjanjian kerja sama tersebut. Masyarakat perbatasan saat ini masih bisa menjalin hubungan dengan masyarakat Filipina yang masih ada hubungan keluarga dan kekerabatan. Hal inilah yang membuat masyarakat perbatasan Marore bisa bertahan hidup di pulau kecil perbatasan.

Sesungguhnya semua ini terkait erat dengan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan yang masih jauh dari harapan. Keterbatasan sarana dan prasarana ekonomi serta transportasi menyebabkan potensi sumber daya laut, khususnya di kepulauan perbatasan, tidak dapat dipasarkan dengan cepat. Hal ini menyebabkan sebagian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masyarakat perbatasan masih sangat tergantung pada Filipina, terutama dalam hal pemasaran ikan—yang merupakan potensi utama perdagangan. Pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah masih belum dapat mengejar ketertinggalan dan keterisolasian wilayah perbatasan. Dengan potensi laut yang dimiliki, masyarakat wilayah perbatasan seharusnya dapat mengembangkan perekonomiannya tanpa tergantung negara lain. Kenyataannya, sampai saat ini ketergantungan tersebut masih ada. Sesungguhnya, interaksi dan hubungan kerja sama yang sifatnya tradisional dengan penduduk Filipina sangat membantu masyarakat Marore dan sekitarnya. Dengan ketahanan sosial yang dimiliki, masyarakat Mamore dapat mempertahankan hidup di tengah keterbatasan di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina.

Untuk meningkatkan kerja sama, diperlukan pengembangan akses dan aksesibilitas ekonomi, khususnya perdagangan di wilayah perbatasan. Perdagangan berpengaruh pada pola mobilitas pelintas batas. Hal ini juga akan berpengaruh pada penduduk di sekitar perbatasan yang mendapat manfaat dari aktivitas perdagangan. Penduduk yang semula hanya sebagai penonton dan mendapatkan keuntungan, dapat diberdayakan dan dilibatkan dalam aktivitas perdagangan. Hasilnya dapat untuk menyejahterakan penduduk di wilayah perbatasan itu sendiri. Kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan adalah modal yang sangat penting untuk eksistensi mereka sebagai masyarakat yang selama ini dianggap terbelakang, tertinggal, dan miskin. Kondisi masyarakat perbatasan akan berubah menjadi lebih maju secara sosial dan ekonomi. Kehadiran dan peran pemerintah sangat diharapkan untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah perbatasan agar tidak dimanfaatkan orang-orang asing serta mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.

Kerja sama lintas batas orang ataupun perdagangan antarnegara masih sangat diperlukan bagi wilayah perbatasan yang kondisi sosial ekonomi masyarakatnya masih penuh keterbatasan. Gambaran keter-

batasan masyarakat perbatasan dapat pula ditemukan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di wilayah Sebatik dan negara bagian Sabah. Perjanjian kerja sama antarnegara di kedua wilayah sudah disepakati sejak lama, seperti halnya perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Filipina. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang membuat kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Sebatik lamban meningkat. Bab selanjutnya menjelaskan pelaksanaan kerja sama lintas batas di Sebatik dan evaluasi kerja sama antarnegara Indonesia dan Malaysia yang sejak lama sudah dilakukan.

DAFTAR ACUAN

- Aswatini, ed. *Migrasi Kembali Orang-Orang Sangir-Talaud dari Pulau-pulau di Wilayah Filipina*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI, 1994.
- Aswatini, dkk. *Mobilitas Penduduk Wilayah Perbatasan Indonesia Filipina di Sulawesi Utara: Pola dan Determinan*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI, 1994.
- Aswatini, dkk. *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah Perbatasan (Kasus Kabupaten Sangihe Talaud, Daerah Perbatasan Indonesia-Filipina)*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI, 1997.
- Haba, John. "Sejarah dan hubungan Sosial Warga Masyarakat di Wilayah Perbatasan Laut Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Sangihe." Dalam *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Laut: Tinjauan dari Perspektif Sosial*, diedit oleh Mita Noveria. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2014.
- "Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana Impor Barang penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos, dan Kiriman melalui Jasa Penitipan."
- Nadjib, Mochamad. "Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*): Ancaman Kedaulatan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Laut." Dalam *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Laut: Tinjauan dari Perspektif Sosial*, diedit oleh Mita Noveria. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2014.

- “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman.”
- Pristiwanto. “Permasalahan Perdagangan Lintas Batas di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara.” *Patrawidya* 16, No. 2 (2015): 233–246.
- “Revised Agreement on Border Crossing Between The Republic of The Philippines and The Republic of Indonesia. Jakarta, 11 Maret 1975.”
- Setiawan, Bayu. “Kebutuhan Dasar Penduduk: Pemenuhan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesempatan Kerja di Wilayah Perbatasan Laut.” Dalam *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Laut: Tinjauan dari Perspektif Sosial*, diedit oleh Mita Noveria. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2014.
- Suharjo, Sri, dkk. *Marore Suatu Kampung di Wilayah Perbatasan*. Manado: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado, 2002.
- Tan-Cullamar, Evelyn. “The Indonesian Diaspora and Philippine-Indonesia Relation.” *Philippine Studies* 41, No.1 (1993): 38–50.
- “Trade Agreement between The Republic of Indonesia and The Republic of Philippines. Manila, 30 Mei 1969.”
- “Trade Agreement between The Government of Republic Indonesia and The Government of The Philippines. Jakarta, 8 Agustus 1974.”
- “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.”
- “Undang-Undang RI Nomor 77 Tahun 1957 tentang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Philipina.”
- Velasco, Djinora. “Navigating the Indonesian-Philippine Border: The Challenges of Life in the Borderzone.” *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies* 25 (2010): 95–118.
- Wulanmas, Frederik. “Impacts of the Implementation of Border Crossing Area Agreement between Indonesia and the Philippines at the Border of Miangas Island of North Celebes.” *Jurnal Hukum Internasional* 9, No.1. (Oktober 2011): 152–172.
- “2014–2016 Indonesia-Philippines Plan Action. Jakarta, 24 Februari 2014.”

FGD DAN WAWANCARA:

FGD dengan Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jakarta, 13 Oktober 2016.

Wawancara dengan JFS, Pemilik Toko dan Pedagang Ikan serta Barang-barang Kebutuhan Sehari-hari, Kecamatan Kepulauan Marore, 31 Mei 2016.

Wawancara dengan Kumpulan Penduduk Matutuang, Pelintas Batas, Kecamatan Kepulauan Marore, 2 Juni 2016.

Wawancara dengan MM, Pengepul Ikan di Marore/Kepala PLN Marore, Kecamatan Kepulauan Marore, 27 Mei 2016.

Wawancara dengan SO, Camat Kepulauan Marore, 1 Juni 2016.

Wawancara dengan YM, Pemilik Toko dan Pedagang Ikan serta Barang-barang Kebutuhan Sehari-hari, Pedagang Lintas Batas Tradisional, Kecamatan Kepulauan Marore, 31 Mei 2016.

BAB V

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Batas Di Sebatik

Esty Ekawati dan A. Wildan Masyhari

A. HUBUNGAN PENDUDUK SEBATIK DENGAN PENDUDUK TAWAU

Sebagian besar masyarakat Tawau merupakan keturunan Indonesia yang memang sudah lama tinggal di Tawau dan menjadi warga negara Malaysia. Tak sedikit pula masyarakat Sebatik yang memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang di Tawau. Pertalian keluarga inilah yang kemudian mewarnai aktivitas lintas batas di kedua wilayah tersebut. Selain dalam hal kunjung-mengunjungi antarkeluarga, hubungan bilateral kedua negara juga terjalin dalam aktivitas perdagangan tradisional.

Tulisan ini menguraikan hubungan penduduk Sebatik (Indonesia) dengan penduduk Tawau (Malaysia) yang kemudian melahirkan kerja sama lintas batas kedua negara. Bab ini juga menguraikan evaluasi kerja sama lintas batas yang selama ini terjalin.

Kehidupan sosial masyarakat di wilayah Sebatik tidak dapat dipisahkan dari kawasan strategis di sekitarnya, yaitu Nunukan sebagai ibu kota kabupaten; dan Sabah, Malaysia, sebagai negara tetangga. Kedua wilayah ini merupakan tempat tujuan perdagangan lintas batas dan kunjungan kekerabatan masyarakat di sekitar wilayah Sebatik.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sejak lama wilayah Sebatik dihuni masyarakat dari berbagai suku yang suka bermigrasi dan membuka lahan, seperti Suku Tidung, Bugis, Jawa, dan Timor Timur. Banyak warga daerah lainnya yang menetap, menikah dengan penduduk asli, hingga beranak-pinak dan menghasilkan keturunan campuran.¹ Tidak mengherankan jika semua komunitas yang ada mengklaim sebagai warga asli Sebatik. Menurut keyakinan Suku Tidung, misalnya, warga Tidung adalah penduduk asli yang sejak lama mendiami wilayah Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Tanah Tidung hingga ke wilayah Sebatik bagian Malaysia. Hal ini diperkuat bukti arkeologis peninggalan Kerajaan Tidung di Malaysia yang menunjukkan bahwa mereka pernah menguasai wilayah Sebatik.² Kerajaan Tidung memiliki hubungan baik dengan Kesultanan Bulungan yang menguasai pesisir Kalimantan Timur. Mayoritas Suku Tidung beragama Islam yang dibawa oleh pedagang dari Sulawesi.³ Meski kebanyakan mereka beragama Islam, masih ada yang menganut kepercayaan pada roh atau animisme. Kepala suku atau pemimpin spiritual berperan penting dalam hubungan sosial keagamaan di antara mereka, dan kerap diminta menghadiri acara-acara tradisional.

Mayoritas orang Tidung terbiasa hidup nomaden atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan formal. Namun, saat ini sudah banyak keturunan Suku Tidung yang menetap dan mendapatkan pendidikan formal. Hal ini juga disebabkan sudah semakin banyaknya penduduk asli yang terbuka pemikirannya dan

¹ Herman Hidayat, dkk., "Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Serawak dan Sabah)," dalam Riwanto Tirtosudarmo dan John Haba, ed. *Dari Entikong sampai Nunukan: Dinamika Perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Serawak-Sabah)* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).

² Andi Nur Aminah, "Tersingkirnya Orang-orang Tidung," *Republika*, Rabu, 5 Januari 2011, diakses pada 5 Januari 2011 dari http://ftp.unpad.ac.id/koran/republika/2011-01-05/republika_2011-01-05_025.pdf.

³ Andi Nur Aminah, "Tersingkirnya."

ingin mengembangkan sumber daya mereka di tengah persaingan dengan warga lainnya.⁴

Selain Suku Tidung, Suku Jawa adalah komunitas juga ada sejak lama dan ikut membantu membuka lahan di Sebatik—bahkan tergolong yang pertama menetap di wilayah ini. Hal ini terjadi seiring aktivitas pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia yang kebanyakan berasal dari Suku Jawa. Di samping Suku Jawa, suku dari wilayah Timor Timur (atau disebut orang Timor) mengklaim telah datang sejak lama sebelum orang Bugis dan orang Jawa. Kedatangan mereka tidak lepas dari peran Jepang yang saat itu menjajah Indonesia. Jepang membawa orang-orang dari Timor untuk dipekerjakan sebagai *Romusha* di wilayah Sebatik dan sekitarnya.

Suku Bugis adalah bagian dari komunitas penting di Sebatik yang juga sudah lama hidup dan menetap di wilayah ini. Mereka menganggap bahwa orang yang pertama kali membuka lahan adalah dari Suku Bugis yang berasal dari beragam subsukunya. Pada 1963, misalnya, Bedurahim dari Bugis Bone membuka lahan di Sei Pancang. Aktivitas pembukaan lahan ini diikuti penerusnya, yaitu Suratman dan Made dari Bugis Wajo yang membuka lahan di Sei Nyamuk. Berturut-turut setelahnya, Musa membuka lahan di Tanjung Aru, lalu Umar dan Lode dari Bugis Bajo yang membuka lahan di Sungai Bajo.⁵

Pasca-pembukaan lahan oleh sekelompok orang Bugis ini, orang Bugis dari beragam subsuku pindah dan menetap di Sebatik. Pola migrasi yang cukup besar ini, menurut Tirtosudarmo, merupakan bagian dari kebiasaan orang Bugis yang sudah berlangsung lama. Fenomena migrasi Suku Bugis ke seantero Nusantara bahkan sudah berlangsung sejak akhir abad ke-17.⁶ Oleh karena itu, tidak

⁴ Wawancara dengan S, warga Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, pada 11 Juni 2016.

⁵ Endang Rudiati, *Integrasi Ekonomi Lokal di Perbatasan*, (Disertasi Universitas Indonesia, 2012), 112–124.

⁶ Herman Hidayat, dkk., “Dinamika Daerah Perbatasan,” 110–125.

mengherankan jika sebagian kalangan memandang bahwa setelah sekelompok orang Bugis membuka lahan di Sebatik, migrasi Bugis mulai merambah ke daerah sekitarnya, termasuk Tawau, Malaysia, di mana sebagian besar penduduknya berasal dari keturunan Suku Bugis.

Kuatnya hubungan antara warga dari suku Bugis dan warga dari suku lainnya tidak lepas dari adat Suku Bugis yang menanamkan dua kepribadian, yaitu *Sirri'* dan *Pesse*. Secara bahasa, *Sirri'* dimaknai sebagai harga diri, kehormatan, atau rasa malu. *Sirri'* adalah sesuatu yang sakral yang wajib dijaga dengan segala daya dan upaya. Masyarakat Bugis akan berperilaku dengan penuh kehati-hatian agar kehormatan (*Sirri'*) dapat terjaga. *Pesse* secara sederhana dapat diartikan sebagai belas kasih terhadap sesama yang mengalami kesulitan. Ketika melihat sesamanya mengalami kesusahan, warga dari Suku Bugis sigap membantu. *Sirri'* dan *Pesse* inilah yang menguatkan hubungan sosial di antara mereka, baik antarwarga Suku Bugis, maupun dengan warga lainnya.⁷ Hubungan kerja sama perdagangan maupun kekerabatan yang sudah lama terjalin tampaknya tidak hanya terkait kepentingan keduniaan semata, tetapi ada nilai budaya menjaga kehormatan diri dan tenggang rasa yang kuat antarsesama.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, sejak lama warga di Sebatik mengandalkan sektor perkebunan (menanam kelapa, sawit, kakao, atau palawija). Sebagian lainnya, terutama warga yang tinggal di wilayah pesisir, mencari ikan menggunakan perahu dan alat tangkap tradisional. Sebagian hasil pertanian dan tangkapan ikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian lainnya dijual ke pengepul dari China atau Bugis yang berdagang di daerah Tawau, Sabah, Malaysia. Posisi geografis Tawau yang begitu strategis

⁷ Erman Syarif, dkk., "Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar dalam Proses Pembelajaran sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran Ilmu Sosial* 1, No. 1 (April 2016): 13–21.

serta daya tarik ekonomi yang kuat merupakan faktor penyebab Tawau menjadi pusat transit kaum migran dari Sebatik dan sekitarnya.

Melalui berbagai aktivitas ekonomi tersebut penduduk Tawau terhubung dengan daerah sekitarnya, baik itu dengan Nunukan Kalimantan Utara maupun Sebatik yang merupakan gerbang terdepan menuju Tawau.⁸ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian kalangan memandang Tawau sebagai tempat pertemuan orang-orang dari berbagai suku bangsa. Belum adanya garis batas atau pemisah satu negara dengan negara lainnya sehingga hubungan kedua wilayah sangat cepat dan dinamis.

Sebelum ada kerja sama aktivitas lintas batas, hubungan sosial antara masyarakat Sebatik Indonesia dan masyarakat Sebatik Malaysia cukup dinamis dan dilakukan secara tradisional. Hal itu dapat digambarkan dengan adanya hubungan kekerabatan yang kuat antarkedua wilayah. Banyak warga dari kedua wilayah itu saling berkunjung dalam suatu perayaan nasional atau sekadar memenuhi undangan kerabat. Interaksi antarwarga lokal pun berjalan harmonis dan tidak pernah terdengar adanya konflik sosial. Hal itu tidak lepas dari interaksi yang kuat dan rasa saling menghargai antarwarga. Selain itu, jarak yang dekat (hanya sekitar 45 menit) mendorong semakin maraknya aktivitas lintas batas kedua negara. Jarak tempuh melalui darat pun tidak terlalu sulit, meski medan agak terjal berbukit, dengan banyaknya “jalur tikus” untuk menuju ke wilayah Malaysia.

Adanya aktivitas lintas batas sedikit banyak telah memberikan manfaat bagi perekonomian warga Sebatik, terutama yang tinggal di daerah belantara sungai, seperti di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Banyak warga menjual hasil perkebunan dan pertanian ke Tawau, lalu membeli barang kebutuhan pokok dari Malaysia untuk dijual kembali. Interaksi semacam ini telah mendorong semakin

⁸ Hidayat, dkk., “Dinamika Daerah Perbatasan,” 110–135.

maraknya produk-produk Malaysia dan dominannya mata uang ringgit dalam aktivitas perdagangan lintas batas.

Pada umumnya, barang-barang yang diperjualbelikan warga perbatasan di wilayah Sebatik adalah hasil perkebunan dan pertanian. Hasil pertanian ini selanjutnya diolah pembeli atau pengepul di Tawau, Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang mendorong maraknya aktivitas perdagangan lintas batas di Sebatik. *Pertama*, jarak yang relatif dekat dengan Tawau sebagai pusat perekonomian di wilayah Sabah mendorong warga daerah sekitar perbatasan untuk ke Tawau. *Kedua*, ketersediaan barang yang terbatas menyebabkan kebutuhan pokok sehari-hari warga Sebatik, seperti minyak goreng, gula pasir, beras, dan sebagainya harus didatangkan dari Tawau. *Ketiga*, Sebatik sudah dikenal sebagai daerah pemasok hasil bumi dan perikanan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas perdagangan lintas batas memberikan keuntungan dalam aspek ekonomi kedua negara.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, wajar kiranya aktivitas perdagangan dilakukan secara intensif oleh warga di perbatasan. Aktivitas ini tak lepas dari interaksi kedua wilayah yang sangat kuat karena adanya kesamaan sosial-budaya. Hal ini mempermudah warga kedua wilayah untuk melakukan aktivitas perdagangan.⁹ Ada beberapa jalur tradisional yang kerap digunakan warga Sebatik untuk melakukan aktivitas perdagangan ke wilayah Malaysia, di antaranya melalui Sei Pancang, Sei Nyamuk, dan Lokpon. Ketiga daerah inilah yang dahulu kerap dilalui warga yang hendak ke Tawau, baik untuk kunjungan maupun perdagangan lintas batas. Seiring berjalannya waktu dan ditetapkannya kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, akses ke tiga wilayah ini dijaga ketat.

⁹ Hidayat, dkk., "Dinamika Daerah Perbatasan," 110–135.

Hubungan antara Sebatik dan Tawau tidak hanya memperlihatkan hubungan lintas batas dalam perdagangan, tetapi juga memperlihatkan hubungan kekerabatan. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas dan interaksi sosial berdasarkan pola interaksi kekerabatan di antara mereka, misalnya kunjungan rutin keluarga, upacara keagamaan, upacara hari besar nasional, dan sebagainya. Tradisi pulang kampung dan saling berkunjung antarkeluarga di Tawau dan Sebatik menunjukkan kuatnya hubungan antarkedua wilayah. Kunjungan kekerabatan dilakukan perorangan atau berkelompok dengan keluarga lainnya yang dianggap sebagai bagian dari keluarga.

Interaksi sosial tersebut telah dilakukan turun-temurun sejak sebelum kemerdekaan. Kemerdekaan dan terbentuknya negara-bangsa (*national-state*) justru memunculkan persoalan baru bagi penduduk yang sudah lama melakukan aktivitas lintas batas tradisional. Wilayah perbatasan tersebut menjadi tersekat oleh batas negara (*borders state*) dan menjadi kendala bagi tersendiri bagi para penduduk di kedua wilayah yang hendak melintas. Berbagai peraturan keimigrasian membedakan antara migran yang datang secara legal dan ilegal. Misalnya, untuk berkunjung ke Tawau, warga harus mempunyai kartu pelawat atau Pas Lintas Batas yang harus dilegalisasi atau distempel pihak imigrasi di Nunukan dan di Tawau. Untuk menjalani prosedur lintas batas sesuai prosedur, masyarakat merasa terbebani karena lamanya proses dan rumitnya persyaratan. Akibatnya, para pelintas batas tetap melakukan aktivitas lintas batas secara ilegal. Namun, kerja sama lintas batas antarkedua negara memberikan manfaat signifikan, terutama menekan aktivitas kejahatan transnasional yang semakin marak, seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *human trafficking*, perdagangan senjata, jalur terorisme, dan peredaran narkoba.

Meningkatnya dinamika sosial di wilayah perbatasan dan semakin maraknya aktivitas ilegal mendorong pemerintah kedua negara bekerja sama guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat wilayah perbatasan, terutama aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan

kunjungan kekerabatan. Kerja sama ini diwujudkan dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui *Border Crossing Agreement* (BCA) yang disepakati pada 1967. Kemudian pada 1970, pemerintah kedua negara menyepakati *Border Trade Agreement* (BTA) sebagai landasan hukum awal Pemerintah Indonesia dan Malaysia mengatur semua aktivitas lintas batas dan memberikan legitimasi hukum bagi masyarakat pelintas batas. Kerja sama ini diharapkan dapat menekan angka aktivitas lintas batas ilegal di wilayah perbatasan.

B. KERJA SAMA LINTAS BATAS NEGARA INDONESIA-MALAYSIA

Hubungan kekerabatan dan hubungan perdagangan tradisional antara orang Sebatik yang ada di Indonesia dan orang Tawau yang ada di Malaysia sudah terjalin sejak lama. Dalam perjalanannya, bentuk kegiatan lintas batas, seperti kunjungan rutin keluarga, upacara keagamaan dan aktivitas jual beli hasil alam beserta bahan-bahan kebutuhan pokok tetap berlangsung meskipun dipisahkan garis kedaulatan negara. Demi melegalkan aktivitas lintas batas tersebut, kedua negara menyepakati perjanjian lintas batas yang berlaku di kedua pulau. Perjanjian lintas batas tersebut adalah *Basic Arrangement on Border Crossing* dan *Basic Arrangements on Trade and Economic Relations* yang ditandatangani kedua negara pada 1967.

Berdasarkan kedua kesepakatan awal tersebut, pada 1970 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia menyepakati *Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Malaysia* (Persetujuan mengenai Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia) atau yang biasa disebut dengan istilah BTA (*Border Trade Agreement*) tahun 1970.

BTA yang disepakati pada 1970 merupakan instrumen dan landasan hukum bagi Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk

mengatur segala macam aktivitas lintas batas, terutama lintas batas barang antara masyarakat Sebatik dan masyarakat Tawau. Selain itu, ketentuan dalam BTA ini juga memberikan legitimasi hukum bagi segala aktivitas perdagangan masyarakat perbatasan sehingga perdagangan tradisional yang sudah lama terbangun di antara kedua wilayah tersebut tidak lagi disebut ilegal.

Poin penting yang diatur dalam BTA tahun 1970 menyangkut cakupan mata perdagangan lintas batas yang terdiri dari mata perdagangan laut dan darat. Dari kedua mata tersebut, barang yang bisa diperdagangkan dari Indonesia adalah hasil bumi dari Indonesia, kecuali minyak dan tambang. Dari pihak Malaysia, yang bisa diperdagangkan adalah bahan-bahan kebutuhan pokok dan peralatan penunjang industri. Nilai barang bawaan yang diperbolehkan tidak melebihi 600 Ringgit Malaysia per bulan. Wilayah yang diperbolehkan untuk perdagangan lintas batas di wilayah Indonesia adalah di Distrik Kubu, Bangko, Rupert, Bengkalis, Bukit Batu, Merbau, Pulau Rengsang, wilayah Kampar termasuk Kuala Kampar, bagian dari wilayah administrasi Pulau Riau, semua bagian dari Pulau Tambelan, dan distrik Nunukan. Wilayah yang diperbolehkan untuk perdagangan lintas batas di wilayah Malaysia adalah Johore Bahru, Batu Pahat, Malacca, Port Swettenham, Penang, Sematan, Kuching, Lundu, dan Tawau.¹⁰

Pada 16 Oktober 1973, delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia menandatangani enam perjanjian meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Perjanjian dasar mengenai kerja sama ekonomi dan teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia; 2) Perjanjian mengenai kerja sama teknik dan ilmu pengetahuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia; 3) Perjanjian mengenai fasilitas perjalanan untuk perdagangan lintas batas laut antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia; 4) Perjanjian dagang antara

¹⁰ Lihat *Agreement on Border Trade between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia*, ditetapkan pada 24 Agustus 1970.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia; 5) Perjanjian mengenai masalah-masalah perkapalan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia; 6) Perjanjian mengenai kehutanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia. Keenam perjanjian tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1974 tentang Perjanjian Dasar Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia.

Seiring peningkatan dinamika hubungan antarmasyarakat di wilayah perbatasan dan perubahan kondisi demografi di wilayah perbatasan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia pada 1984 menandatangani kesepakatan baru mengenai Lintas Batas atau *Agreement on Border Crossing between the Republic of Indonesia and Malaysia (BCA)*. Pemberlakuan BCA tahun 1984 ini sekaligus mencabut BCA tahun 1967 yang sudah berlaku selama hampir dua dekade. Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam BCA tahun 1984 adalah penambahan cakupan wilayah perbatasan dan penambahan pos lintas batas sebagai pintu sentral keluar-masuknya pelintas batas yang memiliki pas lintas batas. Penggunaan pas lintas batas ini hanya berlaku di wilayah perbatasan (*border area*) yang disepakati bersama.¹¹

Berdasarkan aturan tersebut, yang dimaksud pas lintas batas adalah dokumen yang dapat diberikan (atas permohonan untuk itu) kepada setiap orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) warga negara Indonesia atau warga negara Malaysia; 2) penduduk daerah perbatasan Indonesia atau daerah perbatasan Malaysia; 3) masuknya ke daerah perbatasan Indonesia atau daerah perbatasan Malaysia untuk salah satu atau semua keperluan tersebut di bawah

¹¹ Dalam konteks aturan ini maka yang masuk dalam *list of border area* di Sabah (Malaysia) adalah distrik Tawau dan di Kalimantan Timur (Indonesia) adalah kecamatan Lumbis, Kerayan, dan Nunukan.

Lihat: *Persetujuan Mengenai Lintas Batas Antara Republik Indonesia dan Malaysia*, ditetapkan pada 12 Mei 1984.

ini: (a) Kunjungan keluarga, (b) Kegiatan sosial/hiburan, (c) Keperluan keagamaan, (d) Usaha, (e) Tugas pemerintah, (f) Untuk keperluan lain yang telah disetujui oleh kedua belah Pihak; 4) bukanlah seorang yang dilarang atau dianggap tidak dikehendaki masuk Indonesia atau Malaysia menurut undang-undang imigrasi dari masing-masing negara.¹²

Pada 2006,¹³ Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia kembali menyepakati persetujuan baru mengenai BCA sekaligus mencabut BCA tahun 1984. Salah satu hal pokok yang diatur dalam BCA tahun 2006 selain penambahan wilayah perbatasan (*border areas*) adalah larangan bagi pemegang pas lintas batas untuk menggunakan kartu pas-nya sebagai izin bekerja di wilayah perbatasan.¹⁴

C. BENTUK KERJA SAMA LINTAS BATAS YANG DILAKUKAN MASYARAKAT LOKAL

Dinamika sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia dan Malaysia membuat pemerintah kedua negara sepakat melakukan perubahan atas perjanjian mengenai BCA dan BTA. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, perubahan perjanjian terkait BCA dan BTA dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.

Seperti diketahui, wilayah perbatasan, terutama Pulau Sebatik, secara geografis memiliki jarak tempuh yang jauh dari Indonesia (Kabupaten Nunukan atau Tarakan). Pulau Sebatik Indonesia justru memiliki jarak tempuh yang cukup dekat dengan Sebatik Malaysia (karena berbatasan darat) dan dengan Tawau (Malaysia). Akibatnya,

¹² Lihat *Persetujuan Mengenai Lintas Batas Antara Republik Indonesia dan Malaysia*, ditetapkan pada 12 Mei 1984.

¹³ Saat ini Pemerintah Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut.

¹⁴ Lihat: *Agreement Between the Government of Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing*, ditetapkan pada 12 Januari 2006.

segala kebutuhan pokok/sehari-hari masyarakat di Pulau Sebatik dapat terpenuhi dari Tawau. Beras, tepung, gula, minyak, gas (petronas) hingga barang-barang sekunder seperti sandal didapatkan masyarakat Sebatik dari Malaysia dengan harga yang terjangkau. Hal ini dikarenakan kebutuhan pokok, misalnya beras, dari Malaysia adalah barang-barang subsidi sehingga harga jualnya murah.¹⁵ Lebih dari 80% produk yang dijual di Sebatik berasal dari Malaysia. Hal ini terjadi karena Malaysia mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Sebatik dibandingkan Pemerintah Indonesia. Berdasarkan keterangan narasumber, pernah ada upaya dari Pemerintah Indonesia mengadakan operasi pasar di Sebatik, namun harga produk yang dijual lebih mahal dibandingkan harga produk dari Malaysia. Kemudahan akses dalam mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari menjadikan Malaysia sebagai pilihan masyarakat Sebatik untuk berbelanja.¹⁶

Berdasarkan BCA dan BTA, masyarakat wilayah perbatasan—terutama yang tinggal di Sebatik—yang melintas batas untuk kunjungan keluarga, kegiatan keagamaan, dan aktivitas niaga, harus melalui beragam prosedur. Masyarakat pemegang pas lintas batas datang ke pos lintas batas (PLB) untuk mendapatkan cap keberangkatan dari pihak imigrasi. Begitu pula di wilayah Tawau, pelintas batas juga harus mendapatkan cap kedatangan dari pihak berwenang di PLB Tawau. Apabila dalam kegiatan lintas batas tersebut para pelintas batas membawa barang bawaan dari Tawau Malaysia untuk dibawa ke Sebatik, nilai dari barang bawaan tersebut tidak boleh melebihi angka 600 Ringgit untuk satu pemegang pas lintas batas per bulan. Ketentuan ini berlaku juga bagi masyarakat Tawau yang berkunjung dan berniaga di Indonesia. Prosedur afirmasi ini lebih sederhana daripada prosedur formal bagi orang-orang yang tidak menetap di wilayah perbatasan apabila ingin berkunjung ke luar negeri. Mereka

¹⁵ M, Kepala Desa Sei Limau, Wawancara di Sebatik, 10 Juni 2016.

¹⁶ M, Kepala Desa Sei Limau, Wawancara di Sebatik, 10 Juni 2016.

harus memiliki paspor dan mendapatkan cap dari kantor imigrasi setempat.

Terkait dengan kebutuhan bahan bakar, seperti bensin atau solar, masyarakat Sebatik mendapatkannya dari Indonesia dengan harga yang sama seperti ditetapkan pemerintah. Lain halnya dengan kebutuhan gas yang masih mengandalkan pasokan dari Petronas, Malaysia. Gas dari Petronas ini distribusi dan ketersediaannya lebih baik dibandingkan gas elpiji dari Pertamina.

Di Sebatik sendiri, berdasarkan kesepakatan BCA, sudah dibangun pos lintas batas di daerah Sei Pancang. Masyarakat Sebatik ingin melakukan kegiatan lintas batas hanya perlu membawa pas lintas batas menuju pos tersebut. Setelah mendapatkan cap keberangkatan dari otoritas keimigrasian, mereka bisa naik perahu/boat dengan biaya kurang lebih Rp50.000 menuju Bandar Tawau, tempat membeli berbagai kebutuhan hidup. Masyarakat membutuhkan waktu sekitar 15–20 menit untuk menyeberang ke sana karena Pelabuhan Sei Pancang dan Bandar Tawau lokasinya cukup dekat. Bahkan, Bandar Tawau dan gedung-gedung yang ada di Tawau terlihat jelas dari Kantor Camat Sebatik Tengah yang lokasinya di atas bukit.

Sayangnya, sejak 2011, pos lintas batas (PLB) di Sei Pancang, Sebatik, ditutup. Penutupan ini terjadi karena pihak Malaysia memersoalkan sarana transportasi lintas batas yang tidak sesuai dengan standar internasional. Berdasarkan ketentuan *United Nation Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS), kapal untuk kegiatan lintas batas antarnegara wajib menggunakan material besi. Kapal yang beroperasi di Sei Pancang menggunakan material kayu. Keberatan pihak Malaysia ini menyebabkan aktivitas lintas batas, terutama bagi penumpang, hanya dapat dilakukan di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan yang kapal-kapalnya menggunakan material besi.¹⁷

¹⁷ Keterangan dari beberapa narasumber di Sebatik.

Akibat penutupan ini, masyarakat Sebatik yang ingin melakukan kegiatan lintas batas untuk kunjungan keluarga, upacara adat, agenda keagamaan, atau kegiatan perniagaan harus melalui Pelabuhan Tunon Taka terlebih dahulu. Di pelabuhan tersebut terdapat pos imigrasi yang memberikan cap keberangkatan dan kedatangan penumpang. Persoalannya, selain jarak tempuh menjadi lebih jauh, biaya perjalanan juga menjadi lebih mahal. Menurut pengakuan narasumber yang merupakan pelintas batas, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat Sebatik untuk melintas ke Bandar Tawau dari Nunukan mencapai Rp500.000,00/orang dengan jarak tempuh sekitar 3 jam.¹⁸ Biaya tersebut tentunya menjadi lebih mahal dibandingkan jika melakukan kegiatan lintas batas dari Sei Pancang.

Menjadi sebuah ironi ketika fasilitas Pas Lintas Batas—yang merupakan kebijakan afirmasi untuk mempermudah akses masyarakat di wilayah perbatasan—malah ditutup. Menurut petugas Imigrasi Nunukan, *cek point* di wilayah Nunukan meliputi: Pelabuhan Tunon Taka, Pelabuhan Liem Hie Jung (belum beroperasi), Pos Lintas Batas (PLB) Sei Pancang, PLB Sei Menggaris, dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD) Lumbis. PLB yang masih beroperasi adalah Pelabuhan Tunon Taka dan Lumbis. Sei Pancang saat ini hanya beroperasi untuk *border trade* (barang), bukan untuk penumpang. Namun, karena kapal barang memiliki kru maka kru kapal tetap harus melapor ke Imigrasi Nunukan.¹⁹ Layanan yang ditutup di PLB Sei Pancang adalah izin untuk penumpang karena alasan moda transportasi, tetapi tetap dibuka bagi barang bawaan/dagangan. Masyarakat Sebatik yang akan melakukan aktivitas perdagangan tradisional ke Tawau, kru kapalnya harus mengurus cap PLB ke Imigrasi di Nunukan. Barang dagangannya tetap bisa berangkat dari Sebatik ke Bandar Tawau karena pihak bea cukai dan Pos AL masih tetap bertugas di Sei Pancang untuk memeriksa barang bawaan. Pelintas batas yang membawa barang

¹⁸ Keterangan dari A, Pelintas Batas Sebatik saat FGD di Sebatik, 11 Juni 2016.

¹⁹ P, Petugas Imigrasi Nunukan, Wawancara di Pulau Nunukan, 13 Juni 2016.

dapat memanfaatkan kartu KILB. Untuk mendapatkan KILB, pelintas batas harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi pas lintas batas yang ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang.²⁰

Keberadaan PLB di Sebatik berdampak positif bagi masyarakat, yakni kemudahan akses lintas batas bagi masyarakat Sebatik dari dan menuju Tawau. Aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Sebatik pun lebih lancar. Hal ini memberikan nilai tambah bagi perekonomian Sebatik. Namun, sejak ditutupnya PLB di Sebatik, masyarakat kesulitan melakukan aktivitas lintas batas karena waktu tempuh dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar (harus ke Nunukan terlebih dahulu).

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, baik darat maupun laut, Sebatik menjadi pasar potensial bagi komoditas Malaysia. Praktik ini terjadi karena (saat tim ada di Sebatik) minimnya suplai bahan-bahan pokok dari Indonesia, seperti minyak, gula, beras, tepung, gas, dan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Sebatik memilih membeli barang kebutuhan pokok dari Bandar Tawau karena lebih murah dan lebih mudah didapat. Berdasarkan pengamatan tim saat di Sebatik, barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Sebatik, seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain setiap hari datang dari Tawau menggunakan kapal-kapal melalui Sungai Aji Kuning, Lolosalu, dan Sei Pancang (ketiga sungai ini merupakan batas antara Sebatik Indonesia dan Sebatik Malaysia).

Berdasarkan keterangan salah satu narasumber yang juga pedagang di Sebatik, aktivitas perdagangan di sungai-sungai tersebut legal karena dilakukan oleh pedagang Malaysia dan masuk di wilayah

²⁰ Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) adalah kartu yang dikeluarkan oleh kantor pabean yang membawahi pos pemeriksaan lintas batas yang diberikan kepada pelintas batas setelah dipenuhi persyaratan tertentu. Lihat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, "Impor Barang Pelintas Batas," diakses pada 31 Mei 2017 dari <http://bctemas.beacukai.go.id/faq/impor-barang-pelintas-batas/>.

Malaysia. Bahkan, di dekat patok 3 terdapat gudang milik pengusaha Tawau yang fungsinya menampung bahan pokok (sembako) dari Tawau setiap harinya. Aktivitas perdagangan ini menjadi ilegal ketika bahan-bahan kebutuhan sehari-hari tersebut (beras, gula, minyak, gas, dan lain-lain) dijual ke pedagang-pedagang Sebatik Indonesia. Pemerintah Malaysia melarang penjualan komoditas tersebut di luar Malaysia karena sembako adalah barang subsidi bagi penduduk Malaysia.

Akibat ketidakmampuan Pemerintah Indonesia memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat Sebatik, produk-produk Malaysia menjadi pilihan masyarakat di sana. Selain harga yang lebih murah dan kualitas produk yang lebih bagus, kepastian stok barang pun menjadi alasan utama masyarakat Sebatik memilih produk Malaysia. Produk yang sebagian besar didatangkan dari Tawau, misalnya beras, gula, minyak, dan gas. Bahkan, berlebihnya suplai gas di Tawau bagi masyarakat Sungai Pukul (Sebatik Malaysia) menjadi peluang bisnis bagi para pedagang. Gas tersebut kemudian dijual ke Sebatik Indonesia. Kampung Sungai Pukul merupakan salah satu kampung dalam wilayah administrasi pemerintahan Distrik Tawau. Letaknya di Pulau Sebatik wilayah Malaysia dan posisinya berhadap-hadapan dengan Bandar Tawau. Berdasarkan pengamatan tim saat di Sungai Pukul, setiap kali suplai tabung gas bersubsidi (Petronas) datang ke Sungai Pukul, beberapa warga (baik warga Sebatik Indonesia maupun Sebatik Malaysia) mendistribusikan tabung gas tersebut ke Desa Aji Kuning dan sekitarnya melalui jalan darat, melintasi hutan dan perkebunan sawit atau kakao menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi agar bisa memuat empat sampai lima tabung gas sekali jalan. Jumlah tabung gas yang didistribusikan dari Sungai Pukul ke wilayah desa-desa di Sebatik Indonesia tergolong banyak dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.²¹

²¹ Pengamatan penulis di wilayah Sungai Pukul, Sebatik Malaysia, 11 Juni 2016.

Berdasarkan keterangan salah satu pedagang di Sebatik, aktivitas ilegal itu bisa terjadi jika ada kesepakatan kedua belah pihak.

“Sebenarnya, barang-barang subsidi Malaysia tidak boleh diekspor sehingga dalam pelaksanaannya banyak pedagang Indonesia yang menggunakan jalur ilegal. Mereka membayar penjamin kapal (juragan) sebesar Rp3 juta per tahun dan biaya sewa kapal Rp200–300 ribu untuk nilai barang bawaan Rp10 juta. Tabung gas dan daging adalah dua komoditas yang tidak boleh keluar dari Malaysia. Namun, komoditas ini bisa dibeli jika masyarakat punya *ID card* Malaysia sehingga bisa jadi yang dilakukan pedagang Indonesia adalah pinjam nama orang Malaysia.”²²

Aktivitas ilegal ini banyak terjadi melalui jalur darat di sekitar Desa Aji Kuning yang tidak ada PLB-nya—yang ada hanya Pamtas yang jumlah personalnya tidak banyak. Mudahnya peredaran tabung gas milik Petronas di Sebatik wajar karena gas dari Pemerintah Indonesia (Pertamina) belum mampu menjangkau kebutuhan di Sebatik. Gas subsidi 3 kg milik Pertamina hanya datang 3–4 bulan sekali dan jumlahnya pun tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.²³

Berbeda dengan tabung gas, kebutuhan pokok lainnya (minyak goreng, beras, gula, tepung, dan bensin) didapat masyarakat Sebatik dari Bandar Tawau lewat kapal-kapal Malaysia yang datang tiap hari ke Sungai Aji Kuning. Satu kapal biasanya berisi ratusan kilogram bahan-bahan pokok yang diperlukan masyarakat Sebatik. Setelah bahan-bahan pokok selesai diturunkan, kapal yang kosong itu diisi barang-barang hasil alam, seperti sawit, lalu berlayar kembali ke Tawau.²⁴

²² Keterangan dari B, salah seorang pedagang besar di Sebatik, 10 Juni 2016.

²³ S, Warga Desa Aji Kuning, Wawancara di Sebatik, 12 Juni 2016.

²⁴ Pengamatan penulis di sekitar sungai Aji Kuning dan sekitarnya, 10–12 Juni 2016.

Selain kapal-kapal besar yang membawa bahan kebutuhan pokok, tim juga masih menyaksikan kapal/perahu untuk perdagangan tradisional masyarakat Sebatik di Sungai Aji Kuning. Barang dagangannya berupa hasil alam, seperti sayur-mayur, buah-buahan, kelapa, kakao, pisang, dan tujuannya ke Tawau. Kapal/perahu yang digunakan untuk aktivitas lintas batas tersebut teregister oleh otoritas Tawau,²⁵ tetapi tidak sedikit kapal yang merupakan milik orang Sebatik Indonesia. Kapal barang tersebut bukan kapal besi, namun tetap digunakan dalam lalu lintas perdagangan Sebatik-Tawau karena pada dasarnya Tawau masih menerima penjualan hasil alam masyarakat Sebatik, seperti pisang, sayur-sayuran, coklat, dan sawit. Setiap harinya ratusan sampai ribuan kilo pisang dan hasil alam lainnya dari Sebatik dijual ke Tawau melalui Pelabuhan Lokpon.

Aparat keamanan kedua negara bukannya tidak mengetahui aktivitas tersebut. Sistem pengamanan, seperti kamera pengawas dan radar modern, dengan mudahnya bisa mendeteksi kapal yang melintasi batas antara dua negara. Namun, dengan pola kearifan tertentu, mereka menganggap aktivitas ilegal tersebut sebagai cara masyarakat Sebatik untuk menyambung hidup. Seperti yang diungkapkan salah satu petugas keamanan Sebatik, "...karena jika aturan mengenai keharusan menggunakan moda kapal besi maka ekonomi masyarakat Sebatik bisa mati."²⁶

Selain kerja sama dalam bidang perniagaan, masyarakat Sebatik juga sering mengadakan acara-acara khusus untuk mempererat tali kekeluargaan. Setiap tanggal 17 Agustus, misalnya, mereka menyelenggarakan kompetisi bulutangkis, bola voli, dan sepak bola. Pesertanya tidak hanya penduduk Indonesia karena panitia juga mengundang keluarga-keluarga mereka yang tinggal di Sungai Pukul dan Tawau untuk turut serta. Kedatangan orang-orang Sungai Pukul dan Tawau dalam memenuhi undangan tersebut tentu saja tidak

²⁵ Kapal/perahu yang teregister Otoritas Tawau ditandai dengan nomor seri "TW".

²⁶ K, salah seorang petugas keamanan, Wawancara di Sebatik, 12 Juni 2016.

melalui prosedur imigrasi yang seharusnya. Mereka datang berkelompok menaiki sepeda motor, tetapi mendapat izin dari pihak desa, kecamatan, dan keamanan. Aparat keamanan selalu dilibatkan dalam kegiatan ini, kadang menjadi wasit atau ikut bermain.²⁷

Dalam lingkup keluarga, apabila ada pesta pernikahan, entah itu di Sebatik atau di Tawau, keluarga masing-masing mempelai yang berada di seberang batas pasti menyempatkan diri hadir. Sebelum pos lintas batas di Sei Pancang ditutup, pelintas batas biasa datang atau pergi melalui jalur resmi tersebut. Saat ini, mereka jarang menghadiri undangan acara karena harus menyisihkan uang dengan nominal yang cukup besar sebagai biaya transportasi—harus ke Nunukan terlebih dahulu.²⁸

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa jumlah WNI yang melakukan aktivitas lintas batas di Pelabuhan Tunon Taka cukup banyak. Meski PLB Sei Pancang ditutup untuk aktivitas lintas batas orang, tidak serta-merta aktivitas lintas batas terhenti. Barang-barang masih bisa keluar masuk dari Sei Pancang asalkan orang/kru kapal mendapatkan cap dari pihak imigrasi di Nunukan. Yang lebih penting, mereka harus memiliki KILB yang dikeluarkan otoritas Bea Cukai Nunukan.

²⁷ H, Camat Sebatik Tengah, Wawancara di Sebatik, 12 Juni 2016 dan keterangan dari Dan Pos PAM, Sebatik, 10 Juni 2016.

²⁸ S, warga Aji Kuning, Wawancara di Sebatik, 10 Juni 2016.

Tabel 5.1 Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan 2014²⁹

BULAN	LALU LINTAS WNI (dalam orang)											
	PASPOR				PAS LINTAS BATAS						JUMLAH	
	TUNON TAKA		TUNON TAKA		INHUTANI		S.PANCANG		LUMBIS		BRK	DTG
	BRK	DTG	BRK	DTG	BRK	DTG	BRK	DTG	BRK	DTG	BRK	DTG
JANUARI	6.768	6.008	3.233	4.316	207	207	334	334	132	49	10.674	10.914
FEBRUARI	5.671	5.956	2.903	3.816	192	192	359	359	64	31	9.189	10.354
MARET	6.695	6.394	3.083	4.087	259	259	347	347	100	58	10.484	11.145
APRIL	5.855	5.213	2.139	3.227	266	266	279	279	102	3	8.641	8.988
MEI	7.594	5.466	2.921	3.405	266	266	289	289	107	24	11.177	9.450
JUNI	4.073	5.932	3.276	3.280	232	232	214	214	95	48	7.890	9.706
JULI	6.763	5.711	2.473	3.434	250	250	2.060	2.060	820	381	12.366	11.836
AGUSTUS	8.837	6.217	2.466	3.637	167	167	226	226	96	20	11.792	10.267
SEPTEMBER	8.215	5.848	2.407	3.404	181	181	235	235	86	4	11.124	9.672
OKTOBER	7.543	5.485	2.293	3.008	201	201	282	282	90	90	10.409	9.066
NOVEMBER	8.036	5.531	2.475	3.247	206	206	185	185	206	93	11.108	9.262
DESEMBER	6.886	6.683	2.616	3.338	226	226	138	138	73	57	9.939	10.442
JUMLAH	82.936	70.444	32.285	42.199	2.653	2.653	4.948	4.948	1.971	858	124.793	121.102

Terkait aktivitas lintas batas dan perdagangan tradisional, tampaknya perjanjian BTA antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu direvisi. Masyarakat Sebatik sendiri berharap Pos Lintas Batas Sebatik untuk penumpang dibuka kembali. Selain itu, pelintas batas yang biasa melakukan aktivitas perdagangan berharap kuota barang bawaan bisa ditambah, tidak hanya 600 RM. Alasannya, kebutuhan masyarakat semakin beragam dan meningkat, begitu juga komoditas yang bisa dijual ke Malaysia. Diharapkan masyarakat Sebatik tidak

²⁹ Kantor Imigrasi Nunukan, 2016.

hanya bisa menjual mentah hasil alamnya, tetapi juga bisa menjual barang olahan maupun barang setengah jadi.

Beberapa poin perjanjian BCA 1984 dan BTA 1970 yang menjadi dasar aktivitas lintas batas masyarakat perbatasan Indonesia semestinya dapat direvisi untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat perbatasan saat ini. *Pertama*, cakupan kegiatan lintas batas yang dibolehkan dalam BCA semestinya dapat diperluas. Selama ini, kegiatan yang dibolehkan adalah kunjungan keluarga, kegiatan sosial/hiburan, keperluan keagamaan, usaha/perdagangan, tugas pemerintah, dan keperluan lain yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kegiatan lintas batas yang perlu ditambah adalah keperluan kesehatan (berobat), pendidikan (sekolah), dan pekerjaan.

Kedua, terkait dengan komoditas barang dagangan yang diatur dalam BTA 1970 Pasal 1. Barang yang boleh diperdagangkan dari Indonesia adalah produk pertanian, sementara yang tidak boleh adalah minyak bumi dan hasil tambang. Komoditas dari Malaysia yang boleh diperdagangkan adalah bahan-bahan kebutuhan pokok dan peralatan penunjang untuk industri lainnya. Padahal Sebatik juga menjadi penghasil produk perikanan dan produk olahan, seperti keripik pisang, kerupuk ikan, dan minyak kelapa sawit (CPO).

Ketiga, terkait nilai barang bawaan yang diatur dalam Pasal 3 BTA 1970. Berdasarkan perjanjian tersebut, barang yang dibawa pelintas batas via darat tidak boleh melebihi 600 RM per bulan dan perdagangan lintas batas laut tidak boleh melebihi 600 RM per perahu per perjalanan. Nilai 600 RM ini dinilai masyarakat Sebatik sudah tidak lagi relevan. Masyarakat berharap nilai barang bawaan dapat dinaikkan menjadi US\$ 500.

D. KESIMPULAN

Masyarakat Sebatik pada umumnya tidak melihat adanya sekat perbatasan. Antara Masyarakat Sebatik (Indonesia) dan Tawau (Malaysia) saling terhubung dan saling membutuhkan dengan adanya kunjungan

keluarga dan perdagangan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja Indonesia oleh Malaysia juga cukup besar. Interaksi budaya, olahraga, dan aktivitas kepemudaan juga kerap dilakukan masyarakat di wilayah Sebatik. Dari sisi ekonomi, masyarakat Sebatik dapat menjual hasil alamnya, seperti kelapa sawit, pisang, cokelat, dan lainnya, ke Tawau (Malaysia). Masyarakat Sebatik (Indonesia) mendapat kemudahan akses bahan pokok (sembako) dari Malaysia yang harganya murah.

Jika dilakukan evaluasi kerja sama lintas batas di kedua negara terkait dengan aktivitas ekonomi, BTA 1970 sebenarnya menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Aturan yang hanya membolehkan Sebatik menjual mentah hasil alam ke Malaysia menyebabkan nilai tukarnya rendah. Demikian sebaliknya, besarnya peredaran barang-barang Malaysia di Indonesia menimbulkan ketergantungan masyarakat Sebatik terhadap Malaysia. Dengan demikian, daya tawar Sebatik terhadap Malaysia menjadi lebih rendah.

Persoalan perbatasan menjadi ancaman ketika hanya dipandang dari sisi keamanan. Padahal interaksi antara masyarakat di wilayah perbatasan tidak selalu negatif. Interaksi perdagangan, kunjungan keluarga, dan aktivitas budaya dan olahraga justru dapat mempererat tali persaudaraan kedua negara. Bahkan dulu ketika di Pusat sedang ramai-ramainya konflik Ambalat, masyarakat di kedua negara ini tidak terpengaruh. Mereka tetap harmonis dan bekerja sama seperti tidak terjadi konflik.

Ditutupnya Pos Lintas Batas Sebatik untuk penumpang sejak tahun 2011 berdampak pada keengganan masyarakat mengurus perizinan/Pas Lintas Batas ketika akan melakukan kunjungan dari dan ke Malaysia. Mahalnya biaya dan waktu tempuh yang lebih lama untuk sampai ke Nunukan menjadi alasan masyarakat enggan ke Nunukan. Akibatnya, banyak pelintas batas yang melakukan kunjungan ke Malaysia secara ilegal tanpa melakukan pengecepan di Pos Lintas Batas Nunukan. Dampak lain dari ditutupnya PLB bagi penumpang di Sei Pancang, yakni adanya pihak-pihak tidak bertanggung

jawab yang menyelundupkan barang terlarang melalui jalur darat dan laut. Inilah yang menjadi tantangan besar wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, selain keamanan wilayah perbatasan, kemudahan akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan menjadi hal penting yang selayaknya dipenuhi Pemerintah Indonesia.

Pasang surut aktivitas lintas batas antara warga Sebatik dan Tawau dipengaruhi oleh konstelasi sosial-politik kedua negara. Kerja sama yang dijalankan antara Sebatik Indonesia dan Tawau Malaysia selama ini memberikan beragam dampak bagi warga di perbatasan tersebut. Dampak-dampak tersebut diuraikan lebih lanjut pada Bab VI.

DAFTAR ACUAN

- “Agreement Between The Government of Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing.” Ditetapkan pada 12 Januari 2006
- Aminah, Andi Nur, “Tersingkirnya Orang-orang Tidung.” *Republika*, Rabu, 5 Januari 2011. Diakses pada 5 Januari 2011 dari http://ftp.unpad.ac.id/koran/republika/2011-01-05/republika_2011-01-05_025.pdf.
- “Data Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan 2014.” Kantor Imigrasi Nunukan. 2014.
- Hidayat, Herman dkk. “Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Serawak dan Sabah).” Dalam *Dari Entikong Sampai Nunukan: Dinamika Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Serawak-Sabah)*, diedit oleh Riwanto Tirtosudarmo dan John Haba. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- “Persetujuan Mengenai Lintas Batas antara Republik Indonesia dan Malaysia.” Ditetapkan pada 12 Mei 1984.
- Rudiatin, Endang. “Integrasi Ekonomi Lokal di Perbatasan.” Disertasi Universitas Indonesia, 2012.
- Syarif, Erman, dkk. “Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar dalam Proses Pembelajaran sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).” *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran Ilmu Sosial* 1 No. 1 (April 2016): 13–21.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. “Impor Barang Pelintas Batas.” Diakses pada 31 Mei 2017 dari <http://bctemas.beacukai.go.id/faq/impor-barang-pelintas-batas/>.

WAWANCARA

Wawancara dengan A, Pelintas Batas, Sebatik, 11 Juni 2016.

Wawancara dengan B, Pedagang, Sebatik, 10 Juni 2016.

Wawancara dengan H, Camat Sebatik Tengah, 12 Juni 2016.

Wawancara dengan K, Petugas Keamanan, Sebatik, 12 Juni 2016.

Wawancara dengan Komandan Pos PAM Sebatik, 10 Juni 2016.

Wawancara dengan M, Kepala Desa Sei Limau, Sebatik, 10 Juni 2016.

Wawancara dengan P, Petugas Imigrasi, Nunukan, 13 Juni 2016.

Wawancara dengan S, Warga Aji Kuning, Sebatik, 10 Juni 2016.

BAB VI

Dampak Kerja Sama Lintas Batas terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat Marore dan Sebatik

Sandy Nur Ikfal Raharjo

A. DAMPAK KERJA SAMA LINTAS BATAS BAGI KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT MARORE

Beberapa poin kerja sama lintas batas sudah disepakati oleh Indonesia dan negara tetangga serta diimplementasikan di Kepulauan Marore dan Pulau Sebatik. Kerja sama tersebut secara garis besar terdiri atas dua jenis. Pertama, *Border Crossing Agreement*, yaitu kesepakatan Indonesia-Filipina dan Indonesia-Malaysia untuk memfasilitasi lintas batas tradisional warga di kawasan perbatasan berupa kunjungan keluarga, ziarah keagamaan, kegiatan sosial budaya, dan rekreasi. Warga perbatasan dipermudah dengan kartu pas lintas batas (yang lebih sederhana dari paspor) dan pembukaan pos lintas batas (*exit/entry points*).

Jenis kerja sama yang kedua adalah *Border Trade Agreement*, yaitu kesepakatan Indonesia-Filipina dan Indonesia-Malaysia untuk membebaskan bea cukai ekspor-impor bagi barang-barang bawaan para pelintas batas dengan kuota tertentu. Untuk Indonesia-Filipina di Kepulauan Marore ditetapkan kuota US\$150 per perahu/perjalanan atau US\$1.500 per kumpit (kapal dengan kapasitas maksimal 7GT).¹

¹ *Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia*

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010, nilai pabean yang dibebaskan bea masuk sebesar US\$250 per orang/bulan.² Di Pos Lintas Batas Satu Atap Marore, kuota US\$250 inilah yang dijadikan standar. Untuk Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, BTA 1970 menetapkan kuota perdagangan lintas batas laut sebesar 600 ringgit per perahu/perjalanan dengan kapasitas maksimal 20 m³ (setara dengan 7GT) atau 600 ringgit/orang/bulan untuk lintas batas darat. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 6.1.

Tabel tersebut menggambarkan bahwa pemerintah memfasilitasi pelaksanaan kerja sama lintas batas di Kepulauan Marore dan Pulau Sebatik, baik dalam bentuk aktivitas lintas batas tradisional maupun perdagangan. Namun, perlu analisis bagaimana pelaksanaan kerja sama lintas batas tersebut berdampak pada kondisi ketahanan sosial masyarakat di pulau-pulau kecil terluar. Hal inilah yang menjadi fokus dalam bab ini.

Lee dan Forss mengatakan bahwa kerja sama lintas batas berperan menghilangkan hambatan fisik dan psikologis sehingga memperkuat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal menuju integrasi wilayah.³ Tulisan ini tidak hanya melihat aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga seluruh aspek/modal dalam konsep ketahanan sosial, yaitu modal alam, fisik, SDM, ekonomi dan keuangan, sosial, dan politik/kelembagaan.

and the Government of the Republic of the Philippines, 8 Agustus 1974.

² Pasal 12 (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman.

³ Sangsoo Lee dan Alec Forss, *Dispute Resolution and Cross-Border Cooperation in Northeast Asia: Reflections on the Nordic Experience (Asia Paper)* (Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2011).

Tabel 6.1 Kerja Sama Lintas Batas Indonesia-Filipina dan Indonesia-Malaysia⁴

Jenis Kerja Sama	Sumber Dokumen	Wilayah Cakupan	Aktivitas	Pas Lintas Batas	Pos Lintas Batas	Nilai Kuota	Komoditas Barang
Lintas Batas Tradisional Indonesia-Filipina	BCA 1956	Indonesia: Kepulauan Talaud-Sangir, Kepulauan Miangas, Kepulauan Kawio, dan Pulau Nunukan Filipina: Kepulauan Balut-Sarangani, Kepulauan Sibutu, Pulau Simanul, dan Pulau Manuk Manka	Bisnis, ⁴ kunjungan keluarga, ziarah keagamaan, dan atau rekreasi	Masa Berlaku: 30 hari			
Lintas Batas Tradisional Indonesia-Malaysia	BCA 1984 dan BCA 2006 ⁵	Indonesia: Kecamatan perbatasan di Kalbar, Kaltim, Riau, dan Kepri Malaysia: distrik dan subdistrik perbatasan di Sabah, Sarawak, Malaka, Johor, Selangor, dan Negeri Sembilan	kunjungan keluarga, sosial/budaya, perdagangan lintas batas, tugas pemerintahan, dan tujuan-tujuan lain yang disepakati oleh kedua pihak	Masa Berlaku: 2 tahun			
Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Filipina	BTA 1974 PMK 188/2010	Indonesia: Kepulauan Nanusa, Kepulauan Kawio, dan Kepulauan Bukide. Filipina: Kepulauan Balut	Perdagangan Lintas Batas			US\$150.00/perahu (vessel) atau US\$1.500.00 per kumpit (boat), atau US\$250/orang/bulan	Indonesia: produk pertanian dan produk lainnya buatan asli kawasan perbatasan, kecuali <i>mineral oil</i> dan <i>ores</i> Filipina: barang-barang kebutuhan harian/konsumsi, termasuk peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan di bagian kawasan perbatasan Indonesia
Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia	BTA 1970	Indonesia: Kabupaten Kubu, Bangko, Rupert, Bengkalis, Bukit Batu, Merbau, Pulau Rengas, Kampar, bagian wilayah administratif di Kepri, Pulau Tambelan, dan Nunukan.. Malaysia: Johor Bahru, Batu Pahat, Malaka, Pelabuhan Swettenham, Penang, Sematan, Kuching, Lundu, dan Tawau	Perdagangan Lintas Batas			46 crossing points, termasuk Numukan dan Sungai Pancang	Indonesia: produk pertanian dan produk lain, kecuali <i>mineral oil</i> dan <i>ores</i> Malaysia: barang-barang konsumsi kebutuhan sehari-hari termasuk peralatan rumah tangga, dan perkakas, yang dibutuhkan oleh industri

Buku ini tidak diperjualbelikan.

⁴ Data diolah penulis.

⁵ Tujuan bisnis ini kemudian dikembangkan menjadi *Border Trade Agreement 1974*.

⁶ BCA 2006 sampai sekarang belum diratifikasi.

Pertama, modal alam di Kepulauan Marore. Kondisi menunjukkan bahwa wilayah ini kaya sumber daya laut, terutama ikan. Masyarakat dapat mencari ikan secara optimal pada musim teduh antara April hingga Juni. Namun, wilayah ini juga rawan terhadap perubahan cuaca, terutama pada bulan Desember–Februari karena angin bertiup sangat kencang.⁷ Pada periode ini, kapal perintis maupun kapal Pelni jarang merapat ke pelabuhan; para nelayan tidak dapat mencari ikan di laut. Selain itu, wilayah Kabupaten Marore juga memiliki tanah yang tidak terlalu subur karena curah hujan yang relatif rendah dan kontur tanah yang berbatu. Dari tiga pulau utama, hanya Pulau Kawio yang relatif subur untuk menanam umbi-umbian dan jeruk limau (untuk membuat sambal dabu-dabu). Dengan demikian, perkebunan juga tidak dapat diandalkan sebagai mata pencaharian ketika musim angin kencang datang.

Pascapenerapan kerja sama lintas batas, baik BCA maupun BTA, kondisi tersebut tidak banyak berubah. Hal ini dikarenakan kerja sama lintas batas tidak memfasilitasi—mungkin tidak mampu memfasilitasi—perubahan modal alam untuk menjadi lebih baik. Hanya ada sedikit perubahan dalam ketersediaan air minum. Hal itu karena ada bantuan dari Pemerintah Pusat Indonesia yang memberikan sumur bor untuk masing-masing rumah di sana.

Kedua, modal fisik. Sarana dasar, seperti sarana pendidikan dan kesehatan, sudah cukup memadai dan tersebar di tiga pulau berpenghuni. Tiga pulau di Kepulauan Marore juga sudah memiliki pelabuhan dengan fasilitas yang cukup lengkap sebagai bagian dari program Kementerian Perhubungan. Kapal-kapal perintis pun berlayar ke wilayah tersebut, yaitu Sabuk Nusantara 38 dan 51, Kapal Berkat Taloda, dan Meliku Nusa. Namun, jadwal kedatangan kapal tidak pasti karena masalah suplai BBM. Jika BBM ada, kapal berangkat. Jika tidak ada, kapal menunggu di Pelabuhan Bitung atau Tahuna. Akses listrik belum merata, hanya Pulau Marore yang menikmati

⁷ Puskesmas Marore, *Profil Puskesmas Marore Tahun 2015* (Marore: Puskesmas Marore, 2016), 8.

listrik 24 jam, sementara Kawio dan Matutuang belum menikmatinya.⁸

Dalam pelaksanaan kerja sama lintas batas, modal fisik ini juga belum menjadi bidang yang diatur. Padahal potensi untuk kerja sama ada, misalnya dengan membangun jalur transportasi kapal penumpang lintas negara antara Tahuna-General Santos yang melewati Kepulauan Marore. Wacana kapal penumpang lintas batas ini pernah diangkat, tetapi surut karena dianggap tidak akan memenuhi *economy of scale* dengan calon jumlah penumpang yang sedikit sehingga nantinya akan merugi. Jika pihak swasta tidak mau melakukannya, pemerintah kedua negaralah yang harus membiayai pembangunan jalur kapal lintas batas tersebut. Hal ini diharapkan membantu masyarakat perbatasan yang selama ini menyeberang dengan perahu sendiri yang biayanya mahal dan rawan diterpa gelombang besar. Sudah beberapa kali terjadi kasus kapal warga Kepulauan Marore tenggelam diterjang ombak. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan kerja sama lintas batas Indonesia-Filipina pada masa yang akan datang.

Ketiga, modal sumber daya manusia. Tingkat melek huruf masyarakat Kepulauan Marore cukup baik, yaitu Kampung Marore sebesar 98,27%, Kampung Kawio 94,42%, dan Kampung Matutuang 89,22%.⁹ Selain itu sudah terdapat satu SMA di Pulau Marore. Namun, untuk kuliah di perguruan tinggi, masyarakat harus pergi ke ibu kota kabupaten atau provinsi. Dari sisi kesehatan, fasilitas kesehatan juga sudah cukup memadai dengan adanya satu puskesmas rawat inap di ibu kota kecamatan dan pusku di dua pulau lainnya. Kendalanya adalah tidak adanya dokter yang bertugas (selama lima bulan saat penelitian dilakukan pada Mei 2016). Selain itu, pengambilan obat-

⁸ Berdasarkan pengamatan di lapangan dan Wawancara dengan Wakil Kepala Operasional PLTD-PLTS Marore, 27 Mei 2016.

⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Kecamatan Kepulauan Marore 2015* (Kabupaten Kepulauan Sangihe: BPS, 2015), 2.

obatan ke ibu kota kabupaten juga terhambat jadwal kapal perintis yang tidak pasti.¹⁰ Pasien yang hendak dirujuk ke Tahuna harus menempuh jarak yang jauh dan jadwal kapal yang tidak menentu.

Kerja sama lintas batas BCA tidak secara spesifik menyebutkan bahwa kegiatan pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari kegiatan yang difasilitasi. Namun, beberapa orang secara mandiri memanfaatkan kemudahan lintas batas tersebut. Ada warga Pulau Matutuung yang memilih kuliah di General Santos Filipina. Beberapa warga yang sakit juga lebih memilih pergi ke Filipina untuk berobat dibanding ke ibu kota kabupaten. Hal ini dapat dimaklumi karena jaraknya memang lebih dekat. Bidang pembangunan SDM sektor pendidikan dan kesehatan berpotensi dijadikan bagian dari fokus kerja sama lintas batas Indonesia-Filipina pada masa mendatang. Salah satu cara yang bisa dilakukan, misalnya, pelajar di perbatasan tidak perlu mengurus visa pelajar jika ingin belajar di fasilitas pendidikan negara tetangga.

Hal yang harus diwaspadai terkait modal SDM adalah kerja sama lintas batas juga membuka peluang masuknya minuman keras dari Filipina ke Kepulauan Marore. Saat ini, perdagangan minuman keras memang ilegal, tetapi beberapa pedagang masih sering menyelundupkannya lewat “kesepakatan” dengan petugas yang berwenang. Minuman keras Filipina, seperti *Tanduy*, laku keras di Kepulauan Marore.¹¹ Hal ini dikhawatirkan dapat merusak sumber daya manusia Marore, terutama generasi mudanya. Dengan demikian, perlu ada komitmen kerja sama yang lebih tegas lagi antara aparat Indonesia dan aparat Filipina dalam hal pengawasan perdagangan dan peredaran minuman keras serta barang-barang terlarang lain.

¹⁰ F, Petugas Kesehatan Puskesmas Marore, Wawancara di Marore, 28 Mei 2016.

¹¹ YM, Pemilik toko dan pedagang ikan serta barang-barang kebutuhan sehari-hari, perdagangan lintas batas tradisional dari Marore, pernah punya pengalaman membawa barang secara ilegal, 31 Mei 2016 .

Keempat, modal ekonomi dan keuangan. Masyarakat Kepulauan Marore sebagian berprofesi sebagai nelayan (49,8%), petani/pekebun, dan PNS.¹² Petani dan PNS ini saat sore hari atau hari libur juga mencari ikan. Mereka menerapkan sistem *one-day fishing*, di mana hasilnya sebagian dijual, sebagian lagi dikonsumsi sendiri. Ketiadaan pengepul ikan besar di Kepulauan ini membuat nelayan tidak mau menangkap ikan terlalu banyak dan menyimpannya terlalu lama—karena akan rugi sendiri. Hal ini tentu berakibat pada kurang optimalnya pendapatan mereka. Peneliti tidak menemukan data pendapatan per kapita warga Kecamatan Kepulauan Marore. Namun, jika menggunakan data di tingkat kabupaten, pendapatan per kapita sebesar Rp20.926.624 per tahun, atau Rp1.743.885 per bulan.¹³ Pengeluaran rata-rata per kapitanya adalah Rp558.221 per bulan.¹⁴ Dengan data ini terlihat seolah masyarakat Sangihe, termasuk Kepulauan Marore, memiliki surplus pendapatan sebesar Rp1.185.664 per bulan. Namun, hal tersebut tidak tecermin dalam kehidupan masyarakat Marore. Harga barang-barang di Marore relatif lebih tinggi dibanding dengan harga barang di Tahuna. Di rumah seorang *Kapitalaung* (kepala desa) saja, makan mi instan merupakan suatu kemewahan dan digunakan untuk menyambut tamu. Selain itu, masih sedikit yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga bangku kuliah, kecuali yang berprofesi sebagai PNS.¹⁵ Dengan kata lain, angka statistik dari BPS tersebut kurang menggambarkan kondisi riil perekonomian masyarakat Kepulauan Marore yang relatif masih rendah.

¹² Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Marore Dalam Angka 2015* (Tahuna: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015), 26.

¹³ Diolah dari data PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe dibagi jumlah penduduk. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Sangihe*, 67 & 366.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Kepulauan Sangihe*, 356.

¹⁵ Bahkan menurut penuturan SM, orang-orang di sana jika diberi uang upah Rp1.000 atau Rp2.000 saja sudah sangat senang.

Adanya kerja sama perdagangan lintas batas dimanfaatkan beberapa orang di Kepulauan Marore untuk menjadi pengepul ikan hasil tangkapan nelayan. Jika sudah terkumpul cukup banyak—sekitar 300 kg—pengepul tersebut akan membawanya ke Filipina untuk dijual. Hasil dari penjualan dalam bentuk peso dibelanjakan barang-barang kebutuhan nelayan, seperti kail, cat, tripleks, dan paku. Barang-barang tersebut lalu dijual kembali di Marore. Ada pula pelintas batas Filipina menggunakan perahu fuso untuk membeli ikan langsung dari nelayan di Marore. Nelayan mendapat untung karena ikannya dibeli, pengepul mendapat untung dari menjual barang-barang buatan Filipina. Hal yang menjadi kendala adalah kuota US\$250 atau setara 3,3 juta rupiah/perahu/perjalanan. Bagi para pengepul lokal Marore, jumlah kuota tersebut tidak memadai lagi. Mereka harus menanggung biaya kapal, BBM, dan sewa anak buah kapal untuk pergi ke Filipina. Jika modal ikan yang dapat dibawa hanya sekitar Rp3,3 juta, keuntungan yang diperoleh tidak mampu menutupi biaya yang mereka keluarkan.¹⁶ Pihak pemerintah pusat menyatakan bahwa kuota tersebut memang bukan untuk pedagang, melainkan untuk pelintas batas biasa. Namun, perlu dicermati bahwa para pengepul ini sebenarnya membantu para nelayan karena mereka tidak perlu datang ke Filipina untuk menjual ikannya. Jadi dapat menghemat waktu dan biaya serta meminimalisasi risiko (gelombang besar jika berlayar sendiri ke Filipina). Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah kedua negara meninjau kembali besaran kuota perdagangan lintas batas.

Kelima, modal sosial. Hubungan sosial sudah terjalin dengan baik antara warga Marore dan warga Sarangani dan Balut. Banyak warga dari Marore yang menetap di sana, baik berstatus sebagai WNI penduduk Filipina, WN Filipina, maupun yang belum memiliki identitas/*stateless*. Mereka masih saling berkomunikasi dan berkunjung karena memiliki garis kekerabatan.

¹⁶ MM, Pengepul ikan, Wawancara di Marore, 27 Mei 2016.

Ketika kerja sama lintas batas diterapkan, kegiatan saling berkunjung lintas batas tersebut mendapatkan jaminan/perlindungan hukum. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa kegiatan lintas batas terus berlangsung. Pelakunya paling banyak adalah warga negara Indonesia, disusul warga negara Indonesia penduduk Filipina, baru kemudian warga negara Filipina. Aktivitas lintas batas memuncak pada musim teduh (Mei dan Juni) karena air laut cenderung tenang. Aktivitas lintas batas kembali ramai pada November dan Desember karena ada perayaan Natal. Bulan paling sepi adalah Januari karena biasanya gelombang cukup tinggi. Dengan berlangsungnya aktivitas lintas batas ini, hubungan sosial yang terjalin antara masyarakat Marore (Indonesia), masyarakat Sarangani, dan Balut (Filipina) pun tetap terjaga. Misalnya, ketika berkunjung ke Filipina, WNI akan menginap di rumah saudaranya, demikian pula sebaliknya.¹⁷

Tabel 6.2 Pelintas Batas Melalui PLB Satu Atap Marore 2015¹⁸

BULAN	MASUK			KELUAR			TOTAL
	WNI	WNIPP	WNP	WNI	WNIPP	WNP	
Januari 2015	5	0	0	11	0	0	16
Februari	8	2	0	18	4	10	42
Maret	20	3	7	24	3	2	59
April	23	2	17	10	1	3	56
Mei	23	21	12	39	12	16	123
Juni	35	21	18	25	18	7	124
Juli	25	7	5	26	8	10	81
Agustus	12	3	2	13	4	3	37
September	17	22	16	10	9	7	81
Oktober	7	9	2	16	19	8	61
November	21	21	16	17	13	5	93
Desember	19	17	6	37	15	5	99
TOTAL	215	128	101	246	106	76	
Keterangan	WNI	Warga Negara Indonesia					
	WNIPP	Warga Negara Indonesia Penduduk Philippine (Filipina atau Philippines)					
	WNP	Warga Negara Philippine (Filipina)					

¹⁷ MM, Pengepul ikan, Wawancara di Marore, 27 Mei 2016.

¹⁸ Tim Border Crossing Agreement Marore (2016).

Keenam, modal politik/kelembagaan. Secara administratif, Kepulauan Marore dipimpin oleh seorang camat. Tiga desa yang ada, yaitu Marore, Kawio, dan Matutuang, juga dipimpin seorang kepala desa yang secara adat disebut *Kapitalaung*. Yang menjadi persoalan adalah keterbatasan sumber daya manusia untuk mengisi pos-pos jabatan di instansi tersebut. Di kantor Kecamatan Kepulauan Marore terdapat kekosongan tiga jabatan kasi sehingga Kasi yang ada harus merangkap pekerjaan. Secara fungsional, masyarakat Kepulauan Marore sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat. Mereka diberikan bantuan beras sebanyak 20 ton sebagai bagian dari program bantuan rawan pangan. Semua kepala keluarga mendapatkan jatah tersebut dan cukup untuk memenuhi kebutuhan beras harian sepanjang tahun, termasuk ketika musim angin kencang.¹⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI juga memberikan bantuan berupa *cool storage* untuk tiap desa—walaupun belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan penjualan ikan. KKP juga memberikan bantuan 12 perahu motor (*pumpboat*) bagi nelayan. Namun, warga mengaku kualitas perahu tersebut kurang baik sehingga mesinnya diambil, lalu dipasang di perahu mereka sendiri.²⁰ Di satu sisi, pemberian bantuan ini meningkatkan ketahanan sosial jangka pendek masyarakat Kepulauan Marore. Di sisi lain, hal ini menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan mereduksi kreativitas masyarakat.

Terkait dengan modal politik/kelembagaan, hal yang perlu dicatat adalah adanya hubungan yang baik antara pemerintah Kecamatan Kepulauan Marore dengan pemerintah kota di Sarangani. Setiap ulang tahun kemerdekaan Filipina, pemerintah Kecamatan Kepulauan Marore diundang dan difasilitasi akomodasi serta konsumsinya. Hubungan yang baik ini tentu menjadi modal yang baik, di mana

¹⁹ RD, Sekretaris Kecamatan Kepulauan Marore, Wawancara di Marore, 29 Mei 2016.

²⁰ BM, *Kapitalaung* Kampung Kawio, Wawancara di Kecamatan Kepulauan Marore, 29 Mei 2016.

pemerintahan lokal kedua negara dapat saling mendukung dan saling berbagi informasi terkait berbagai persoalan di perbatasan. Namun, hal tersebut baru menyentuh aspek sosial budaya, sementara aspek lain, seperti politik dan ekonomi, masih belum ada. Potensi untuk melakukan hal tersebut ada, tetapi perlu diperhatikan juga bahwa setiap kebijakan/keputusan yang diambil pemerintah lokal harus seizin pemerintah pusat masing-masing negara.

Dari penjelasan enam modal ketahanan sosial tersebut, terlihat bahwa kerja sama lintas batas berdampak positif pada aspek modal sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan, sosial, dan politik/kelembagaan. Kerja sama lintas batas tidak berdampak pada modal alam. Kerja sama lintas batas malah dapat berdampak negatif pada modal sumber daya manusia, terkait kebiasaan minum minuman keras yang semakin marak. Dampak tersebut tergantung bidang cakupan kerja sama lintas batas. Analisis tersebut juga menggambarkan bahwa ada beberapa potensi pengembangan kerja sama lintas batas untuk masa yang akan datang.

B. DAMPAK KERJA SAMA LINTAS BATAS BAGI KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT SEBATIK

Sama halnya dengan Kepulauan Marore, analisis dampak kerja sama lintas batas terhadap ketahanan sosial bagi masyarakat Pulau Sebatik juga dilakukan melalui penelaahan enam modal ketahanan sosial.

Pertama, modal alam. Pulau Sebatik wilayahnya subur dan dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, terutama kelapa sawit. Kekayaan alam ini menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat Sebatik. Selain itu, lautnya juga cukup kaya akan berbagai jenis ikan dan udang.²¹ Letak astronomis yang berada di dekat khatulistiwa juga menjadikan curah hujan di wilayah

²¹ Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, "Pulau Sebatik," diakses pada 30 November 2016 dari http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/297.

ini cukup tinggi sehingga masyarakat tidak kesulitan air bersih. Secara geografis, Pulau Sebatik diuntungkan karena berdekatan dengan pusat ekonomi, seperti Tawau, yang hanya berjarak 10–20 menit menggunakan *speedboat*.

Dalam pelaksanaan kerja sama lintas batas, hampir tidak ada aspek yang menyentuh perbaikan modal alam. Yang ada adalah aktivitas memanfaatkan modal alam dengan lebih optimal, misalnya menjual hasil tangkapan ikan ke Tawau karena harga jualnya lebih tinggi.

Kedua, modal fisik. Ketersediaan sarana dan prasarana dasar, seperti fasilitas kesehatan, masih belum optimal. Saat ini bahkan belum ada rumah sakit yang dapat melayani rawat inap. Sarana transportasi pun belum memadai. Saat ini terdapat kapal yang melayani jalur Nunukan-Sebatik dengan jadwal rutin. Namun, ketersediaan angkutan umum di Sebatik masih terbatas dan cukup mahal. Hal ini berdampak pada kurang menyatunya warga Sebatik dengan wilayah lainnya di Kabupaten Nunukan. Hal ini juga berdampak pada masalah pengangkutan hasil pertanian.

Salah satu implementasi kerja sama lintas batas adalah masyarakat Sebatik dibuatkan sarana Pos Lintas Batas Sei Pancang agar dapat pergi ke Tawau-Malaysia dengan mudah. Sarana ini membantu warga melakukan kunjungan sosial dan perdagangan lintas batas. Namun, pada 2011, layanan PLB Sei untuk lalu lintas orang ditutup. Semua aktivitas lintas batas kemudian dipusatkan di PLB Nunukan. Artinya, warga Sebatik harus memutar ke selatan dulu (ke Pulau Nunukan) untuk bisa mendapat cap imigrasi, baru kemudian bisa ke Tawau Malaysia. Hal ini tentu memberatkan warga Sebatik dari segi biaya dan waktu. Pada akhirnya, penutupan PLB Sei Pancang untuk lalu lintas orang tersebut semakin meningkatkan kegiatan lintas batas ilegal. Warga Sebatik yang tertangkap harus berhadapan dengan askar (tentara) Malaysia.

Ketiga, modal sumber daya manusia. Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Sebatik hanya SD sampai SLTP. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Utara. Sementara itu, dalam hal kualitas kesehatan, posyandu yang dekat dengan pemukiman warga memudahkan warga yang memiliki balita untuk mengontrol tingkat kesehatan dan pertumbuhan anak-anak mereka. Generasi muda yang sehat tentu menjadi modal yang baik bagi ketahanan sosial pada masa mendatang.

Dalam pelaksanaan kerja sama lintas batas, sama seperti kasus di Marore, bidang pendidikan dan kesehatan atau pembangunan SDM secara umum tidak dicantumkan sebagai salah satu fokus kerja sama lintas batas. Kegiatan yang ada lebih berdimensi sosial budaya. Kemudahan lintas batas ke Malaysia membuat masyarakat Sebatik lebih mudah pula mengakses sarana kesehatan di Malaysia yang relatif lebih baik dibandingkan sarana kesehatan di Sebatik, bahkan di Nunukan. Sering dijumpai warga Sebatik yang memilih berobat ke Tawau dibandingkan ke rumah sakit di Nunukan yang jaraknya lebih jauh.

Keempat, modal ekonomi dan keuangan. Secara umum, pendapatan masyarakat Sebatik diperoleh dari mata pencaharian sebagai petani/pekebun, nelayan, dan pedagang. Namun, dalam struktur ekonomi Kabupaten Nunukan, pertambangan pada periode 2010–2014 mengalahkan sektor pertanian sebagai sektor yang paling berkontribusi terhadap PDRB, yaitu 55,07% pada 2014, sementara sektor pertanian hanya 20,10%.²² Walaupun secara umum PDRB per kapita di Nunukan, termasuk Sebatik, cukup besar, yaitu Rp93.045.780 per tahun atau Rp7.753.815 per bulan,²³ mayoritas masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, termasuk perikanan, pendapatan per

²² Badan Pusat Statistik, *Nunukan dalam Angka 2015*, (Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015), 278.

²³ Badan Pusat Statistik, *Nunukan*, 289.

kapitanya Rp18.705.300 per tahun atau Rp1.558.775 per bulan.²⁴ Angka ini masih lebih kecil daripada angka rata-rata kebutuhan hidup layak di Nunukan pada 2014 yang sebesar Rp2.189.365.²⁵

Dalam pelaksanaan kerja sama lintas batas, fasilitasi perdagangan Sebatik-Tawau dengan kuota 600 ringgit dimanfaatkan warga Sebatik untuk menjual hasil bumi dan hasil tangkapan ikan ke Tawau. Uang tersebut kemudian dibelanjakan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, minyak, biskuit, minuman dan air mineral, gas, sera BBM dari Tawau. Sebagian warga menggunakannya untuk keperluan sendiri, sebagian lainnya menjualnya kembali di Sebatik. Selain harga yang lebih murah, kualitasnya juga lebih bagus. Di satu sisi, hal ini baik bagi peningkatan pendapatan masyarakat Sebatik. Di sisi lain, hal ini juga mengkhawatirkan. Ketergantungan yang begitu tinggi terhadap penjualan hasil pertanian, perikanan, dan suplai barang kebutuhan pokok dari Tawau-Malaysia dapat membuat ketahanan sosial mereka rawan, terutama bila sewaktu-waktu ada kejadian yang tak terduga yang membuat aktivitas lintas batas ini harus ditutup. Hal ini mungkin saja terjadi, misalnya pecahnya konflik di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.

Kelima, modal sosial. Masyarakat di Sebatik terdiri atas berbagai suku yang berasal dari Bugis, Jawa, Tidung, dan Flores.²⁶ Walaupun terdiri atas berbagai suku, masyarakat Sebatik hidup dalam suasana harmonis dan kekeluargaan. Toleransi dalam keberagaman suku merupakan modal sosial yang baik. Selain itu, masyarakat Sebatik juga sudah sejak lama berinteraksi dengan masyarakat Tawau. Kedekatan geografis dan ikatan kekerabatan menjadi pendorong interaksi tersebut.

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Nunukan*, 288.

²⁵ Badan Pusat Statistik, *Nunukan*, 62.

²⁶ Herman Hidayat, dkk. "Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Serawak dan Sabah)", dalam Riwanto Tirtosudarmo dan John Haba, ed. *Dari Entikong Sampai Nunukan : Dinamika perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Serawak – Sabah)*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005) 110–125.

Ketika kerja sama lintas batas diterapkan, interaksi dan hubungan sosial antarmasyarakat Sebatik dan Tawau semakin mudah karena difasilitasi dengan pengeluaran pas lintas batas dan pembangunan pos lintas batas. Banyak warga Aji Kuning Sebatik yang melakukan kunjungan kekeluargaan ke Tawau, baik untuk bersilaturahmi dengan kerabat, menghadiri upacara peringatan kenegaraan, maupun acara festival budaya.²⁷ Selain kerja sama dalam bidang perniagaan, masyarakat Sebatik juga sering mengadakan acara khusus untuk mempererat tali kekeluargaan. Setiap tanggal 17 Agustus biasanya diselenggarakan pertandingan bulu tangkis, voli, dan sepak bola yang pesertanya warga kedua negara.²⁸ Namun, sejak PLB di Sei Nyamuk ditutup dan dialihkan ke PLB Tunon Taka di Pulau Nunukan, banyak warga yang pada akhirnya memilih melakukan aktivitas lintas batas ilegal. Mereka menggunakan jaringan kerabat di Malaysia yang mempunyai *Identity Card* (IC) untuk melakukan lintas batas. Beberapa warga bahkan mempunyai kewarga-negaraan ganda. Penutupan ini juga berimbas pada semakin berkurangnya jumlah pelintas batas resmi. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini, jumlah pelintas batas yang melewati Pos Sei Pancang semakin sedikit. Itu pun biasanya ABK kapal, bukan pelintas batas normal.

²⁷ Wawancara dengan S, warga Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah, 12 Juni 2016.

²⁸ Camat Sebatik Tengah, Wawancara di Sebatik Tengah, 10 Juni 2016.

Tabel 6.3 Pelintas Batas dengan Menggunakan Pas Lintas Batas di Sebatik dan Sekitarnya Tahun 2014²⁹

BULAN	WNI				WNA				JUMLAH
	S.PANCANG		TUNON TAKA		S.PANCANG		TUNON TAKA		
	BRK	DTG	BRK	DTG	BRK	DTG	BRK	DTG	
Januari	334	334	3.233	4.316	-	-	43	54	8.314
Februari	359	359	2.903	3.816	-	-	83	55	7.575
Maret	347	347	3.083	4.087	-	-	49	72	7.985
April	279	279	2.139	3.227	-	-	37	41	6.002
Mei	289	289	2.921	3.405	-	-	36	40	6.980
Juni	214	214	3.276	3.280	-	-	51	60	7.095
Juli	2.060	2.060	2.473	3.434	-	-	30	61	10.118
Agustus	226	226	2.466	3.637	-	-	80	57	6.692
September	235	235	2.407	3.404	-	-	42	36	6.359
Oktober	282	282	2.293	3.008	-	-	58	57	5.980
Nopember	185	185	2.475	3.247	-	-	69	68	6.229
Desember	138	138	2.616	3.338	-	-	157	186	6.573
JUMLAH	4.948	4.948	32.285	42.199	0	0	735	787	85.902

Keenam, modal politik. Pemerintah pusat memberikan perhatian yang besar terhadap Pulau Sebatik. Mereka mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Ada pula bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp100 miliar untuk membangun sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, seperti *cold storage*, *solar packed dealer* nelayan, perlindungan abrasi pantai, dan sebagainya. Mengingat Sebatik adalah wilayah perbatasan rawan pelanggaran kedaulatan, didatangkan satuan tugas pengamanan perbatasan (satgas pamtas) TNI AD maupun Pos AL di Sebatik. Namun, jumlah personel yang terbatas dan kurangnya sarana operasi membuat pengamanan menjadi kurang optimal.

²⁹ Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan, 2016.

Kerja sama lintas batas pada awalnya memberi legitimasi hukum bagi masyarakat perbatasan dan semua kegiatan lintas batas tradisional menjadi legal. Namun, penutupan PLB di Sebatik—menurut informasi yang beredar, dilakukan atas permintaan Pemerintah Malaysia karena PLB tersebut tidak memenuhi standar internasional—membuat kegiatan lintas batas ilegal semakin marak. Masalah pengamanan perbatasan juga belum termasuk bidang yang diakomodasi dalam BCA dan BTA. Hal ini membuat kegiatan lintas batas ilegal menjadi lebih sulit dikontrol. Namun, perkembangan keamanan maritim di perairan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada 2016 (terkait pembajakan kapal dan penculikan ABK oleh kelompok Abu Sayyaf) membuat pemerintah ketiga negara pada Mei 2016 bersepakat melakukan patroli gabungan lintas batas.³⁰ Hal ini tentu akan menguntungkan bagi pengamanan laut perbatasan Sebatik yang dekat dengan lokasi penculikan.

Dari penjelasan terhadap enam modal ketahanan sosial di Pulau Sebatik tadi, kerja sama lintas batas memberi dampak positif bagi modal fisik dengan pembangunan PLB; bagi modal SDM dengan turut memfasilitasi kualitas kesehatan masyarakat; bagi modal ekonomi dengan perdagangan lintas batas; bagi modal sosial dengan menjaga dan meningkatkan hubungan sosial; dan bagi modal politik dengan peningkatan pengamanan laut perbatasan. Namun, kerja sama lintas batas tidak terlalu berpengaruh terhadap modal fisik. Terakhir, kerja sama lintas batas juga memberikan dampak negatif bagi ketahanan sosial berupa ketergantungan masyarakat Sebatik terhadap akses jual maupun suplai barang dari Tawau-Malaysia.

³⁰ “Indonesia, Malaysia, dan Filipina Sepakati Patroli Gabungan,” *Deutsche Welle*, 5 Mei 2016, diakses pada 2 Desember 2016 dari <http://www.dw.com/id/indonesia-malaysia-dan-filipina-sepakati-patroli-gabungan/a-19237708>.

C. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Secara teoretis, ada beberapa faktor yang teridentifikasi memengaruhi keberhasilan kerja sama perbatasan. Pertama, menurut Thao, diperlukan kehendak politik yang kuat dari masing-masing pihak untuk bekerja sama.³¹ Jika dilihat kembali, kerja sama lintas batas Indonesia-Malaysia mengalami hambatan dengan ditutupnya PLB di Pulau Sebatik sejak tahun 2011. Penutupan ini merupakan tanggapan atas keluhan pihak Malaysia tentang kondisi alat transportasi lintas batas yang tidak sesuai standar internasional. Kapal seharusnya menggunakan material besi, tetapi mayoritas menggunakan material kayu. Kapasitas kapal juga tidak memenuhi standar 7 GT.

Dari kasus ini terlihat bahwa kedua negara mempunyai masalah dalam kehendak politik (*political will*). Dari sisi Indonesia, penutupan PLB tradisional Sei Pancang untuk orang telah berlangsung sejak 2011 hingga 2016, berarti ada waktu lima tahun yang seharusnya dapat digunakan untuk menjawab keluhan Malaysia tersebut. Namun, sampai kini PLB belum juga dibuka. Menurut pengakuan salah satu asisten deputi (asdep) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), awalnya Malaysia mengeluhkan moda transportasi kapalnya harus minimal 7 GT. BNPP kemudian merespons keluhan dengan menyumbangkan kapal berkapasitas 7 GT untuk moda transportasi lintas batas. Namun, pihak Malaysia masih menolak dengan alasan kapal tersebut tidak boleh terbuat dari kayu. Jika Pemerintah Malaysia memiliki kehendak politik yang kuat, mengapa bukan mereka yang menyediakan kapal lintas batas tersebut?

Pihak petugas Malaysia juga seolah membiarkan aktivitas lintas batas ilegal tetap terjadi, sama halnya dengan petugas Indonesia. Mereka tahu ada kegiatan lintas batas ilegal, tetapi seolah membiarkannya dengan alasan kearifan lokal demi kemaslahatan masyarakat. Ada indikasi bahwa mereka mendapatkan keuntungan dengan

³¹ Nguyen Hong Thao, "Joint Development in the Gulf of Thailand," *IBRU Boundary and Security Bulletin*, Vol.7 No.3 (Autumn 1999): 79–88.

maraknya aktivitas perdagangan lintas batas ilegal. Seperti diketahui, BTA membatasi kuota barang dagangan 600 ringgit/orang/bulan yang bebas dari bea cukai. Jika melebihi kuota maka akan dikenai bea cukai seperti ekspor-impur biasa. Pihak Malaysia menikmati perdagangan lintas batas ilegal ini karena tidak perlu memikirkan batas kuota tersebut. Komoditas ekstraktif dari Indonesia banyak yang masuk ke Malaysia sebagai bahan baku industri. Demikian pula sebaliknya, pihak Indonesia mendapat keuntungan karena dapat mendatangkan barang kebutuhan sehari-hari dari Malaysia tanpa pembebasan kuota, bahkan termasuk barang-barang subsidi Malaysia. Dengan demikian, keuntungan yang didapat pun semakin besar. Dari penjelasan tersebut, terlihat kurang kuatnya kehendak politik, baik dari sisi pemerintah, aparat yang berwenang di lapangan, maupun para pelaku usaha/pedagang di sana untuk mengoperasikan PLB yang legal karena kepentingan-kepentingan yang mereka miliki.

Kedua, Thao mengemukakan faktor tingkat kecanggihan kelembagaan dari kerja sama perbatasan tersebut sebagai salah satu penentu keberhasilan kerja sama lintas batas.³² Semakin baik kelembagaannya, semakin berhasil pula kerja sama perbatasannya. Kelembagaan di sini bermakna aturan-aturan yang dijalankan dan organisasi yang berwenang menjalankan aturan tersebut. Jika merujuk pada kasus Pos Lintas Batas Satu Atap Marore, peneliti menyaksikan sendiri bagaimana sulitnya warga dari Pulau Matutuang mengurus izin di pos ini. Mereka menghabiskan waktu hingga dua hari di Pulau Marore hanya untuk mengurus perizinan tersebut. Seharusnya semua fungsi CIQS dapat diurus di kantor satu atap tersebut. Kenyataannya, petugas dari masing-masing fungsi tersebut tidak ada di tempat, bahkan pergi di luar pulau. Pihak yang selalu ada hanya petugas kecamatan yang diperbantukan. Jadi pelintas batas harus mencari setiap petugas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan di rumah mereka masing-masing. Mereka juga harus meminta stempel camat Kepulauan

³² Nguyen Hong Thao, "Joint Development," 79–88.

Marore selaku koordinator Tim BCA Marore. Karena perlu dua hari untuk mengurus perizinan tersebut, mereka terpaksa menginap dan tidur di kapal yang disandarkan di pantai padahal mereka membawa orang sakit yang hendak berobat ke Filipina.

Kondisi sebaliknya terjadi di perbatasan bagian Filipina. Menurut pengakuan salah seorang pengepul ikan pelintas batas, petugas di Filipina "...yang penting kita oke-oke, tidak membawa barang yang dilarang dan tidak melebihi kuota yang dibatasi oleh pemerintah... kalau di sana lebih enak juga pelayanan mereka."³³ Hal ini menunjukkan bahwa pihak Filipina memang membutuhkan barang-barang dari Indonesia, seperti ikan. Harga ikan di sana lebih tinggi daripada di Marore. Selain itu, warga Filipina Selatan juga sangat menyukai produk Indonesia, seperti detergen, sabun, dan rokok. Tingkat kelembagaan semacam ini tidak baik karena mencerminkan tingkat pengawasan yang kurang ketat padahal daerah ini rawan terhadap penyusupan teroris dan penyelundupan barang-barang terlarang (minuman keras, ayam jago aduan, hingga senjata api).

Gambaran tersebut menunjukkan tingkat kelembagaan pada operator kerja sama lintas batas, baik dari sisi Indonesia maupun Filipina, masih lemah. Di Indonesia, kelemahan terletak pada tingkat efisiensi pengurusan perizinan. Sampai saat penelitian dilakukan, PLB Satu Atap Marore memang belum diresmikan, walaupun pembangunan sarana prasarannya sudah selesai. Di Filipina, tingkat efisiensi proses perizinan cepat dan selesai pada hari yang sama, tetapi pengawasannya kurang ketat.

Faktor ketiga, tingkat kestrategisan wilayah perbatasan tersebut bagi kedua negara. Menurut Starr dan Thomas, jika terlalu strategis, tingkat pengamanannya cenderung terlalu ketat sehingga mengganggu jalannya aktivitas lintas batas. Jika tidak strategis, daerahnya tidak terlalu diperhatikan pemerintah sehingga kerja samanya cenderung

³³ MM, Pedagang ikan dan barang-barang kebutuhan nelayan, perdagangan lintas batas tradisional dari Marore, Wawancara di Marore, 29 Mei 2016.

kurang berhasil. Dengan tingkat kestrategisan yang menengah, potensi kerja sama lintas batas akan berhasil.³⁴ Dalam konteks Indonesia, wilayah perbatasan mendapatkan perhatian yang besar sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dengan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada 2011. Pada masa pemerintahan penggantinya, Presiden Joko Widodo, pembangunan perbatasan semakin diprioritaskan dan menjadi bagian dari Misi Nawa Cita pemerintah, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan demikian, kawasan perbatasan menjadi sangat strategis bagi pemerintah Indonesia.

Akan tetapi, tingkat kestrategisan wilayah Kepulauan Marore masih kalah bila dibandingkan wilayah Kecamatan Khusus Miangas, yang letaknya berdekatan. Miangas adalah pulau perbatasan paling utara. Pulau ini menjadi ikon pulau perbatasan yang sering didengungkan presiden SBY, “Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.” Sebagai imbasnya, Pulau Miangas sangat diperhatikan, terutama sisi pertahanan keamanannya. Ada Pos AL, ada Pos AD, ada pula satuan Marinir ditempatkan di sana. Pada 2016, diresmikan bandara di Miangas khusus untuk militer dan pengiriman logistik dan akan ada detasemen TNI AU ditempatkan di sana. Karena ketatnya pertahanan keamanan, aktivitas lintas batas di Miangas tidak terlalu ramai dibandingkan di Marore.

Sementara itu, Kepulauan Marore tidak terlalu menjadi ikon seperti halnya Pulau Miangas. Tingkat pengamanannya juga tidak terlalu ketat, hanya Pos AL yang dilibatkan dalam proses perizinan lintas batas. Hal ini memungkinkan proses pemeriksaan keamanannya berjalan lebih cepat. Dengan demikian, aktivitas lintas batas juga terlihat lebih ramai.

³⁴ Harvey Starr dan G. Dale Thomas, “The Nature of Borders and International Conflict: Revisiting Hypotheses on Territory,” *International Studies Quarterly* 49 (2005): 123–139.

D. KESIMPULAN

Sebagai penutup, penulis ingin menindaklanjuti salah satu keluhan warga di lapangan tentang kuota perdagangan lintas batas yang dirasa kurang. Berbagai *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan terkait menemukan adanya dua polarisasi pendapat. Pertama, dari sisi BNPP yang mendukung penambahan kuota tersebut sebagai perlakuan khusus bagi masyarakat kawasan perbatasan, terutama pulau-pulau kecil yang jauh dari ibu kota kabupaten dan ibukota provinsi. Kedua, dari sisi Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai RI yang menolak ide penambahan kuota tersebut. Alasannya, perdagangan lintas batas hanya untuk memfasilitasi orang biasa, bukan pedagang. Melihat pendapatan per kapita di Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe yang hanya Rp23.371.635,39 atau 1,9 juta rupiah per bulan, kuota US\$150–250 yang setarakan Rp1.961.250 sampai Rp2.693.500 sudah mencukupi. Jika kuota dilebihkan, tingkat pendapatan masyarakat biasa tidak akan mampu memakai kuota tersebut secara maksimal. Hal ini justru rawan disalahgunakan oleh oknum pedagang untuk tujuan komersialisasi. Pada akhirnya, hal ini akan berisiko mengurangi potensi penerimaan negara, defisit neraca perdagangan perbatasan, dan mengurangi daya saing industri sekitar perbatasan.³⁵

Seperti yang dipaparkan dalam Subbab 6.2 pada bagian modal ekonomi dan keuangan, data statistik kadang tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan. Jika ingin menentukan perlu tidaknya penambahan kuota perdagangan lintas batas, jangan hanya mengandalkan data statistik saja (kadang sumbernya pemerintah kecamatan dalam menuliskan angka dengan cara kira-kira), tetapi juga data kualitatif yang lebih dapat menggambarkan kondisi riil di wilayah perbatasan.

³⁵ Presentasi Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan pada FGD yang dilaksanakan di Widya Graha LIPI Jakarta, 13 Oktober 2016.

DAFTAR ACUAN

- “Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing.” 12 Januari 2006.
- “Agreement between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia on Immigration.” 4 Juli 1956.
- “Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Malaysia.” 24 Agustus 1970.
- “Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines.” 8 Agustus 1974.
- Badan Pusat Statistik. *Kepulauan Marore dalam Angka 2015*. Tahuna: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Kepulauan Sangihe dalam Angka 2015*. Tahuna: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Nunukan dalam Angka 2015*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Sebatik dalam Angka 2015*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Daerah Kecamatan Kepulauan Marore 2015*. Tahuna: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015.
- Lee, Sangsoo, dan Alec Forss. *Dispute Resolution and Cross-Border Cooperation in Northeast Asia: Reflections on the Nordic Experience (Asia Paper)*. Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2011.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman.
- Presentasi Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan pada FGD yang dilaksanakan di Widya Graha LIPI Jakarta, 13 Oktober 2016.
- Puskesmas Marore. *Profil Puskesmas Marore Tahun 2015*. Marore: Puskesmas Marore, 2016.
- Starr, Harvey dan G. Dale Thomas. “The Nature of Borders and International Conflict: Revisiting Hypotheses on Territory.” *International Studies Quarterly* 49 (2005): 123–139.

Thao, Nguyen Hong. "Joint Development in the Gulf of Thailand." *IBRU Boundary and Security Bulletin No and vol?*(Autmn 1999): 79–88.

"Indonesia, Malaysia, dan Filipina Sepakati Patroli Gabungan." *Deutsche Welle*, 5 Mei 2016. Diakses pada 2 Desember 2016 dari <http://www.dw.com/id/indonesia-malaysia-dan-filipina-sepakati-patroli-gabungan/a-19237708>.

Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil. "Pulau Sebatik." Diakses pada 30 November 2016 dari http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/297.

WAWANCARA:

Wawancara dengan BM, Kapitalaung Kampung Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore, 29 Mei 2016.

Wawancara dengan MM, Pengepul Ikan, Marore, 27 Mei 2016.

Wawancara dengan RD, Sekretaris Kecamatan Kepulauan Marore, 29 Mei 2016.

Wawancara dengan SO, Camat Sebatik Tengah, 10 Juni 2016.

BAB VII

Ketahanan Sosial dan Kerja Sama Lintas Batas: Catatan Penutup dan Langkah ke Depan

Sandy Nur Ikfal Raharjo

Tulisan-tulisan dalam buku ini berfokus pada tiga isu utama. Pertama, kondisi ketahanan sosial masyarakat pulau kecil perbatasan di Marore dan Sebatik. Kedua, implementasi kerja sama lintas batas yang selama ini berjalan di dua lokasi tersebut. Ketiga, dampak kerja sama lintas batas terhadap ketahanan sosial masyarakatnya.

Pertama, kondisi ketahanan sosial masyarakat pulau kecil perbatasan di Marore dan Sebatik. Dapat dikatakan bahwa ketahanan sosial masyarakat Kepulauan Marore lebih stabil karena tidak terlalu bergantung dengan Filipina. Kebutuhan sehari-hari masyarakat Marore kebanyakan masih didatangkan dari Tahuna yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hanya saja, terkait bahan tertentu, yakni paku, lem, tripleks untuk bahan dasar kapal, masyarakat memang memilih produk dari Filipina. Ketahanan sosial masyarakat Marore justru rentan akibat banyaknya bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bantuan pemerintah sebagai bentuk perhatian terhadap kawasan perbatasan memang patut diapresiasi. Namun, sebaiknya bantuan tersebut lebih diprioritaskan dalam hal pembangunan infrastruktur pengolahan hasil tangkapan nelayan atau penciptaan lapangan kerja. Hal-hal seperti itulah yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berpengaruh terhadap kemandirian masyarakat. Untuk kasus Sebatik, potensi kekayaan alam yang melimpah di sana tampaknya belum dioptimalkan dan dikembangkan secara menyeluruh. Akibatnya, program pembangunan belum banyak menyentuh aspek yang potensial. Hal ini menjadikan wilayah Sebatik Indonesia jauh tertinggal dibanding dengan wilayah Sebatik Malaysia. Minimnya moda transportasi, ketersediaan kebutuhan pokok produk dalam negeri dan air bersih, juga infrastruktur pendidikan serta kesehatan menjadikan perkembangan sosial dan mobilitas penduduk antarkecamatan/kabupaten masih sangat terbatas, terutama jika dibandingkan wilayah sekitar (Nunukan, Tarakan maupun Tawau/Malaysia). Hal ini masih ditambah keterbatasan akses untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, ketahanan sosial di dua lokasi tersebut masih rawan karena ketergantungan terhadap Malaysia. Sementara itu, untuk kasus Marore, ketahanan sosial masih rawan karena kondisi alam yang terisolasi dan bantuan pemerintah yang mengikis kemandirian masyarakat.

Isu kedua mengenai implementasi kerja sama lintas batas. Kerja sama tersebut secara garis besar terdiri atas dua jenis. Pertama, *Border Crossing Agreement*. Indonesia-Filipina dan Indonesia-Malaysia menyetujui fasilitasi lintas batas tradisional warga di kawasan perbatasan untuk melakukan kunjungan keluarga, ziarah keagamaan, kegiatan sosial budaya, dan atau rekreasi. Jenis kerja sama yang kedua adalah *Border Trade Agreement*, Indonesia-Filipina dan Indonesia-Malaysia yang membebaskan bea cukai ekspor impor bagi barang-barang bawaan para pelintas batas dengan kuota tertentu. Batasan untuk Indonesia-Filipina di Kepulauan Marore, ditetapkan kuota US\$150 per perahu/perjalanan atau US\$1.500 per kumpit atau US\$250 per orang/bulan. Sementara itu, batasan untuk Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, ditetapkan kuota 600 ringgit per perahu/perjalanan.

Isu ketiga adalah dampak kerja sama lintas batas. Kasus di Marore menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas berdampak positif pada

aspek modal sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan, sosial, dan politik/kelembagaan. Sementara itu, kerja sama lintas batas terlihat tidak berdampak pada modal alam. Terakhir, kerja sama lintas batas bahkan dapat berdampak negatif pada modal sumber daya manusia, terutama kebiasaan minum minuman keras yang semakin marak. Dampak tersebut tergantung bidang yang dicakup dalam kerja sama lintas batas. Selain itu, analisis juga menggambarkan ada beberapa potensi pengembangan kerja sama lintas batas ke depan. Kasus di Sebatik menunjukkan kerja sama lintas batas memberi dampak positif bagi modal fisik dengan pembangunan PLB; modal SDM dengan turut memfasilitasi kualitas kesehatan masyarakat; modal ekonomi dengan perdagangan lintas batas; sosial dengan menjaga dan meningkatkan hubungan sosial; serta politik dengan peningkatan pengamanan laut perbatasan. Kerja sama lintas batas tidak terlalu berpengaruh terhadap modal fisik. Terakhir, kerja sama lintas batas juga memberikan dampak negatif bagi ketahanan sosial berupa ketergantungan masyarakat Sebatik terhadap akses jual maupun suplai barang dari Tawau-Malaysia.

Tulisan-tulisan dalam buku ini menegaskan bahwa secara teoretis, konsep kerja sama lintas batas mempunyai hubungan korelasional dengan konsep ketahanan sosial untuk kasus di wilayah perbatasan. Tulisan-tulisan ini juga menegaskan bahwa konsep *Sustainable Livelihood Approach* perlu dikembangkan lebih lanjut untuk pulau-pulau kecil perbatasan, di mana modal kelembagaan politik (termasuk keamanan) perlu ditambahkan selain lima modal lainnya. Refleksi lainnya adalah ketahanan sosial tidak harus berorientasi ke dalam, yaitu mengandalkan modal-modal internal saja. Dalam konteks wilayah perbatasan, ketahanan sosial juga dapat berorientasi ke luar. Maksudnya, masyarakat/komunitas yang berbatasan secara geografis dapat saling berbagi modal-modal yang mereka miliki untuk dimanfaatkan bersama.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pada akhirnya, hal yang perlu mendapat perhatian adalah wacana mengoptimalkan kerja sama lintas batas. Salah satunya melalui reformulasi kuota perdagangan lintas batas. Selama ini masih ada keberatan dari beberapa kementerian/lembaga karena data statistik tidak mendukung penambahan kuota. Penelitian ini menunjukkan bahwa data statistik kadang tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan. Untuk menentukan perlu tidaknya penambahan kuota perdagangan lintas batas, jangan hanya mengandalkan data statistik saja, tetapi juga data kualitatif untuk mendapatkan gambaran pulau-pulau kecil perbatasan yang utuh.

Tulisan-tulisan dalam buku ini sebenarnya dapat sedikit menggambarkan bagaimana seharusnya strategi peningkatan ketahanan sosial pada masyarakat pulau-pulau kecil perbatasan melalui optimalisasi kerja sama lintas batas. Mengutip poin-poin yang ada di beberapa bab sebelumnya, strategi tersebut setidaknya memuat tiga hal, yaitu tujuan (*ends*), alat (*means*), dan cara (*ways*).

Untuk menentukan tiga hal tersebut, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, identifikasi ancaman yang ada, baik dari internal masyarakat pulau-pulau kecil perbatasan sendiri (dari dalam negeri), maupun yang berasal dari eksternal masyarakat (negara tetangga dan lingkungan internasional yang lebih luas).

Kedua, identifikasi sumber daya yang ada. Dalam hal ini, mengidentifikasi enam modal ketahanan sosial yang ada; mana yang lemah dan mana yang kuat. Identifikasikan pula sumber daya negara tetangga yang dapat digunakan. Lakukan analisis modal mana saja yang vital/strategis/sensitif terhadap kondisi ketahanan sosial masyarakat pulau-pulau kecil perbatasan.

Ketiga, identifikasi dokumen perjanjian kerja sama lintas batas yang sudah ada; apakah sudah sesuai dengan hasil dua identifikasi sebelumnya atau belum. Susun apa yang belum terakomodasi, apa yang sudah terakomodasi tetapi belum terlaksana dengan baik, serta apa yang sudah terakomodasi dan terlaksana dengan baik.

Keempat, konsolidasi dan koordinasi internal antarpemangku kepentingan di pihak Indonesia. Libatkan aktor pemerintah, masyarakat, dan swasta—bila memungkinkan—untuk menentukan poin-poin ketentuan apa saja yang harus ada dalam dokumen kerja sama lintas batas. Misalnya, bidang cakupan kerja sama (memuat semua modal ketahanan sosial yang vital/strategis/sensitif di pulau kecil perbatasan), pelaku kerja samanya, serta fasilitas yang diberikan, serta jangka waktu pelaksanaan. Buat skenario maksimal dan minimal sebagai persiapan untuk dirundingkan dengan negara tetangga.

Kelima, komunikasi intensif dan negosiasi dengan pemerintah negara tetangga. Namun, pihak Indonesia harus satu suara, tidak boleh terpecah, dan berbeda-beda. Untuk itu, penunjukan *vocal point/* koordinator dipandang penting.

Terkait langkah tersebut, optimalisasi kerja sama lintas batas untuk meningkatkan ketahanan sosial dapat dilakukan dalam dua alternatif. Pertama, mempertahankan dokumen kerja sama lintas batas yang sudah ada, tetapi dengan memaksimalkan implementasi poin-poin perjanjiannya. Misalnya, melalui pemenuhan prasyarat-prasyarat pembukaan kembali pos lintas batas di Pulau Sebatik. Alternatif kedua, mereformulasi dokumen kerja sama lintas batas agar sesuai dengan kondisi sekarang. Alternatif ketiga, tidak mengubah dokumen kerja sama lintas batas yang ada, tetapi menambah dokumen kerja sama lintas batas yang baru, yang dapat mengakomodasi bidang/modal ketahanan sosial selain BCA (untuk modal sosial) dan BTA (untuk modal ekonomi dan keuangan). Untuk mewujudkan hal tersebut, advokasi yang kuat dan konsisten perlu dilakukan kepada pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah Indonesia, melainkan juga kepada pemerintah negara tetangga.

Untuk dapat merumuskan langkah yang lebih konkret dan teknis dari berbagai pilihan tersebut, diperlukan penelitian lanjutan tentang optimalisasi kerja sama lintas batas. Penelitian tersebut diharapkan dapat mengkristalisasi hasil temuan penelitian sebelumnya, menggali

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masukan-masukan dari para pelaku lintas batas dan warga perbatasan, kemudian merumuskan strategi dan rencana aksi yang dapat dan mudah untuk dilaksanakan (*feasible*).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

GLOSARIUM

<i>Kapitalaung</i>	Pemimpin lokal di Kepulauan Marore yang juga berperan sebagai kepala desa.
Kerja sama lintas batas	Kerja sama internasional yang dilakukan secara bilateral ataupun multilateral antarnegara atau antarkawasan, baik yang berbatasan langsung maupun yang tidak, dalam rangka mencapai keuntungan atau tujuan bersama.
Ketahanan sosial	Kemampuan masyarakat mengatasi berbagai risiko sebagai dampak dari perubahan sosial, ekonomi dan politik.
Kartu Identitas Lintas Batas (KILB)	Kartu yang dikeluarkan kantor pabean yang membawahi pos pemeriksaan lintas batas. Kartu ini diberikan kepada pelintas batas setelah memenuhi persyaratan tertentu
Pos Lintas Batas (PLB)	Area yang berfungsi sebagai gerbang keluar-masuknya pelintas batas wilayah negara (manusia atau barang) yang minimum dilengkapi fasilitas pelayanan terpadu <i>Customs, Immigration, Quarantine, dan Security</i> (CIQS)
<i>Preferential Trade Agreement</i> (PTA)	Pakta perdagangan antarnegara yang mengurangi tarif untuk komoditas ter-

<i>Pumpboat</i>	tentu bagi negara-negara yang menandatangani. Perahu kecil jenis kano dengan atau tanpa motor, bagian depan dan belakangnya meruncing ke atas untuk menahan/pemecah ombak, bagian samping kanan dan kiri mempunyai cadik (sema-sema) untuk menjaga keseimbangan.
Pustu	Unit pelayanan kesehatan yang sederhana. Pustu berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
<i>Sustainable Livelihood Theory</i>	Model untuk mengukur ketahanan sosial berdasarkan aset yang dimiliki, yakni yaitu modal alam (lingkungan), modal fisik, modal manusia, modal sosial, dan modal keuangan.
Sangir	Sebutan bagi orang-orang yang berasal dari kepulauan Sangihe Besar.
Tulude	Upacara adat yang digelar setiap awal pergantian tahun oleh masyarakat keturunan Sangir sebagai ungkapan syukur kepada <i>Mawu Ruata Ghenggo-na Langi</i> (Tuhan Yang Mahakuasa).
<i>Undocumented people</i>	Orang-orang yang tidak memiliki dokumen yang menyatakan kewarganegaraannya, seperti paspor dan pas lintas batas.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR SINGKATAN

ABK	Anak Buah Kapal
AD	Angkatan Darat
AL	Angkatan Laut
AU	Angkatan Udara
BBM	Bahan Bakar Minyak
BCA	<i>Border Crossing Agreement</i>
BNI	Bank Negara Indonesia
BNPP	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BTA	<i>Border Trade Agreement</i>
BPPD	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
CIQS	<i>Custom, Immigration, Quarantine, and Security</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
Danlanal	Komandan Pangkalan Angkatan Laut
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
GT	<i>Gross Tonage</i>
ISPA	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
Kadin	Kamar Dagang Indonesia
KILB	Kartu Identitas Lintas Batas
KK	Kepala Keluarga
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLB	Kartu Lintas Batas
Koramil	Komando Rayon Militer

KUD	Koperasi Unit Desa
LPG	Liquefied Petroleum Gas
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Pelni	Pelayaran Nasional Indonesia
Perpres	Peraturan Presiden
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKK	Program Kesejahteraan Keluarga
PLB	Pos Lintas Batas
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PLTD	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMT	Pemberian Makanan Tambahan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Porseni	Pertandingan Olah Raga dan seni
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PP	Peraturan Pemerintah
PTA	<i>Preferential Trade Agreement</i>
Pustu	Puskesmas Pembantu
RM	Ringgit Malaysia
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satgas Pamtas	Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SLF	<i>Sustainable Livelihood Framework</i>
SMA/SLTA	Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP/SLTP	Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
TBS	Tandan Buah Segar
TK	Taman Kanak-kanak
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TPI	Tempat Pelelangan Ikan
UCI	<i>Universal Child Immunization</i>
UNCLOS	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UU	Undang-Undang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

WNI	Warga Negara Indonesia
WNIPP	Warga Negara Indonesia Penduduk Philipina (Filipina)
WNP	Warga Negara Philipina (Filipina)
WPP	Wilayah Pengelolaan Perikanan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

INDEKS

- Aji Kuning, 71, 73, 76–80, 84, 86, 88–90, 95, 98, 135, 137, 147–51, 156, 171
- Ambalat, 2, 20, 78, 154, 171
- Angin barat, 34
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 63, 66, 99, 174, 177, 189
- Balut, 31, 52–3, 101–2, 104, 107–8, 112, 126, 159, 165
- Border Crossing Agreement, 5, 22, 24, 88, 105, 111, 128, 140, 157, 166, 182, 189
- Border Trade Agreement, 5, 22, 24, 95, 119, 123, 128, 140, 157, 159, 182, 189
- Bugis, 87, 88, 134–6, 155, 171
- CIQS, 115, 176, 187, 189
- Cold storage, 92
- Davao, 4, 52, 109, 110
- Filipina, vi, xiv, 1, 4, 5, 9, 10, 23–4, 26, 31, 36, 38, 44, 49, 52–7, 60–3, 66, 99, 100–19, 121, 122, 124–31, 157, 159, 161–7, 173, 176–7, 180–2, 191
- General Santos, 61, 109, 110, 161, 162
- Gurango, 49, 67
- Illegal, 26, 122, 130
- Imigrasi, 72, 107, 110, 145–6, 151, 155–6, 172
- Indonesia, vi, ix, x, xiii, 1, 3–10, 15, 19–26, 29, 31, 34–5, 37–8, 51–3, 55, 58, 61, 63–6, 69–71, 73–4, 78–9, 84–90, 94–7, 100–10, 112–4, 116–8, 120, 122, 124–31, 133, 135, 137–45, 147–50, 152–5, 157–9, 161–3, 165–6, 171, 173–7, 179–80, 182, 185, 189–91, 197–8

- Kalimantan Utara, xi, 6, 8, 64, 70, 75, 90, 134, 137
- Kapitalaung, 36, 39, 40, 56, 66, 164, 166-7, 180, 187
- Kawio, 30-2, 36, 38-44, 50, 53-4, 56, 59, 62, 66, 107, 112, 121, 159, 160-2, 166, 167, 180
- Kerentanan, 33
- Kerja sama lintas batas, 8, 9, 15, 18, 96, 129, 162, 168, 173, 183, 187
- Ketahanan sosial, 11-3, 63, 74, 181, 187
- Malaysia, vi, xiv, 1, 6-9, 19-22, 24, 26, 64, 69, 70, 72-4, 76-81, 83-9, 93-8, 130, 133-45, 147-9, 152-5, 157-9, 169-75, 179, 180, 182-3, 190
- Manado, 35, 41, 49, 61, 66, 103, 106, 109, 110, 116, 125, 131
- Marore, i, iii, v, vi, xi, xiv, 4, 6, 9, 10, 22-4, 29, 30-67, 99-104, 107-12, 115-21, 124-9, 131-2, 157-69, 176-82, 187
- Masyarakat Ekonomi ASEAN, 2, 95, 136, 155, 190
- Matutuang, 30-2, 38-44, 50, 53-4, 59, 60, 104, 107, 109, 121, 132, 161-2, 166, 176
- Miangas, 20, 107, 109, 112, 120, 131, 159, 177-8
- Mindanao, 4, 52, 101, 102
- Modal fisik, 60
- Modal sosial, xi, 4, 50, 51
- Nelayan, 2, 38, 47, 49, 50, 56-7, 61, 63, 66-7, 164
- Nunukan, 6, 8, 9, 21, 26, 70, 72, 75, 77-85, 87, 89-91, 96-8, 133-4, 137, 139, 141-3, 145-7, 151-2, 154-6, 159, 169-73, 179, 182
- Pas lintas batas, 108
- Pengepul, 50, 53, 55, 67, 132, 164, 165, 180
- Perbatasan, xiv, 4, 6, 15-6, 19-22, 25-7, 38, 53, 63-7, 69-70, 98-9, 102-3, 107, 113, 122, 130-1, 134-8, 155, 174, 177, 189, 190, 198
- Peso, 127
- Petani, 36, 76, 163
- Pos AL, 61, 62, 66, 146, 173, 177, 178
- Pos lintas batas, 111
- Pumpboat, 188
- Ringgit, 141, 144, 153, 190
- Sabah, 6, 70, 73, 79, 89, 95, 98, 130, 133-4, 137-8, 142, 155, 159
- Sangihe, vi, 4, 23, 30, 36-9, 41-8, 51-3, 55-8, 61-2, 65-7, 99-110, 113, 122, 125-6, 128, 130-1, 162-3, 178, 179, 181, 188
- Sangir, 4, 51-3, 61, 65, 101, 127, 130, 159, 188
- Sarangani, 31, 52-3, 159, 165, 167
- Sebatik, i, iii, v, vi, xi, xiv, 6, 7, 8, 9, 10, 20-6, 64, 69-98, 130, 133-41, 143-58, 168-74, 179-83, 185

- Sei Nyamuk, 70, 72, 81, 89, 98, 135, 138, 172
- Sei Pancang, 70, 72, 89, 135, 138, 145-7, 151-2, 154, 169, 172, 174
- Sulawesi Utara, xi, 4, 30, 51, 62, 66, 101-2, 113, 130, 131
- Sulu, 4
- Tahuna, 30, 35-8, 41, 44-6, 49, 53, 56, 61, 63-5, 67, 102, 109, 116-8, 120, 125-7, 161-4, 179, 181
- Talau, 6, 20, 31, 51, 101-3, 107, 108, 110, 130, 159
- Tarakan, 21, 73, 96, 107, 143, 182
- Tawau, vi, 8, 21, 73, 76, 78, 79, 80-1, 83-6, 88-9, 93, 96, 133, 136-51, 153-5, 159, 168-71, 174, 182, 183
- Tidung, 87, 134-5, 155, 171
- Tulude, 51-2, 65, 188

BIOGRAFI PENULIS

Sandy Nur Ikfal Raharjo, peneliti bidang perkembangan politik internasional di Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia menyelesaikan gelar sarjana S.Sos. di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, tahun 2010. Pendidikan S2 ia tempuh di Universitas Pertahanan Indonesia dan berhasil meraih gelar M.Si. (Han) pada 2015. Penelitian dan tulisan-tulisannya berfokus pada isu-isu perbatasan di Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara. *E-mail*: sandy.raharjo@gmail.com.

Esty Ekawati lahir di Kota Metro, 30 Desember 1984. Menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Politik di Program Ekstensi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia pada 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Politik di universitas yang sama pada 2010. Pernah menjadi staf pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan Universitas Bung Karno, Jakarta, hingga akhirnya pada Februari 2015 menjadi peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kajian yang diminati adalah Partai Politik dan Perempuan dalam Politik. Selain tergabung dalam tim penelitian Gender dan Politik di P2 Politik LIPI, penulis juga sempat tergabung dalam tim penelitian Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Perbatasan (2016–2017) dan Tim Pilkada Jakarta (2017). sejak 2015 penulis juga menjadi anggota redaksi Jurnal Penelitian Politik LIPI. *E-mail*: esty1wati@gmail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Muhammad Fakhry Ghafur, peneliti bidang agama dan politik serta isu-isu kawasan Timur Tengah pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia memperoleh gelar sarjana Sastra Arab dan Studi Islam dari The Faculty of Islamic Call Tripoli, Libya pada 2006, serta gelar Magister Ilmu Al-Qur'an dan Studi Islam dari Institut PTIQ Jakarta tahun 2009. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan adalah Demokrasi dan Fundamentalisme Agama (2011–2014), Problematika Kekuatan Politik Islam di Negara-negara Timur Tengah (2015–2017), serta Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Perbatasan (2016–2017). *E-mail*: fachryghafur@gmail.com.

Bayu Setiawan, menyelesaikan pendidikan Sarjana Antropologi di Universitas Udayana Bali dan program Master of Art (M.A.) dalam bidang Demografi di Australian National University (ANU). Menjadi peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI sejak tahun 1990, ia telah banyak melakukan penelitian dengan fokus kajian kependudukan di wilayah perbatasan dan wilayah Nusa Tenggara Timur. Beberapa tulisannya sudah dipublikasikan dalam buku dan jurnal ilmiah. *E-mail*: bayusetiawanppk@gmail.com.

Ahmad Wildan Masyhari, pria kelahiran Nganjuk, 12 Februari 1988. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, tahun 2013 dengan spesialisasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Ia banyak berkecimpung dalam kegiatan yang berfokus pada perbatasan, yaitu Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Kawasan Perbatasan Negara (2015–2016) dan Revitalisasi serta Akselerasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara di Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2015). Selain itu, ia juga aktivis perbatasan dan tergabung dalam Komunitas Sabantara. *E-mail*: aw.masyhari@gmail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KETAHANAN, SOSIAL, MASYARAKAT

PULAU-PULAU KECIL, TERLUAR:

Studi Kepulauan Marore dan Pulau Sebatik

Kawasan perbatasan laut Indonesia mencakup 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi. Dari 111 pulau kecil terluar tersebut, sebagian di antaranya dihuni oleh masyarakat. Sayangnya, ketahanan sosial masyarakat pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Bunga rampai ini mengulas dua kontribusi untuk pengembangan wacana perbatasan: 1) Melihat perbatasan dalam konteks permasalahan pulau-pulau kecil; 2) Perbatasan dalam konteks ketahanan sosial-budaya dan politik. Hal ini penting dilakukan mengingat pulau-pulau kecil terluar selama ini sering dianggap sebagai ekosistem yang mempunyai kerentanan geografis, geologis, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

Untuk itu, bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tidak hanya bagi peneliti, tetapi juga dosen, mahasiswa, dan tentunya pemerintah dalam menentukan arah kebijakan terkait pengembangan sarana dan prasarana penunjang di pulau-pulau kecil terluar Indonesia.



Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. R.P. Suroso No. 39, Menteng,
Jakarta 10350
Telp. (+62 21) 314 0228, 314 6942
Faks.: (+62 21) 314 4591
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id

LIPI Press

ISBN 978-979-799-951-3



Buku ini tidak diperjualbelikan